



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 48

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan daerah diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien dengan pembangunan berbasis *Smart City* sehingga tercapai terwujudnya masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan arah pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program dalam bentuk *Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hasil Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 57);

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
2. *Smart City* adalah daerah kabupaten/kota yang cerdas mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan sehingga masyarakatnya dapat hidup aman, nyaman, dan sejahtera.
3. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Tujuan penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Gunungkidul;
- b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Gunungkidul;

- c. sebagai dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul;
- d. untuk menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* pemerintah daerah, Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
- e. untuk menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul dalam dokumen perencanaan *Smart City* Gunungkidul; dan
- f. untuk mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) *Masterplan Smart City* Kabupaten Gunungkidul disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	VISI MISI <i>SMART CITY</i>
BAB III	ANALISIS KESIAPAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BAB IV	ANALISIS GAP DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BAB V	STRATEGI <i>SMART CITY</i> DALAM 6 DIMENSI
BAB VI	RENCANA AKSI <i>SMART CITY</i>
BAB VII	PETA JALAN <i>SMART CITY</i> KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BAB VIII	<i>QUICK WINS</i>
BAB IX	PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci *Masterplan Smart City* Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 48.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
MASTERPLAN *SMART CITY*
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

MASTERPLAN
SMART CITY KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi yang sangat besar di sektor pariwisata. Keunggulan dan keberhasilan pada sektor ini dapat memiliki dampak terhadap daya saing ekonomi, kemandirian dan kesejahteraan warga Gunungkidul.

Namun tentu saja di samping keunggulan potensi daerah, terdapat juga permasalahan yang timbul, antara lain belum optimalnya kinerja pemerintahan, angka kemiskinan yang cukup tinggi, akses dan kualitas pendidikan yang belum baik serta ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang belum memadai.

Keunggulan dan permasalahan daerah menjadi dasar atau latar belakang terhadap pencarian solusi yang *smart* atau inovasi untuk dapat meraih keunggulan dan menyelesaikan permasalahan.

Rencana Pembangunan Kabupaten Gunungkidul telah disusun untuk masa waktu 2016-2021, tentu saja RPJMD tersebut akan menjadi acuan dan panduan dalam mewujudkan inovasi. Arah kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi dan sasaran strategis pembangunan akan memberikan kepastian hukum dan anggaran demi terlaksananya setiap inovasi yang diciptakan.

Pendekatan solusi smart dalam pelaksanaan pembangunan dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Teknologi Informasi yang inovatif;
- b. terobosan pada sektor unggulan;
- c. terobosan dalam penyelesaian masalah
- d. penggunaan data sebagai pengambil kebijakan atau keputusan;
- e. kolaborasi antar bidang dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pada saat yang sama, tren teknologi digital telah banyak mengubah tatanan dan perilaku keseharian warga. Pemanfaatan internet dan smartphone menjadi hal yang lumrah hingga tingkat desa. Digitalisasi adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini. Digitalisasi pemerintahan akan menjadi motor utama untuk dapat memberikan layanan publik yang memuaskan bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Dan tentu saja hasil dari ini adalah terciptanya wilayah yang aman, nyaman, layak huni, berdaya saing ekonomi dan masyarakat yang cerdas sehingga tercapai tataran sejahtera.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah di seluruh Indonesia. Pembangunan *Smart City* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau enabler.

Tren gerakan pembangunan kota atau daerah berbasis *Smart City* bisa kita saksikan di berbagai belahan dunia seperti Barcelona, Tokyo, London, Berlin, Amsterdam, Melbourne, Seoul, Shanghai, Mumbai, Singapura dan lain-lain. Di setiap kota di berbagai belahan dunia tersebut memiliki kisah sukses pembangunan *Smart City* yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh setiap kota. Di Korea, sebuah kawasan reklamasi seluas 600 hektar dibangun dari nol sebagai sebuah *Smart City*, di Dubai menjadikan Masdar sebagai Kota yang membangun program kemandirian energi dengan energi surya dan terbarukan serta bertekad menjadi kota yang bebas emisi karbon, Amsterdam fokus pada pembangunan *Smart People*, *Smart Energy*, dan *Smart Waste Management*. Di Singapura, pembangunan *Smart City* langsung dikendalikan dibawah *Prime Minister Office* sebagai sebuah program untuk warga, pebisnis, dan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dengan memanfaatkan teknologi, ide, aplikasi, dan big data.

Smart City menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing daerah dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan data analytic sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*). Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lain.

Jadi inisiasi *Smart City* yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah kabupaten dan kota mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep *Smart City* dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

Pada dasarnya konsep *Smart City* berfokus pada pengembangan elemen manusia melalui pemanfaatan teknologi. Jadi melalui teknologi setiap elemen didorong untuk berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi-inovasi demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. Masterplan *Smart City* hadir sebagai wadah berbagai inovasi yang muncul dari proses berpikir kreatif dan identifikasi aktif. Masterplan *Smart City* memungkinkan setiap ide dapat terakomodasi ataupun memperkaya ide yang lainnya. Masterplan *Smart City* juga memastikan bahwa suatu ide tidak akan berdiri sendiri melainkan akan menjadi bagian dari suatu rencana implementasi yang terintegrasi dan komprehensif.

Masterplan *Smart City* berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan. Masterplan ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan daerah. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas dan karakter kota, masterplan *Smart City* mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah khas perkotaan.

Masterplan *Smart City* juga memastikan proses transformasi menuju konsep kota pintar baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sehingga sebuah masterplan *Smart City* haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah;
- b. berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal;
- c. obyektif, tepat sasaran, dan tepat guna;
- d. berkesinambungan; dan
- e. dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah.

1.2. Tujuan Masterplan

Adapun tujuan dari disusunnya Masterplan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Gunungkidul;
2. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Gunungkidul;

3. dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul;
4. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* pemerintah daerah, Perangkat Daerah (PD) lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
5. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul dalam dokumen perencanaan *Smart City* Gunungkidul; dan
6. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

1.3. Landasan Hukum

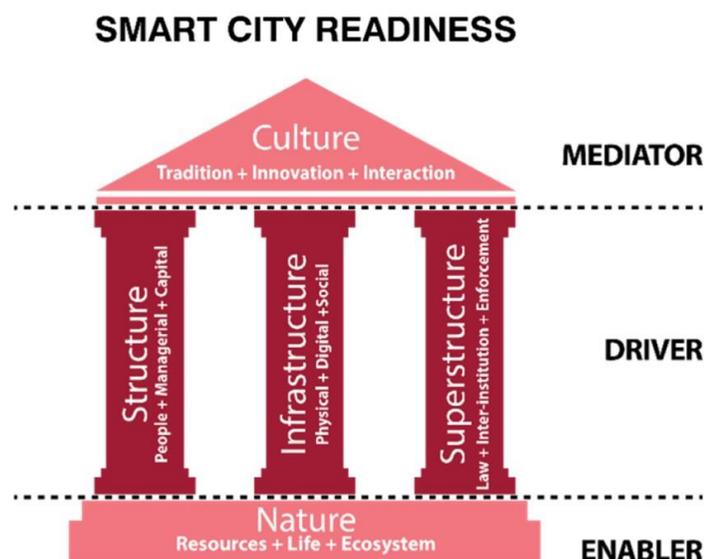
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Memorandum of Understanding (MoU) Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

1.4. Kerangka Pikir *Smart City*

Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan *Smart City*. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga *think tank* dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Istilah *smart* dalam bahasa Indonesia disebut dengan “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pandai; cakap”, “cerdik; banyak akal”, dan “mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)” atau “cerdas” yang diartikan sebagai “sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran” dan “sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)”. Kata “Kota Pintar” dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “*intelligent*”. Namun demikian penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Dalam membangun *Smart City*, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

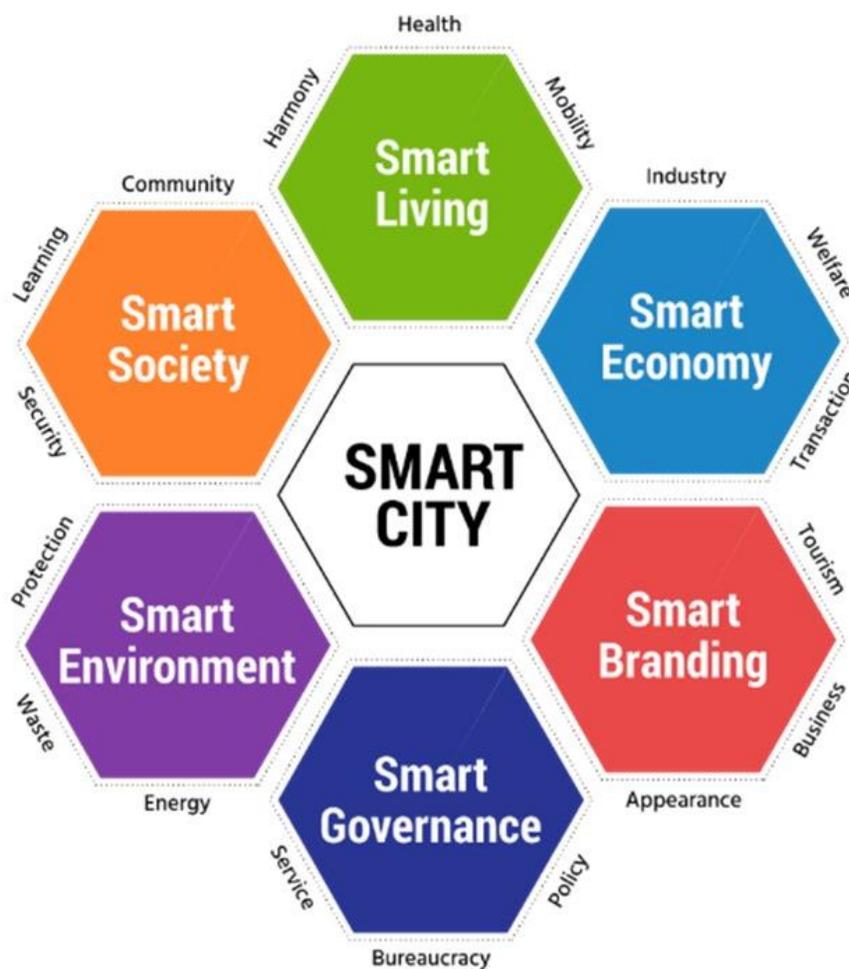


Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

Gambar 1. Elemen Smart Readiness

1. Struktur;
pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
2. Infrastruktur;
pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
3. Suprastruktur;
penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah *Smart City* adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *Smart City* itu sendiri.



Gambar 2. Dimensi *Smart City*

1.4.1. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu Pelayanan (*service*), Birokrasi (*bureaucracy*) dan Kebijakan (*policy*)

1.4.2. Smart Branding

Dimensi kedua dalam *Smart City* adalah *Smart Branding*, yaitu *branding* daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

Sehingga pada dasarnya konsep *branding* daerah memiliki kemiripan dengan konsep *branding* di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam *branding* korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada *branding* daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari *Smart Branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

1.4.3. Smart Economy

Dimensi ketiga dalam *Smart City* adalah smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart economy dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

Sasaran dari dimensi smart economy di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam smart economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

1.4.4. Smart Living

Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*.

Sasaran dari *Smart living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

1.4.5. Smart Society

Smart Society sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari *Smart Society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *Smart Society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

1.4.6. Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *Smart Environment* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Sasaran dari *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

BAB II VISI MISI *SMART CITY*

2.1. Visi Misi *Smart City*

Visi *Smart City* tentunya harus selaras dengan visi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera”

Misi *Smart City* Gunungkidul adalah memanfaatkan teknologi informasi dan data untuk menciptakan inovasi, guna menemukan terobosan dalam meningkatkan potensi unggulan daerah, penyelesaian permasalahan dan membangun kolaborasi antar bidang untuk mewujudkan visi

2.2. Sasaran *Smart City*

Sasaran *Smart City* Kabupaten Gunungkidul adalah tercapainya misi pembangunan kepala daerah dengan solusi yang pintar. Sasarannya adalah:

1. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional;
4. meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah;
5. mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif; dan
6. meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

BAB III

ANALISIS KESIAPAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.1. Fisik Wilayah

3.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU no 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah dirinci sebagai berikut:

- a. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kecamatan yang meliputi 144 desa dan 1.431 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat tabel 1.

Tabel 1. Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa	Jumlah Padukuhan	Jumlah RW
1	Punggang	99,8	6,72	6	44	44
2	Purwosari	71,76	4,83	5	32	32
3	Paliyan	58,07	3,91	7	50	50
4	Saptosari	87,83	5,91	7	60	60
5	Tepus	104,91	7,06	5	83	84
6	Tanjungsari	71,63	4,82	5	72	71
7	Rongkop	83,46	5,62	8	100	100
8	Girisubo	94,57	6,37	8	82	82
9	Semanu	108,39	7,30	5	106	136
10	Ponjong	104,49	7,03	11	119	120
11	Karangmojo	80,12	5,39	9	104	104
12	Wonosari	75,51	5,08	14	103	151
13	Playen	105,26	7,09	13	101	101
14	Patuk	72,04	4,85	11	72	82
15	Gedangsari	68,14	4,59	7	67	67
16	Nglipar	73,87	4,97	7	53	53
17	Ngawen	46,59	3,14	6	67	67
18	Semin	78,92	5,31	10	116	121

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul, (Gunungkidul dalam Angka 2016)

3.1.2. Topografi

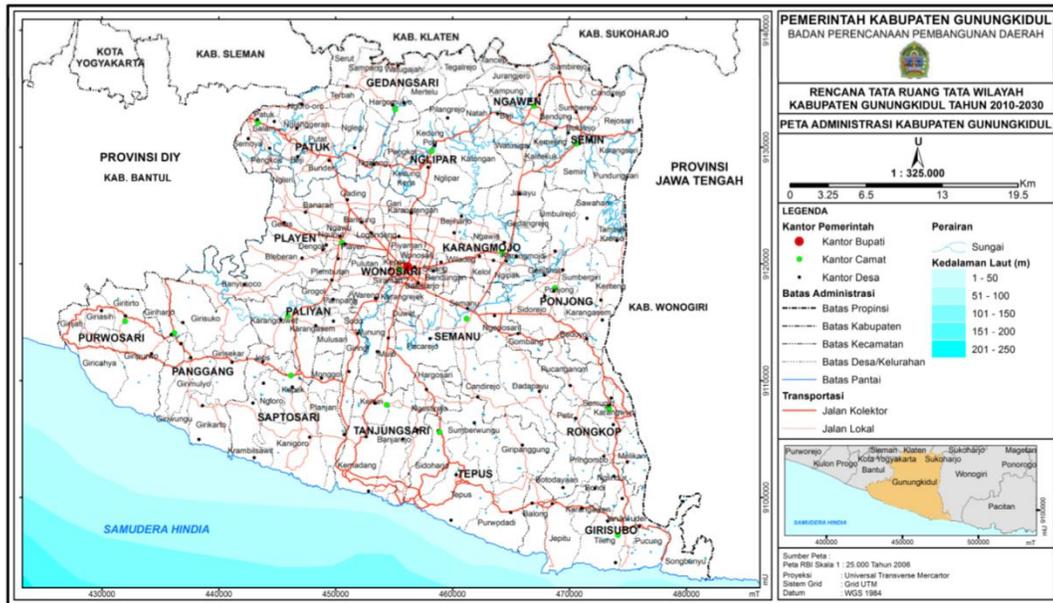
Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu:

- a. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200m - 700m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m -12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara.
- b. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150m – 200m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dangrumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi di musim

kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m – 120m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara.

- c. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0m – 300m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan.

Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu: (1) datar (0-2%): 26.768 ha; (2) bergelombang (3-15%): 41.435 ha; (3) curam (16-40%): 59.452 ha dan (4) sangat Curam (>40%): 20.881 ha wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0–800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.341,71 km² atau 90,33 % berada pada ketinggian 100–500 m di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75 % terletak pada ketinggian kurang dari 100 m dpl, dan 1,92 % terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000 m dpl.



umber: RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

Gambar 3. Peta Topografi Kabupaten Gunungkidul

3.1.3. Hidrologi

Di Kabupaten Gunungkidul terdapat dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak-Oyo dan DAS Dengkeng. Masing-masing DAS itu terdiri dari beberapa Sub DAS yang berfungsi untuk mengairi areal pertanian, juga terdapat DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin.

Air permukaan (sungai dan mata air) banyak dijumpai di Gunungkidul wilayah utara dan tengah. Di wilayah tengah beberapa tempat mempunyai air tanah yang cukup dangkal dan dimanfaatkan untuk sumur ladang. Wilayah selatan Gunungkidul merupakan kawasan karst yang jarang ditemukan air permukaan. Di wilayah ini dijumpai sungai bawah tanah seperti Bribin, Ngobaran, dan Seropan serta ditemukan juga telaga musiman yang multiguna bagi penduduk sekitarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3045/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bentang alamkarst berupa kawasan perbukitan batu gamping yang terletak di Kecamatan Wonosari, Ponjong, Panggang, Semanu, Purwosari,

Paliyan, Saptosari, Rongkop, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Jumlah sungai di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 14 buah, sebagian besar terdapat di wilayah utara. Sungai terbesar di Kabupaten Gunungkidul adalah Sungai Oyo dengan lokasi mata air di Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah) dan bermuara di Samudera Hindia.

Jumlah mata air di wilayah Kabupaten Gunungkidul ada 215 buah, sedangkan jumlah telaga ada 252 buah. Di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah dan sebagian kecil wilayah selatan terdapat sumur bor (*deep well*) sebanyak 77 buah dengan fungsi untuk irigasi pertanian dan untuk air minum penduduk setempat. Untuk kepentingan irigasi, satu sumur bor mempunyai kemampuan oncoran antara 15–50 ha. Kemampuan masing-masing sumur tergantung pada debit airnya.

Beberapa sungai bawah tanah dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan air baku/air bersih bagi rumah tangga antara lain, di Bribin, Ngobaran, Seropan, dan Baron. Air sungai bawah tanah juga dirintis untuk kepentingan irigasi pertanian seperti Seropan untuk wilayah Kecamatan Semanu.

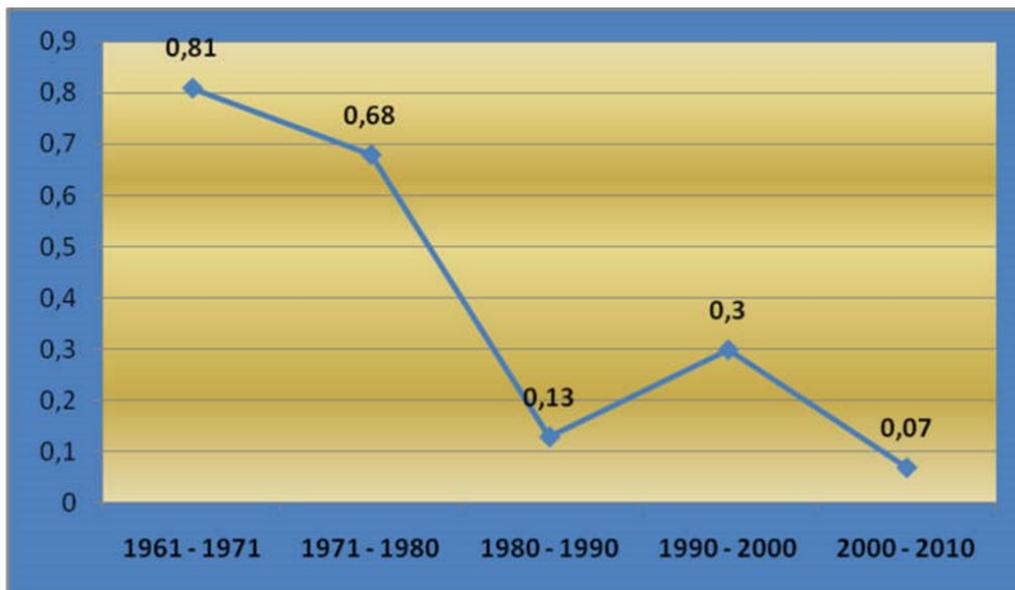
3.1.4. Klimatologi

Jumlah rata-rata bulan basah di Kabupaten Gunungkidul tiap tahunnya berkisar 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7–8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober–Nopember dan berakhir pada bulan Maret–April setiap tahunnya. Puncak curah hujan terjadi pada bulan Desember – Pebruari dengan wilayah bagian utara mengalami curah hujan lebih tinggi dibandingkan wilayah tengah dan selatan.

Suhu udara Kabupaten Gunungkidul untuk suhu rata-rata harian 27,7° C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C. Kelembaban nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80% – 85%. Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari–Maret, sedangkan terendah pada bulan September.

3.1.5. Demografi

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk.

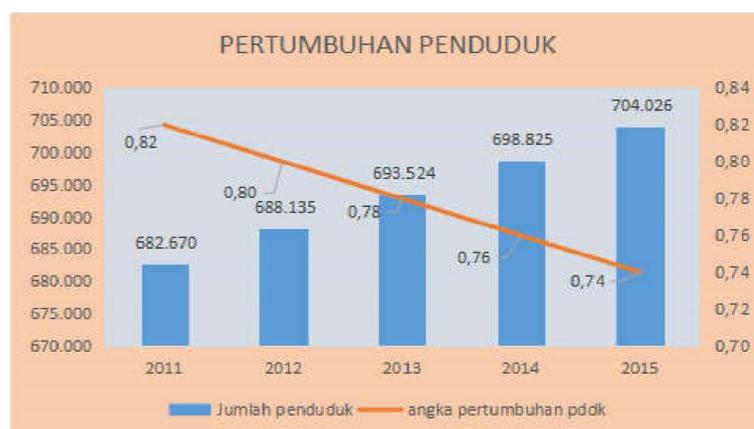


Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Kabupaten Gunungkidul 2016

Gambar 4. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 1961-2010

Pada umumnya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul dari 1961 sampai dengan 2010 terus melambat dari 0,81 % per tahun pada periode 1961 – 1971 menjadi 0,68 % per tahun pada periode tahun 1971 – 1980. Bahkan pada periode tahun 1980-1990 terjadi pertumbuhan sebesar 0,13 % per tahun. Sedangkan pada periode tahun 1990 – 2000 pertumbuhan penduduk naik kembali menjadi 0,30 % per tahun dan pada periode 2000 – 2010 melambat menjadi 0,07 % per tahun.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul lebih dipengaruhi oleh migrasi keluar (*out migration*). Kondisi geografis dan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan menjadi salah satu faktor pendorong penduduk untuk mencari nafkah keluar daerah.



Sumber: Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2016 (Diolah)

Gambar 5. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015

3.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
- c. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;
- e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

3.3. Isu Strategis Pembangunan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan kondisi lingkungan strategis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Gunungkidul berdasarkan bidang permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan kualitas pelayanan publik.
Reformasi birokrasi di Kabupaten Gunungkidul masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) daerah serta belum semua Perangkat Daerah mempunyai Standar Pelayanan. Di sisi lain pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien. Reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.

2. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dalam aspek pendidikan serta kesehatan. Permasalahan di bidang pendidikan akan diatasi dengan peningkatan kompetensi guru, peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di bidang kebudayaan akan dilakukan peningkatan fasilitasi kekayaan budaya dan nilai tradisi dan pelestarian nilai budaya. Di bidang kesehatan ke depan akan diatasi dengan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diiringi dengan akreditasi Puskesmas, pendampingan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu segera disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang terpadu lintas bidang. Untuk menurunkan angka pengangguran perlu diintensifkan pelatihan ketrampilan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru.

3. Belum mantapnya ketahanan ekonomi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang menerapkan inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting.

4. Belum optimalnya pengelolaan dan daya saing pariwisata. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih profesional sehingga mampu bersaing dan menjadi daerah tujuan wisata terkemuka. Kondisi ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (length of stay) di Gunungkidul. Perkembangan kunjungan wisatawan yang meningkat 256% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum diikuti dengan peningkatan lama tinggal wisatawan yang signifikan. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark dalam satu kesatuan Gunungsewu UNESCO Global Geopark, untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Event wisata untuk menarik wisatawan mancanegara perlu diintensifkan dan ditingkatkan dengan prioritas pada event wisata yang mendunia dan berkelas internasional.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah untuk mewujudkan konektivitas dan akses antar wilayah untuk mendukung pariwisata. Infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul belum seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan sarana lalu lintas serta ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana sarana publik sesuai rencana tata ruang terhadap desakan

pemanfaatan ruang. Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya layanan transportasi umum yang disebabkan minimnya minat pengguna dan terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat, infrastruktur perekonomian khususnya penunjang pariwisata juga masih perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya. Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, sarana perhubungan, ruang terbuka publik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat dan peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan perekonomian dan pariwisata.

6. Percepatan pembangunan kawasan pesisir pantai selatan secara terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar”.

Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu menjadikan laut sebagai halaman muka dan bidang pertanian sebagai tulang punggung (back bone) pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk mengisi dan merealisasikan keistimewaan melalui pembangunan daerah di segala bidang secara terpadu dan sinergis.

7. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), masih

adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan lahan kritis dan sumber daya alam.

3.4. Analisis Kesiapan Struktur

3.4.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 mencapai 762.452 jiwa, menduduki peringkat 3 di wilayah Provinsi DIY. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk didominasi oleh jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka pencari kerja, yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2016, mayoritas pencari kerja didominasi oleh lulusan SMK, peringkat berikutnya adalah lulusan SMU, Sarjana (S-1 dan S2), D1/D2/D3, dan SLTP.

Dengan demikian untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan dengan memberi dukungan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar mampu menyekolahkan sampai tingkat pendidikan tinggi (diploma/sarjana). Tentunya hal tersebut tidaklah mudah dan sangat dibutuhkan dukungan pendanaan serta intervensi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan penduduknya. Untuk lebih memberikan gambaran riil tentang daya saing ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Jiwa	(%)								
1	Tidak/belum sekolah	218.985	25,57	190.793	24,98	183.333	24,46	190.605	25,22	191.409	25,10
2	Tidak Tamat SD	79.342	9,26	70.504	9,23	69.318	9,25	70.389	9,31	70.118	9,20
3	Tamat SD	248.563	29,02	226.309	29,63	220.614	29,44	217.007	28,71	215.537	28,27
4	Tamat SMP	158.431	18,50	143.167	18,74	142.210	18,98	142.580	18,87	143.826	18,86
5	Tamat SMA	125.268	14,63	110.186	14,43	110.926	14,80	111.828	14,80	117.016	15,35
6	Diploma	11.546	1,35	9.603	1,26	9.319	1,24	9.088	1,20	9.241	1,21
7	Sarjana S1	13.274	1,55	12.239	1,60	12.781	1,71	13.307	1,76	14.307	1,88
8	Sarjana S2	788	0,09	748	0,10	771	0,10	804	0,11	860	0,11
9	Sarjana S3	249	0,03	216	0,03	175	0,02	136	0,02	138	0,02
	TOTAL	856.446	100,00	763.765	100,00	749.447	100,00	755.744	100,00	762.452	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, 2017

Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan komposisi penduduk pada suatu wilayah. Indikator komposisi umur merupakan indikator yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan indikator ini akan diketahui kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan usia diatas 65 tahun). Selain itu juga dapat diketahui pula angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Untuk mengetahui komposisi penduduk dan angka beban tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	0 -14	18,60	18,85	19,19	19,70	19,37
2	15 - 64	67,22	67,73	67,53	66,86	70,76
3	> 65	14,18	13,42	13,28	13,44	9,86
Rasio beban ketergantungan		45,99	44,63	45,13	49,57	46,77

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017, data diolah.

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk Gunungkidul tahun tahun 2016 mencapai 46,77 %. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada 2016 Persentase penduduk usia produktif mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka ketergantungan sebesar 46,77 mengandung arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif, dengan asumsi bahwa penduduk usia produktif benar-benar produktif. Jika tidak demikian maka penduduk usia produktif akan lebih berat lagi dalam menanggung penduduk usia produktif yang tidak benar-benar produktif secara ekonomi (pengangguran).

3.4.2. Kapital

Selama kurun waktu lima tahun yang lalu pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,36%, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada pos Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,39%.

Tabel 4. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PENDAPATAN	1,076,501,995,407.09	1,242,092,675,330.20	1,372,846,295,853.34	1,599,005,995,104.47	1,654,344,836,986.89	8.97%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67,050,781,893.09	83,427,447,822.42	159,304,338,220.22	196,099,244,204.02	206,278,865,615.42	25.20%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10,728,490,356.00	12,350,676,839.00	28,477,674,863.50	36,178,235,921.92	37,544,018,290.00	28.47%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19,667,336,377.00	25,024,939,544.00	25,682,892,167.00	28,059,628,030.30	32,082,077,804.95	10.28%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	5,329,404,405.12	6,815,317,916.25	7,939,323,691.06	10,584,694,070.93	12,940,951,336.61	19.41%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31,325,550,754.97	39,236,513,523.17	97,204,447,498.66	121,276,686,180.87	123,711,818,183.86	31.61%
1.2	DANA PERIMBANGAN	799,932,048,514.00	877,414,789,454.00	923,974,088,292.00	978,310,012,465.00	1,239,624,998,868.00	9.16%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	41,403,139,514.00	38,552,493,454.00	30,413,649,292.00	18,016,718,650.00	28,240,324,144.00	-7.37%
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	2,754,962,815.00	2,390,677,489.00	
1.2.3	Dana Alokasi Umum	687,944,489,000.00	779,069,238,000.00	847,388,294,000.00	872,566,961,000.00	954,997,369,000.00	6.78%
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	70,584,420,000.00	59,793,058,000.00	46,172,145,000.00	84,971,370,000.00	253,996,628,235.00	29.19%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	209,519,165,000.00	281,250,438,053.78	289,567,869,341.12	424,596,738,435.45	208,440,972,503.47	-0.10%
1.3.1	Pendapatan Hibah	174,000,000.00	-	-	3,500,000,000.00	3,498,000,000.00	82.24%
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	36,406,595,000.00	45,667,988,953.78	60,256,969,641.12	78,539,123,335.45	84,826,454,023.47	18.43%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	159,563,905,000.00	199,359,049,100.00	198,741,257,700.00	313,479,390,100.00	105,326,318,480.00	-7.97%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	13,374,665,000.00	36,223,400,000.00	30,569,642,000.00	29,078,225,000.00	14,790,200,000.00	2.03%
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	

Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul

Dari tabel 4. dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik pada Pendapatan Asli Daerah, dengan rata-rata pertumbuhan 25%. Pertumbuhan tertinggi pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yakni sebesar 31,61%. Selanjutnya apabila di cermati dan dihitung kembali, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014/2015 mencapai 16,47% sedangkan terendah pada tahun 2013-2014 sebesar 10,53%.

Dari beberapa komponen pendapatan yang terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah adapun komponen PAD mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 90,95% yang dicapai pada tahun 2014 hal ini karena adanya transfer dana kapitasi. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, pertumbuhan tertinggi pada Dana alokasi Khusus (DAK), hal ini sebagai implikasi perubahan pola penganggaran pemerintah yang salah satunya adalah pemindahan beberapa anggaran Tugas Pembantuan menjadi DAK.

Selanjutnya apabila dicermati kembali pertumbuhan tertinggi sebesar 19,93% terjadi pada tahun 2012, dimana Dana Alokasi Umum pada tahun yang sama mengalami pertumbuhan 20,27%, pertumbuhan sebesar itu merupakan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada komponen Pendapatan Hibah mengalami peningkatan karena adanya hibah untuk penyertaan modal bagi PDAM. Selanjutnya dapat juga diketahui realisasi pertumbuhan tertinggi sebesar 46,63% yaitu pada tahun 2015, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemda lainnya yang merupakan bagian dari komponen pendapatan tersebut realisasi pertumbuhan yang paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada tahun 2013 sebesar 170,84%, namun setelah itu mengalami penurunan.

3.5. Analisis Kesiapan Infrastruktur

3.5.1. Fisik

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki fasilitas jalan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang dapat dilihat pada tabel 5. berikut.

Tabel 5. Kondisi Jalan di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2012 – 2016

No	Kondisi Jalan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jalan Baik	431,81	431,81	462,57	479,15	486,30
2	Jalan rusak ringan	48,12	46,12	119,11	114,67	117,35
3	Jalan rusak berat	206,07	208,07	104,32	92,18	82,35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2016

PT PLN Persero menjadi pemasok utama kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik untuk melayani pelanggan rumah tangga. Untuk mengetahui jumlah tenaga listrik yang diproduksi, terjual dan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2016

No.	Elemen Data	Tahun				Satuan
		2013	2014	2015	2016	
1	Produksi	190.540.150	251.377.369	254.555.687	273.627.036	kwh
2	Susut	20.270.143	23.496.574	24.998.888	25.424.157	kwh
3	Terpasang	130.331.670	204.392.484	253.098.512	269.128.129	kwh
4	Terjual	167.952.562	223.063.458	228.099.624	243.703.972	kwh
	Rumah Tangga	109.891.004	146.720.753	155.024.404	136.931.990	kwh
	Bisnis	13.283.729	21.644.983	23.837.676	21.668.783	kwh
	Industri	26.588.929	34.973.404	30.281.864	27.160.279	kwh
	Umum	12.245.052	11.681.609	10.120.543	8.582.610	kwh
	Sosial	5.943.848	8.042.707	8.835.137	8.571.127	kwh
5	Jumlah Pelanggan					
	Rumah Tangga	147.190	154.336	166.681	172.810	Pelanggan
	Bisnis	2.228	2.773	3.265	4.360	Pelanggan
	Industri	58	69	74	79	Pelanggan
	Umum	1.625	1.415	1.466	1.537	Pelanggan
	Sosial	4.769	5.074	5.557	5.941	Pelanggan

Sumber: PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Wonosari 2016

PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air dalam layanan air minum perkotaan. Selama ini produksi air minum oleh PDAM Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan beberapa sumber air baku yang berasal dari mata air, sumur bor dan terbanyak berasal dari sungai bawah tanah. Untuk mengetahui kapasitas produksi, kapasitas air yang

termanfaatkan, jumlah pelanggan dan sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Tirta Handayani dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan Dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani dan Jumlah Sambungan Rumah Sistem Pengelolaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES) Tahun 2012-2016

No	Elemen Data	Tahun					Satuan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kapasitas Produksi Air	725,5	725,5	404,43	430,93	507,98	l/dt
2	Kapasitas yang termanfaatkan	469,3	469,3	404,43	430,93	507,98	l/dt
3	Jumlah Pelanggan/Sambungan Rumah PDAM	37.250	34.890	38.081	40.878	43.495	Sambungan
4	Sumber air minum						
	Mata air	3/113	3/113	3/113	4/114	4/114	Unit (l/dt)
	Sumur Bor	14/254	14/254	14/254	15/255	15/255	Unit (l/dt)
	Sungai	-	-	-	1/40	2/40	Unit (l/dt)
	Sungai Bawah Tanah	4/2680	4/2680	4/2680	4/2680	4/2615	Unit (l/dt)

Sumber: PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2016

3.5.2. Digital

Kabupaten Gunungkidul memiliki sejumlah kesiapan dalam menghubungkan antar wilayah melalui jalur digital baik jaringan intranet/internet antar PD dan jaringan internet untuk publik yang dikelola oleh Dinas Kominfo maupun swasta (*service provider*),

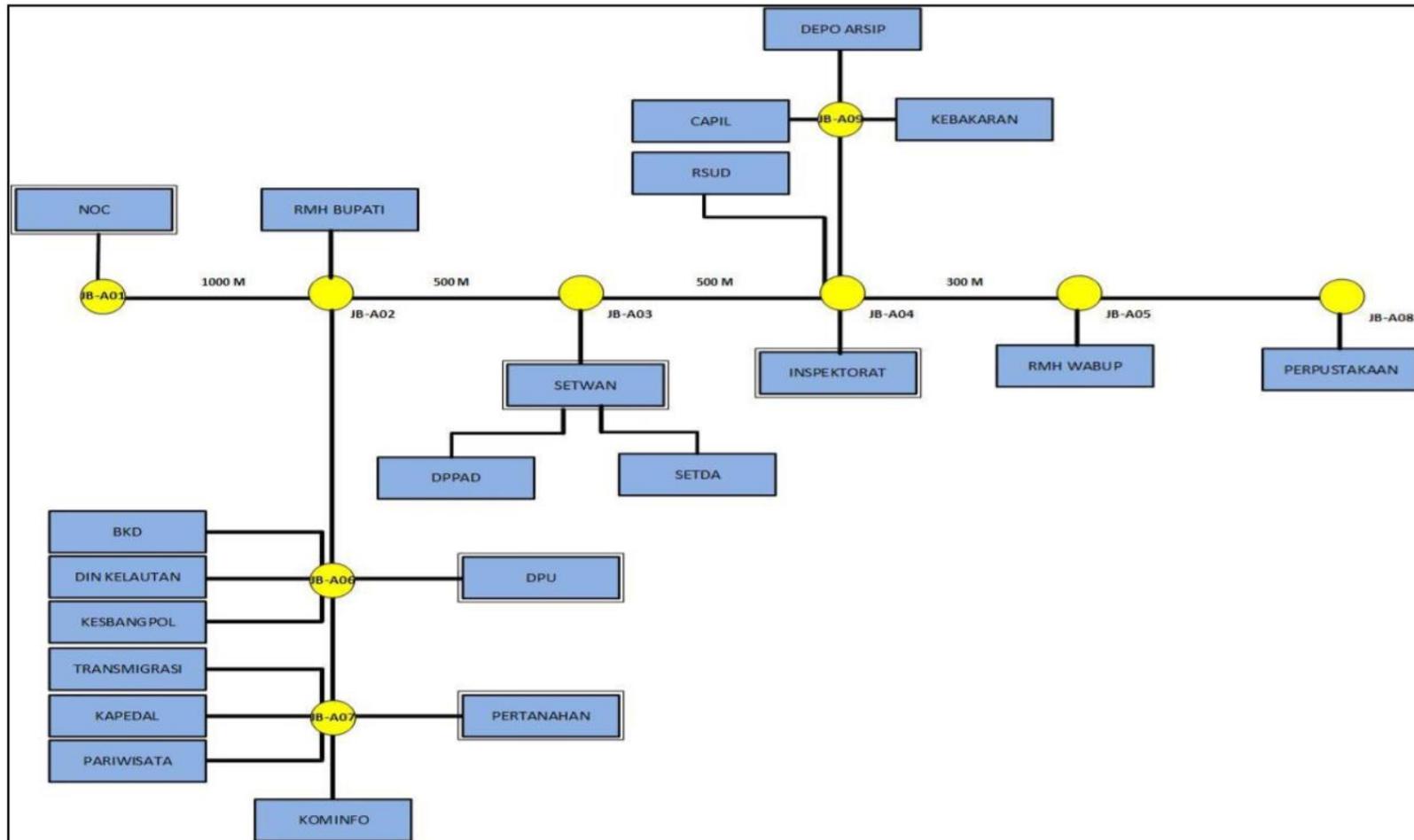
Berikut daftar ketersediaan infrastruktur TIK di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 8. Infrastruktur TIK di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

No.	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
1	2	3
1.	Ketersediaan jaringan 4G/3G	4G: 40 titik, 3G: 60 titik
2.	Ketersediaan Broadband Access	29 titik fiber optik PD, 18 titik fiber optik kecamatan, 1 titik fiber optik NOC, 5 titik fiber optik puskesmas, 1 titik fiber optik RSUD, 3 titik backbone wireless untuk backup

3.	Akses internet terpusat (didistribusikan)	35 mbps/kecamatan, bandwidth utama 120 mbps, bandwidth backup 200 mbps, 12 mbps/titik perbatasan, 10 mbps/pemantau lalu lintas
4.	Jaringan antar SKPD (instansi pemerintah)	29 PD, 18 Kecamatan, 18 BPP Pertanian, 18 UPT PLKB, 18 koordinator wilayah Dikpora, 144 Desa, 30 Puskesmas, 1 PMI, 12 Puskesmas, 1 Lab Pertanian, 1 BLK, 2 Komunitas, 1 Damkar, 2 Rumdin, 1 LPPL, 111 SMP, 1 UPT SKB, 1 Depo Arsip
5.	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk publik	609 unit tersebar di PD, Kecamatan, UPT, Desa, Komunitas
6.	Data Center Pemerintah	3 lokasi data center
7.	Data Center Recovery Pemerintah	1 unit Colocation: di fasilitasi oleh Dinas Kominfo DIY
8.	CCTV pemantau lalu lintas, keamanan lingkungan, wilayah perbatasan	15 unit CCTV pemantau lalu lintas, 824 unit CCTV keamanan lingkungan, 10 unit CCTV pemantau perbatasan
1	2	3
9.	Server hosting	16 unit di NOC Kominfo, 13 unit di Dikpora, dan 4 unit BKPPD
10.	Jaringan telekomunikasi (VOIP/VICON)	18 unit VOIP di kecamatan, 1 unit VOIP server di Kominfo, 6 video call phone di Setda, 4 unit VOIP di Dinkes, 2 unit VOIP di RSUD
11.	Teleconference	1 unit: Endpoint Video Conferencing, 1080 codec, Aver PTZ HD camera 1080, 16x Optical Zoom, units HD mic array (1 mic), P+C H.239, Snapshot Sharing, 2nd monitor, Multipoint 10 sites, Recording USB, Eng rmt.Cables set. NTSC/PAL (Maintenance Contract Required)
12.	Radio single sideband(SSB)	1 unit server, 19 unit untuk client kecamatan dimanfaatkan untuk sandi telekomunikasi
13.	Radio lembaga penyiaran publik local	1 unit, Radio Dhaksinarga 89.9 FM, http://radio.gunungkidulkab.go.id/

14.	Live streaming package	1 unit, dipergunakan untuk penyebaran informasi melalui media sosial
15.	Spectrum analiser	1 unit, digunakan untuk mapping blank spot
16.	Tim reaksi cepat jaringan komunikasi	2 tim, bertugas melakukan maintenance darurat pada seluruh lembaga yang dilayani Dinas Kominfo Kabupaten Gunungkidul



Gambar 6. Penerapan Jaringan Fiber Optic

Kemudian yang tak kalah penting selain jaringan adalah ketersediaan Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sistem informasi yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 6 kategori aplikasi, antara lain:

1. Aplikasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari:
 - Sektor Pendidikan
 - Sektor Kesehatan
 - Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Sektor Sosial
 - Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - Sektor Tenaga Kerja
 - Sektor Pertanahan
 - Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Sektor Perhubungan
 - Sektor Komunikasi dan Informatika
 - Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Sektor Lingkungan Hidup
 - Sektor Kebudayaan
 - Sektor Perpustakaan
 - Sektor Kearsipan
 - Sektor Persandian
 - Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
 - Sektor Penanaman Modal
 - Sektor Statistik
 - Sektor Pendapatan Daerah
 - Sektor Pariwisata
 - Sektor Kebencanaan
 - Sektor Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Administrasi dan Manajemen Umum
3. Administrasi legislasi
4. Manajemen Pembangunan
5. Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monitoring)
6. Manajemen Kepegawaian

Detail daftar aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat di tabel 9.

Tabel 9. Inventarisasi SIM/Aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (2018)

No	Aplikasi yang mempunyai fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan: aktif/pasif)	Open source/ tidak	Kelengkapan Dokumentasi
A	Pelayanan Publik:				
	1. Sektor Pendidikan	Unit Layanan Terpadu	Aktif	OS	ult.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Dapo/Profil Pendidikan	Aktif	OS	dapo.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Cbt (Computer Best Test)	Aktif	OS	cbt.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Sipks (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah)	Aktif	OS	sipks.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Ukg (Uji Kompetensi Guru)	Aktif	OS	ukg.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Ppdb Online (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Aktif	OS	ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Aktif	OS	spm.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Standar Nasional Pendidikan	Aktif	OS	eds.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Verval Dapodik	Aktif	OS	verval.pendidikan.gunungkidulkab.go.id

No	Aplikasi yang mempunyai fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktif an aktif/ pasif)	Open source/ tidak	Kelengkapan Dokumentasi
	2. Sektor Kesehatan	SIMPUS	Aktif	OS	Dijalankan Secara Local di Puskesmas
		Sistem Informasi Kesehatan	Aktif		simkes.gunungkidulkab.go.id
	3. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sijaka	Aktif	OS	sijaka.gunungkidulkab.go.id
	4. Sektor Sosial	E-Dabu	Aktif	Tidak	new-edabu.bpjs-kesehatan.go.id
		SiJamin	Aktif	OS	dukcapil.gunungkidulkab.go.id:6869
		Migrasi JKN	Aktif	OS	migrasi-jkn.divre6.com
		SIKS-online	Aktif	OS	siks.kemsos.go.id/
		SIKS-offline	Aktif	OS	Dijalankan di Pemerintah Desa & TKSK
		PMKS	Aktif	Tidak	pmkspsks.jogjaprovo.go.id
	5. Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat	Pemantau keamanan lingkungan (surveillance security camera)	Aktif	OS	cctv.gunungkidulkab.go.id
	6. Sektor Tenaga Kerja	Pendaftaran Kartu Pencari Kerja (Ayo Kita Kerja)	Aktif	-	ayokitakerja.kemnaker.go.id
	7. Sektor Pertanahan	Siwasru Sistem Informasi Pengaduan Tata Ruang	Aktif	OS	si.tataruang.gunungkidulkab.go.id

No	Aplikasi yang mempunyai fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan: aktif/pasif)	Open source/tidak	Kelengkapan Dokumentasi
8. Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Aktif	OS	Dijalankan melalui jaringan VPN	
	Benrollment (Rekam KEI)	Aktif	Tidak		
	Bcard management (Pencetakan Ktp EI)	Aktif	Tidak		
	Siak Konsolidasi	Aktif	OS		
	Aplikasi Pengelolaan Denda	Aktif	OS		
	Aplikasi Monitoring Bendahara Penerima	Aktif	OS		
	Aplikasi Registrasi Pelayanan	Aktif	OS		
	SVN Server	Aktif	OS		
	Pengecekan Permohonan Ktp/Integrasi Dengan Web	Aktif	OS		
	Validasi Surat Keterangan Pengganti Ktp/Integrasi Dengan Web	Aktif	OS		
	Data Warehouse Webservice	Aktif	OS		
	VpnServer & Firewall	Aktif	OS		
	Sistem Informasi Barang Aset Dukcapil (Barang Persediaan)	Aktif	OS		
	Sistem Informasi Pelayanan (SIMPEL) untuk Front Office	Aktif	OS		
	9. Sektor Perhubungan	SIM PKB	Aktif	OS	Dijalankan dalam skala jaringan lokal PD.
Aplikasi Database Angkutan Umum	Aktif	OS			

No	Aplikasi yang mempunyai fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan aktif/pasif)	Open source/tidak	Kelengkapan Dokumentasi
10.	Sektor Komunikasi dan Informatika	Cell Plan Menara	Aktif	OS	cellplan.gunungkidulkab.go.id
		Mail Server	Aktif	OS	mail.gunungkidulkab.go.id
		Dns Server	Aktif	OS	ns1.gunungkidulkab.go.id
		Portal e-Performance	Aktif	OS	
		Web Bpp + Upt Pertanian (31)	Aktif	OS	
		Web PD (29)	Aktif	OS	
		Web Kecamatan (18)	Aktif	OS	
		Web Puskesmas (30)	Aktif	OS	
		Webservice/Gsb	Aktif	OS	
		Mrtg	Aktif	OS	mrtg.gunungkidulkab.go.id
		Statistik	Aktif	OS	statis.gunungkidulkab.go.id
11.	Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIKAB Gumregah	Aktif	OS	sikab.gunungkidulkab.go.id
		Sistem Informasi Desa (SID)	Aktif	OS	desa.gunungkidulkab.go.id/perkakas/artikel/
12.	Sektor Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Lingkungan	Aktif	Tidak	Dijalankan di lokal desktop
13.	Sektor Kebudayaan	Cakrawala Budaya Dhaksinarga	Aktif		Aplikasi Mobile budaya.gunungkidulkab.go.id

No	Aplikasi yang mempunyai fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan: aktif/pasif)	Open source/ tidak	Kelengkapan Dokumentasi
	14. Sektor Perpustakaan	Software Perpustakaan	Aktif		Offline
		e-Book (e-Pusda Gk)	Aktif		play.google.com/store/apps/details?id=id.kubuku.ppdgnkidul&hl=en
		Online Public Access Catalog (OPAC)	Aktif		opac.gunungkidulkab.go.id
	15. Sektor Kearsipan	SIKS	Aktif	OS	siks.gunungkidulkab.go.id
	16. Sektor Persandian	Sipanter (Sistem Penandatanganan Elektronik)	Aktif	Tidak	Offline
		SANAGUNUNGKIDUL	Aktif	Tidak	mail.sanaGunungkidul.net
	17. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	PENDATAAN UMKM	Aktif	OS	pendataan.kukm.gunungkidulkab.go.id
	18. Sektor Penanaman Modal	OSS	Aktif		https://www.oss.go.id/
		Simpel	Aktif	OS	https://simpler.gunungkidulkab.go.id
	19. Sektor Statistik	SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	Aktif	-	sipd.kemendagri.go.id
	20. Sektor Pendapatan Daerah	E-SPTPD	Aktif	OS	sptpd.gunungkidulkab.go.id
		E-BPHTB	Aktif	OS	bphb.gunungkidulkab.go.id
		SISMIOP	Aktif	OS	OFFLINE
		Pembayaran Online (BPD, BNI, BRI Syariah, POS)	Aktif	OS	Jaringa Privat
	21. Sektor Pariwisata	Info wisata Gunungkidul	Aktif	OS	wisata.gunungkidulkab.go.id

No	Aplikasi yang mempunyai fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan: :aktif /pasif)	Open source/ tidak	Kelengkapan Dokumentasi
22. Sektor Kebencanaan		SIBAT (Sistwmi Informasi Kebencanaan)	Aktif	-	www.sibatugm.org
		InaRISK	-	-	inarisk.bnpb.go.id
		InAWARE	-	-	inaware.bnpb.go.id/inaware/
		DIBI	-	-	bnpb.cloud/dibi
		EWS Gempa Bumi	-	-	Dikelola Oleh BMKG
		EWS Tanah Longsor	-	-	
		EWS Tsunami	-	-	
23. Sektor Perlindungan Perempuan dan Anak		Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Aktif	-	evaluasikla.id

No	Aplikasi yang mempunyai fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan: aktif/pasif)	Open source/tidak	Kelengkapan Dokumentasi
A	Administrasi dan Manajemen Umum	Simda	Aktif	OS	gunungkidul.simda.net
		e-Office	Belum Aktif	OS	e-office.gunungkidulkab.go.id
B	Administrasi legislasi	Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Aktif		jdih.gunungkidulkab.go.id
C	Manajemen Pembangunan	SIPP	Aktif	OS	sipp.gunungkidulkab.go.id
D	Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monitoring)	E-Planning	Aktif	OS	plan.gunungkidulkab.go.id
		Penganggaran & Pengelolaan Keuangan	Aktif	Propertary	sipkd.gunungkidulkab.go.id
		Pengadaan	Aktif	OS	lpse.gunungkidulkab.go.id
		Monev Tim Pengendali Dan Realisasi Anggaran	Aktif	-	monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D65&taahun=2018
E	Manajemen Kepegawaian	Pengukuran Kinerja Pegawai	Aktif	OS	kinerja.gunungkidulkab.go.id
		Pengelolaan Data Pegawai	Aktif	OS	simpeg.gunungkidulkab.go.id
		Mobile Presensi		OS	mpresensi.gunungkidulkab.go.id
		Pelaporan Hasil Perkerjaan Pegawai	Aktif	OS	bukukerja.gunungkidulkab.go.id
		Pengelolaan Tambahan Tunjangan Penghasilan	Aktif	OS	tpp.gunungkidulkab.go.id

3.5.3. Sosial

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pemerintahan, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 8.890 orang pada akhir tahun 2017. Jika dilihat dari pangkat dan golongan ruang pegawai terdiri dari golongan I sebanyak 135 orang, golongan II sebanyak 1.494 orang, golongan III sebanyak 4.117 orang, dan golongan IV sebanyak 3.144 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 4.813 orang (54,13%) dan perempuan sebanyak 4.077 orang (45,86%).

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan D-IV dan S-1 sebanyak 4.899 orang (55,10%), kemudian SLTA sebanyak 1.648 (18,53%) orang. Selain itu PNS dengan pendidikan, DI/D-II/D-III dan Sarjana Muda sebanyak 1.291 orang (10,18%), serta Pasca Sarjana sebanyak 563 orang (6,33%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki keragaman sumber daya manusia yang memadai. Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Adapun komposisi PNS sesuai jenjang pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	0	0	0
2	S2	367	178	545
	Dokter Spesialis	9	9	18
3	S1/A IV	1595	2141	3736
	S1	716	354	1070
	Apoteker	2	1	3
	Dokter Hewan	4	5	9
	Dokter, Dokter Gigi	36	65	101
4	D IV	52	41	93
5	D III/A III	39	17	56
	D III	221	504	725
	SM	9	5	14
6	D II/A II	249	186	435
	D II	13	7	20
7	D I/A I	19	2	21
	D I	7	13	20
8	SLTA/SMK	1138	510	1648
9	SLTP/SMP Kejuruan	243	30	273
10	SD	94	9	103
	Jumlah	4.813	4.077	8.890

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kab. Gunungkidul, 2017

3.6. Analisis Kesiapan Suprastruktur (Kebijakan dan Kelembagaan)

3.6.1. Regulasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki serangkaian kebijakan yang mendukung terlaksananya Smart City di Kabupaten Gunungkidul. Berikut daftar kebijakan yang terkait dukungan terhadap Smart City dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Daftar Kebijakan Pendukung Smart City

No.	Nomor referensi kebijakan	Tentang/ruang lingkup	Sudah diterapkan/Belum	Jenis kebijakan
1.	4 tahun 2018	Penyelenggaraan kearsipan	Sudah	Peraturan daerah
2.	5 tahun 2018	Jenis, wewenang dan tanggung jawab pelayanan perijinan dan non perijinan	Sudah	Peraturan daerah
3.	11 Tahun 2019	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah	Peraturan Daerah
4.	12 tahun 2017	Dewan riset daerah	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
5.	16 tahun 2017	Pola hubungan kerja antara perangkat daerah dan antara kecamatan dengan pemerintah desa	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
6.	24 tahun 2017	Peraturan bersama (BuGunungkidul Pacitan, Wonogiri, Gunungkidul) pembentukan pengelola Gunung Sewu Global Geopark	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
7.	45 tahun 2017	Perubahan atas Peraturan BuGunungkidul nomor 12 tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
8.	48 tahun 2017	Petunjuk pelaksanaan sensus barang daerah	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
9.	58 tahun 2017	Mobile presensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
10.	73 tahun 2017	Pelaksanaan monitoring data peredaran usaha wajib pajak secara elektronik	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
11.	16 tahun 2018	Budaya pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
12.	17 tahun 2018	PPDB jenjang TK, SD, SMP tahun pelajaran 2018-2019	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
13.	18 tahun 2018	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP elektronik	sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
14.	19 tahun 2018	Rencana induk pengembangan TIK	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul

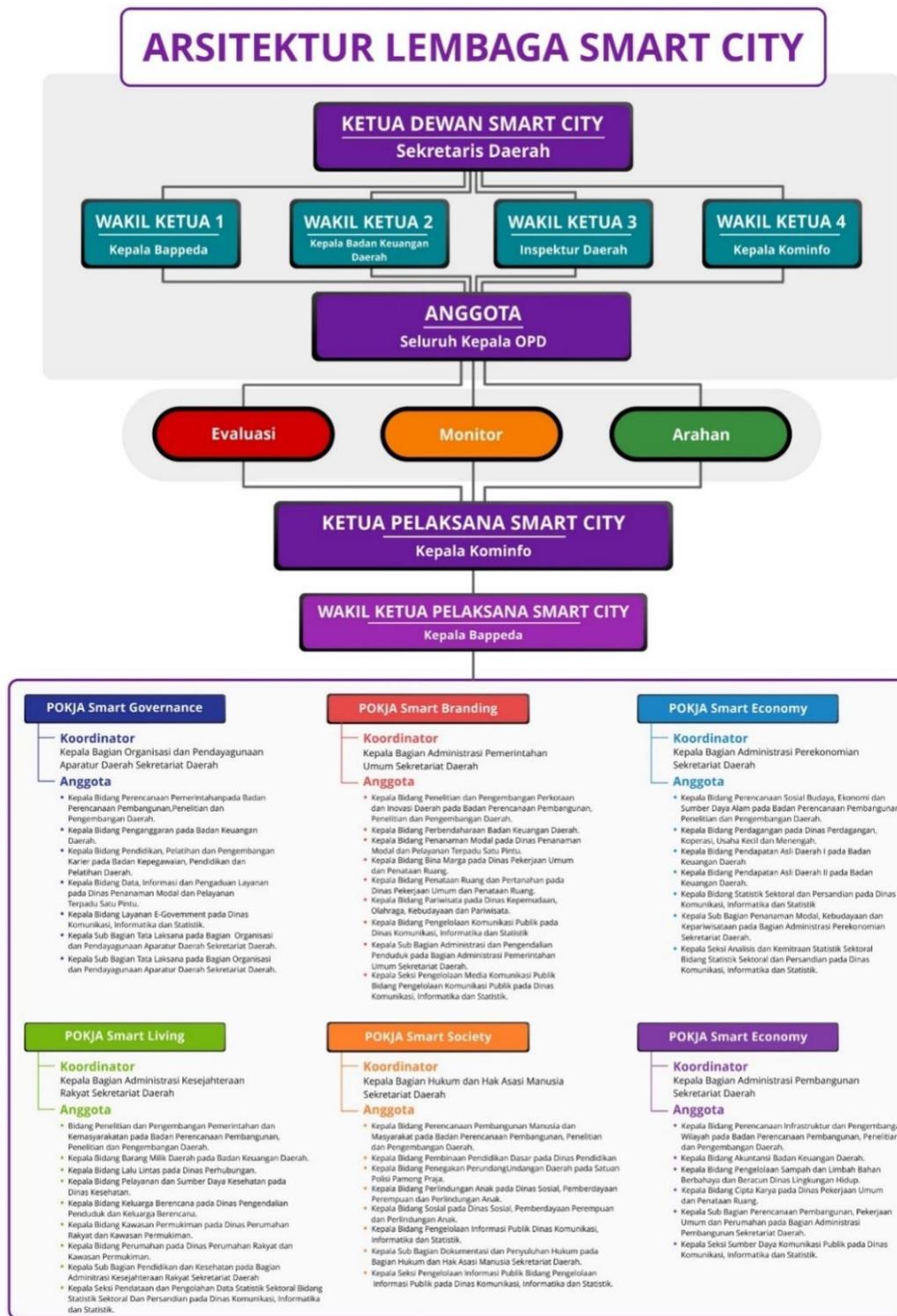
No.	Nomor referensi kebijakan	Tentang/ruang lingkup	Sudah diterapkan/Belum	Jenis kebijakan
15.	21 tahun 2018	Pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
16.	31 tahun 2018	Pembinaan pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
17.	32 tahun 2018	Sistem informasi desa sarana mewujudkan desa aktif dan sejahtera dan sistem informasi kabupaten guna mewujudkan masyarakat gunungkidul sejahtera	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
18.	37 tahun 2018	Pembentukan badan promosi pariwisata gunungkidul	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
19.	40 tahun 2018	Rencana aksi daerah gerakan masyarakat hidup sehat Kabupaten Gunungkidul 2018-2020	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
20.	45 tahun 2018	Pojok baca di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
21.	51 tahun 2018	Kebijakan dan startegi Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
22.	53 tahun 2018	Startegi promosi seni dan budaya melalui aplikasi legal wisdom	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
23.	74 tahun 2018	Rencana pengembangan kawasan perdesaan argopolitan, wisata alam minat khusus, dan wisata pantai	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
24.	86 tahun 2018	Pengembangan produk unggulan daerah	Sudah	Peraturan Bupati Gunungkidul
25.	29/KPTS/2017	Pembentukan komunitas inetelejen daerah Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
26.	79/KPTS/2017	Pendelegasian pemberian sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
27.	123/KPTS/2017	Penetapan unit kerja percontohan bebas korupsi	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
28.	202/KPTS/2017	Forum kabupaten sehat	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
29.	204/KPTS/2017	Penunjukan agen perubahan di lingkungan pemerintah	Sudah	Keputusan Bupati

No.	Nomor referensi kebijakan	Tentang/ruang lingkup daerah	Sudah diterapkan/Belum	Jenis kebijakan
		daerah		Gunungkidul
30.	229/KPTS/2017	Pembentukan forum tanggung jawab sosial perusahaan	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
31.	35/KPTS/2018	Satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
32.	70/KPTS/2018	Penunjukan operator informasi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
33.	78/KPTS/2018	Penunjukan pengangkatan anggota tugas kedaruratan bencana	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
34.	89/KPTS/2018	Penetapan nama domain pada website pemerintah kabupaten gunungkidul, subdomain perangkat daerah, kecamatan, desa, dan sekolah pada pemerintah daerah	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
35.	107/KPTS/2018	SOP administrasi pemerintahan penyelenggaraan mobile presensi	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
36.	810/0843	Pengadaan perangkat TIK PD se Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Surat Edaran Sekda
37.	555/2978	Integrasi infrastruktur TIK dan integrasi aplikasi Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Surat Edaran Sekda
38.	555/3777	Integrasi infrastruktur CCTV kabupaten gunungkidul	Sudah	Surat Edaran Sekda
39.	120/KPTS/TIM/2018	Pembentukan tim pengarah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
40.	119/KPTS/TIM/2018	Pembentukan tim evaluator internal pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sudah	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
41.	025/KPTS/2018	Pembentukan tim penyusun aplikasi portal layanan integratif Kabupaten Gunungkidul	sudah	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
42.	065/KPTS/2018	Pembentukan kelompok budaya pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul

No.	Nomor referensi kebijakan	Tentang/ruang lingkup	Sudah diterapkan/Belum	Jenis kebijakan
43.	026/KPTS/2018	Pembentukan tim monitoring dan evaluasi menara telekomunikasi di Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
44.	050/KPTS/TIM.reg.tik/2018	pembentukan tim penyusun raperda TIK	sudah	keputusan kepala dinas komunikasi dan informatika
45.	051/KPTS/TIM.e-gov/2018	Pembentukan tim forum e-government PD se Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
46.	57/KPTS/TIM/2018	Pembentukan inovasi kabupaten	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
47.	57/KPTS/TIM/2018	Pembentukan tim pengamanan data dan informasi	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
48.	058/KPTS/TIM/2018	Pembentukan tim teknis pendampingan pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
49.	091/KPTS/TIM/2018	Pembentukan tim teknis penilaian risiko teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
50.	257/KPTS/2018	Penetapan akun surat elektronik di Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
51.	555/4606	Pengelolaan hak akses sistem elektronik dan infrastruktur jaringan	Sudah	Surat Edaran Sekda
52.	120/2018	Pembentukan tim pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
53.	119/KPTS/TIM/2018	Pembentukan tim evaluator internal pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul

3.6.2. Kelembagaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul akan sangat optimal jika memiliki lembaga yang mengelola *Smart City*. Pengelola *Smart City* terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana *Smart City*. Kelembagaan Pengelola *Smart City* di Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan pada gambar 7.



Gambar 7. Kelembagaan Tata Kelola *Smart City*

BAB IV ANALISIS GAP DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Analisis Gap secara umum dapat diartikan sebagai mengidentifikasi kesenjangan antarkeadaan saat ini (“*as is*”) dan keadaan pada masa akan datang (“*to be*” atau “*futurestate*”). Analisa kesenjangan yang digunakan terhadap potret kesiapan Kabupaten Gunungkidul menuju Smart City adalah analisis SWOT (*strength, weakness, Opportunity, & Threat*). Analisis SWOT digunakan untuk melihat secara lebih tajam dan teliti akan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada Kabupaten Gunungkidul. Secara garis besar Analisis SWOT yang dilakukan pada Kabupaten Gunungkidul yaitu sebagai berikut:

4.1. Kekuatan (*Strengths*)

1. Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata meliputi wisata pantai, geosite, perbukitan karst, gua, hutan pendidikan, wisata spiritual, dan kebudayaan serta pertanian dalam arti luas, termasuk di dalamnya perikanan tangkap/kelautan.
2. Kewenangan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan masarakat
3. Potensi industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan batu, kayu, bambu, logam dan tembaga, serta kerajinan berbasis hasil pertanian antara lain makanan olahan.
4. Masyarakat Gunungkidul mempunyai sikap dan perilaku yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif.
5. Penduduk Gunungkidul didominasi kelompok usia produktif.
6. Penerapan sistem Layanan BPJS dan BLUD Kesehatan
7. Raperda TIK dan Dokumen Rencana Induk TIK berikut peraturan yang sah lainnya
8. RPJMD, RENSTRA, RENJA, Program Kerja TIK
9. Alokasi anggaran memadai
10. Kewenangan mengkoordinasikan tugas bidang TIK
11. MOU dan Kemitraan dengan swasta dan komunitas
12. MOU Keamanan Informasi dengan BSSN
13. Digitalisasi proses kinerja pemerintah

4.2. Kelemahan (*Weakness*)

1. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal.
2. Daya saing dan kualitas layanan pendidikan belum optimal
3. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah

4. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi
5. Kondisi geografis yang rentan terhadap ancaman rawan bencana gempa, tanah longsor, dan kekeringan.
6. Sarana dan prasarana perekonomian daerah serta sarana dan prasarana penunjang pembangunan yang masih terbatas dan belum sesuai kebutuhan.
7. Kurangnya penguasaan teknologi sehingga pasar tenaga kerja lebih banyak hanya pada sektor informal (unskilled labour).
8. Pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal.
9. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup belum optimal.
10. Infrastruktur publik belum memadai dan belum merata
11. Pelestarian Budaya masih rendah
12. Masih adanya kerawanan pangan
13. Kurangnya kualitas dan komposisi SDM Bidang TIK
14. Kerja sama lintas sektor kurang memadai
15. Belum memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur
16. Keterbatasan sarana dan prasarana TIK

4.3. Peluang (Opportunity)

1. Terbukanya akses pasar internasional dan perdagangan bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kedudukan Kabupaten Gunungkidul yang semakin prospektif dalam lingkup regional.
2. Meningkatnya peluang kerjasama pembangunan antar daerah dan lembaga ilmiah nasional maupun luar negeri, seperti jaringan dan kerjasama dalam pengembangan Geopark.
3. Dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang akan meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Gunungkidul.
4. Adanya persepsi bahwa Gunungkidul sebagai alternatif destinasi wisata baru yang menarik untuk dikunjungi
5. Terbukanya peluang usaha di berbagai sektor
6. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul
7. Situasi ketertiban, keamanan daerah yang kondusif
8. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi dan informasi
9. Pertumbuhan rekayasa perangkat lunak yang pesat
10. Tersedianya ruang dan kesempatan pendidikan/diklat TIK yang semakin bervariasi

4.4. Ancaman/ Tantangan(*Threat*)

1. Persaingan antar daerah yang semakin meningkat.
2. Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.
3. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan perkembangan pariwisata yang potensial mengakibatkan persaingan bebas, perubahan budaya masyarakat, penyakit masyarakat, gesekan/konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang (trafficking).
4. Fluktuasi harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang tinggi mengikuti mekanisme pasar.
5. Perkembangan dinamika teknologi dan informasi semakin luas, bebas, cepat, dan terbuka
6. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul
7. Koordinasi lintas sektor lemah dan pemahaman pembangunan TIK yang belum sinkron

Berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka dilakukan analisis terhadap strategi-strategi yang diputuskan kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan *Smart City*.

4.5. Strategi Strength – Opportunity (SO)

Berdasarkan daftar kekuatan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunungkidul, maka dapat dilakukan strategi yang akan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas masyarakat;
2. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda dan Prestasi di bidang Olahraga;
3. Peningkatan produktivitas industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah;
4. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, dan meningkatkan fasilitas destinasi pariwisata;
5. Optimalisasi anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Melaksanakan amanat peraturan dan seluruh mekanisme administrasi dan keuangan untuk mendorong, mengawasi, mengendalikan pesatnya pertumbuhan multimedia.

4.6. Strategi Weakness – Opportunity (WO)

Berikut strategi untuk mengurangi kelemahan dengan menggunakan peluang yang ada:

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
3. Peningkatan kapasitas pencari kerja dan kesempatan kerja
4. Peningkatan aksesibilitas, ketersediaan dan pemerataan infrastruktur publik untuk mengatasi disparitas antar wilayah.
5. Memberikan kepastian investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif
6. Optimalisasi pendapatan daerah, Meningkatkan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan kinerja BUMD.
7. Mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan CSR dan fasilitas lainnya yang sah, memacu masuknya investasi TIK dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada
8. Meningkatkan kapasitas SDM TIK dengan tersedianya peluang diklat dan pendidikan singkat TIK

4.7. Strategi Strength – Threat (ST)

Berikut strategi yang dapat dilakukan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman:

1. Peningkatan Upaya-upaya penegakan Perda dan Optimalisasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat
2. Penguatan Promotif dan Preventif menuju "Gerakan Masyarakat Sehat"serta Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
3. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan Gender dalam perumusan kebijakan
4. Merealisasikan pelibatan pihak ketiga/investor untuk membangun infrastruktur, suprastruktur, aplikasi dalam rangka mengatasi luasnya cakupan wilayah
5. Mengoptimalkan program kerja untuk menyelenggarakan koordinasi, agar lintas sektor dapat berpartisipasi lebih aktif dan dalam visi misi yang sama

4.8. Strategi Weakness – Threat (WT)

Berikut strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelemahan dan ancaman:

1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
2. Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel

3. Melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan dan keragaman budaya
4. Menurunkan kerawanan pangan, meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan
5. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan
6. Peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan dalam menghadapi bencana
7. Menyusun, melengkapi, dan memperbaiki SOP untuk mengatasi peraturan yang dinamis dan cenderung berubah-ubah
8. Meningkatkan sistem keamanan informasi dan transaksi data elektronik untuk mencegah terjadinya peretasan dan ancaman yang berpotensi merugikan sistem digital yang telah dibangun.

Tabel 12. Kekuatan – Kelemahan – Peluang – Tantangan Smart City Kabupaten Gunungkidul

Faktor Internal (Strength and Weakness)	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata meliputi wisata pantai, geosite, perbukitan karst, gua, hutan pendidikan, wisata spiritual, dan kebudayaan serta pertanian dalam arti luas, termasuk di dalamnya perikanan tangkap/kelautan. 2. Kewenangan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat 3. Potensi industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan batu, kayu, bambu, logam dan tembaga, serta kerajinan berbasis hasil pertanian antara lain makanan olahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal. 2. Daya saing dan kualitas layanan pendidikan belum optimal 3. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah 4. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi 5. Kondisi geografis yang rentan terhadap ancaman rawan bencana gempa, tanah longsor, dan kekeringan. 6. Sarana dan prasarana perekonomian daerah serta sarana dan prasarana penunjang pembangunan yang masih terbatas dan belum sesuai kebutuhan. 7. Kurangnya penguasaan teknologi sehingga pasar tenaga kerja lebih banyak hanya pada sektor informal (unskilled labour).

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Masyarakat Gunungkidul mempunyai sikap dan perilaku yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif. 5. Penduduk Gunungkidul didominasi kelompok usia produktif. 6. Penerapan sistem Layanan BPJS dan BLUD Kesehatan 7. Raperda TIK dan Dokumen Rencana Induk TIK berikut peraturan yang sah lainnya 8. RPJMD, RENSTRA, RENJA, Program Kerja TIK 9. Alokasi anggaran memadai 10. Kewenangan mengkoordinasikan tugas bidang TIK 11. MOU dan Kemitraan dengan swasta dan komunitas 12. MOU Keamanan Informasi dengan BSSN 13. Digitalisasi proses kinerja pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. 9. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup belum optimal. 10. Infrastruktur publik belum memadai dan belum merata 11. Pelestarian Budaya masih rendah 12. Masih adanya kerawanan pangan 13. Kurangnya kualitas dan komposisi SDM Bidang TIK 14. Kerja sama lintas sektor kurang memadai 15. Belum memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur 16. Keterbatasan sarana dan prasarana TIK
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faktor Eksternal (Opportunity and Threats)		
<p>PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya akses pasar internasional dan perdagangan bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kedudukan Kabupaten Gunungkidul yang semakin prospektif dalam lingkup regional. 2. Meningkatnya peluang kerjasama pembangunan antar daerah dan lembaga ilmiah nasional maupun luar negeri, seperti jaringan dan kerjasama dalam pengembangan Geopark. 3. Dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang akan meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Gunungkidul. 4. Adanya persepsi bahwa Gunungkidul sebagai alternatif destinasi wisata baru yang menarik untuk dikunjungi 	<p>Strategi (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas masyarakat 2. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda dan Prestasi di bidang Olahraga 3. Peningkatan produktivitas industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah. 4. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, dan meningkatkan fasilitas destinasi pariwisata 5. Optimalisasi anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi 	<p>Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin 2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan 3. Peningkatan kapasitas pencari kerja dan kesempatan kerja 4. Peningkatan aksesibilitas, ketersediaan dan pemerataan infrastruktur publik untuk mengatasi disparitas antar wilayah. 5. Memberikan kepastian investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif 6. Optimalisasi pendapatan daerah, Meningkatkan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan kinerja BUMD.

<ol style="list-style-type: none"> 5. Terbukanya peluang usaha di berbagai sektor 6. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul 7. Situasi ketertiban, keamanan daerah yang kondusif 8. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi dan informasi 9. Pertumbuhan rekayasa perangkat lunak yang pesat 10. Tersedianya ruang dan kesempatan pendidikan/diklat TIK yang semakin bervariasi 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Melaksanakan amanat peraturan dan seluruh mekanisme administrasi dan keuangan untuk mendorong, mengawasi, mengendalikan pesatnya pertumbuhan multimedia 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan CSR dan fasilitas lainnya yang sah, memacu masuknya investasi TIK dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada 8. Meningkatkan kapasitas SDM TIK dengan tersedianya peluang diklat dan pendidikan singkat TIK
<p>ANCAMAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan antar daerah yang semakin meningkat. 2. Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. 3. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan perkembangan pariwisata yang potensial mengakibatkan persaingan bebas, perubahan budaya masyarakat, penyakit masyarakat, 	<p>Strategi (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Upaya-upaya penegakan Perda dan Optimalisasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat 2. Penguatan Promotif dan Preventif menuju "Gerakan Masyarakat Sehat"serta Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. 	<p>Strategi (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan 2. Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel 3. Melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan dan keragaman budaya

<p>gesekan/konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang (trafficking).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Fluktuasi harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang tinggi mengikuti mekanisme pasar. 5. Perkembangan dinamika teknologi dan informasi semakin luas, bebas, cepat, dan terbuka 6. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 7. Koordinasi lintas sektor lemah dan pemahaman pembangunan TIK yang belum sinkron 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan Gender dalam perumusan kebijakan 4. Merealisasikan pelibatan pihak ketiga/investor untuk membangun infrastruktur, suprastruktur, aplikasi dalam rangka mengatasi luasnya cakupan wilayah 5. Mengoptimalkan program kerja untuk menyelenggarakan koordinasi, agar lintas sektor dapat berpartisipasi lebih aktif dan dalam visi misi yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menurunkan kerawanan pangan, meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan 5. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan 6. Peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan dalam menghadapi bencana 7. Menyusun, melengkapi, dan memperbaiki SOP untuk mengatasi peraturan yang dinamis dan cenderung berubah-ubah 8. Meningkatkan sistem keamanan informasi dan transaksi data elektronik untuk mencegah terjadinya peretasan dan ancaman yang berpotensi merugikan sistem digital yang telah dibangun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB V STRATEGI *SMART CITY* DALAM 6 DIMENSI

Strategi pembangunan *smart city* Gunungkidul akan menyelaraskan dengan prinsip dimensi *smart city* yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja strategi di dalamnya berusaha mewujudkan visi misi dan penyelesaian permasalahan yang terdapat di kabupaten Gunungkidul.

5.1. Smart Governance

Tujuan dari *Smart Governance* adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik dengan beberapa Strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas SDM Penyedia layanan;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang layanan publik;
 - c. Mengoptimalkan layanan publik berbasis digital.
2. Meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi dengan beberapa Strategi sebagai berikut:
 - a. Menyederhanakan prosedur birokrasi;
 - b. Pembuatan SOP bersama pada PD yang memiliki pelayanan publik yang sama;
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan;
 - d. Optimalisasi Sistem/Aplikasi Data dan informasi terintegrasi.

Tujuan dari *Smart Branding* adalah:

1. Mengembangkan daya saing komoditas unggulan berbasis potensi wilayah secara berkelanjutan dengan beberapa Strategi sebagai berikut:
 - a. Sinergisitas antara pengelolaan dan pengembangan dengan pemasaran;
 - b. Regulasi dan kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan produk unggulan;
 - c. Fasilitasi pemasaran produk-produk unggulan berbasis potensi wilayah;
 - d. Publikasi dan promosi secara *multi channel* terhadap komoditas unggulan mengacu pada potensi masing-masing;
 - e. Meningkatkan indikator akses (terhadap kegiatan publikasi dan promosi).
2. Membangun infrastruktur dan memasarkan pariwisata, melalui beberapa strategi sebagai berikut:
 - a. Penyediaan infrastruktur pariwisata yang memadai;

- b. Penyediaan jaringan transportasi penunjang pariwisata;
 - c. Pemasaran pariwisata melalui pariwisata go digital;
 - d. Penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Membangun E-Tourism Exchange untuk menjembatani antara wisatawan dan stakeholder di bidang pariwisata (hotel, transportasi, tiket, pertunjukan, kuliner).
3. Integrasi pemasaran *offline* dan *online* untuk produk-produk unggulan UKM, melalui strategi
 - a. Pemasaran produk unggulan UKM secara *online* dan *offline*
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan UKM dalam hal *marketing* dan manajemen bisnis.

5.2. Smart Economy

Tujuan dari *smart economy* adalah:

1. Penguatan komoditas unggulan sesuai dengan potensi wilayah, melalui Strategi sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi pemanfaatan market place untuk produsen dan konsumen dalam memasarkan produk;
 - b. Memfasilitasi Produsen untuk melakukan Ekspansi pasar, dalam rangka perluasan pasar untuk produk produk daerah.
2. Menyediakan ekosistem rantai pasokan (supply chain) komoditas unggulan, melalui strategi:
 - a. Menyediakan saluran distribusi;
 - b. Meningkatkan rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan *cluster industry*;
 - c. meminimalisasi biaya operasi.
3. Pemberdayaan petani dan masyarakat pelaku usaha mulai dari produksi hingga pemasaran komoditas-komoditas unggulan melalui Strategi meningkatkan pembinaan petani dan pelaku usaha.

5.3. Smart Living

Tujuan dari *Smart living* adalah:

1. Harmonisasi tata ruang wilayah berupa Pembangunan infrastruktur fisik bagi masyarakat berbasis pendekatan spasial kewilayahan, melalui strategi:
 - a. Pembangunan perumahan di kawasan pemukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan;
 - c. Pembangunan fasilitas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

2. Penyediaan informasi spasial untuk masyarakat, melalui strategi menyiapkan informasi spasial yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi informasi yang ada.
3. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik melalui strategi:
 - a. Menyiapkan jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi penting ke pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata dan lokasi strategis lainnya;
 - b. Penyediaan moda transportasi umum bagi masyarakat dipedesaan untuk mengakses lahan produktif pertanian.
4. Peningkatan penyediaan akses terhadap layanan publik bagi masyarakat melalui strategi:
 - a. Penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat;
 - b. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat;
 - c. Penyediaan fasilitas social dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat.

5.4. Smart Society

Tujuan dari *Smart Society* adalah:

1. Mewujudkan interaksi masyarakat yang efektif dan efisien (community) melalui strategi:
 - a. Menyediakan akses internet yang terhubung antar rumah tangga;
 - b. Menyediakan akses internet bagi masyarakat umum;
 - c. Menyediakan Sarana dan pendukung dan penguatan kapasitas SDM penyuluh Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan (formal dan informal), melalui strategi:
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengajar;
 - b. Penyediaan internet di tempat pendidikan;
 - c. Meningkatkan kualitas SDM bagi penjaga situs-situs budaya dan memberikan publikasi informasi tentang situs-situs budaya;
 - d. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
3. Mewujudkan sistem keamanan dan tanggap darurat masyarakat (security), melalui strategi sebagai berikut
 - a. Mengaktifkan kelompok siskamling
 - b. Pembuatan *Earli Warning System* (EWS)
 - c. Sistem Pengaduan terpadu, teranalisa dan cepat tanggap.
4. Peningkatan pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), melalui strategi sebagai berikut:
 - a. pelatihan dan peningkatan SDM PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
 - b. pelatihan dan peningkatan SDM PMKS.

5.5. Smart Environment

Tujuan dari *Smart Environment* adalah:

1. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai, melalui strategi:
 - a. mengintegrasikan semua unsur yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumberdaya yang ada baik sumber daya kehutanan, kelautan dan sumber air bersih;
 - b. optimalisasi penanganan sampah sampai ditingkat desa/kelurahan dari sumber sampah sampai ke TPA;
 - c. optimalisasi pengelolaan air limbah dalam lingkungan permukiman;
 - d. Penanganan Drainase kawasan permukiman;
 - e. Perlindungan terhadap sumber air (mata air) dan identifikasi titik sumber air baku (air tanah) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - f. Peningkatan jaringan air bersih di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - g. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur keairan (bendungan, embung, saluran irigasi teknis dan non teknis);
 - h. menyesuaikan pembangunan lingkungan berdasarkan daya dukung lahan;
 - i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan penanganan pencemaran lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD).

BAB VI RENCANA AKSI *SMART CITY*

Rencana aksi *Smart City* Kabupaten Gunungkidul merupakan tahapan untuk mendukung pelaksanaan gerakan *smart city*. Komponen dasar yang dipersiapkan adalah kebijakan dan lembaga, Infrastruktur, Aplikasi, SDM dan penguatan literasi *smart city*. Hal tersebut merupakan fondasi yang akan membuat *smart city* menjadi program yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Rencana aksi ini akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024. Rencana aksi diklasifikasikan berdasarkan 6 (enam) Kelompok Kerja *Smart city*, yaitu Smart Governance, Smart Environment, Smart Living, Smart Society, Smart Branding dan Smart Economy.



Gambar 8. Wakil Bupati Gunungkidul Menandatangani Komitmen Bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Menuju Gunungkidul *Smart City*

6.1. RENCANA AKSI SMART GOVERNANCE

Rencana pengembangan kebijakan *Smart City* kabupaten Gunungkidul, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi dan kesejahteraan pegawai dengan memanfaatkan teknologi digital.
3. Pemanfaatan e-budgeting dalam proses penganggaran kegiatan.
4. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Berkala secara elektronik (E-Audit).
5. Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Ketatalaksanaan (Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik) dengan

penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Elektronik.

6. Perumusan kebijakan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat secara Elektronik).
7. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
9. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik.
10. Penyusunan Peraturan Bupati Tanda Tangan Elektronik dan Keamanan Informasi

Tabel 13 Rencana Aksi Smart Governance

No	Rogam Kerja	Kegiatan	Kebijakan	Tahun	Infrastruktur	Tahun	Aplikasi Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Selesai Th ke	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai	Pengembangan Kompetensi Pegawai	- SK Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai ,	2021	Upgrade Server, komputer, laptop,	2021	Upgrade Aplikasi SIMPEG	2021	Sosiali-sasi perekrutan pegawai	2020-2024	Rp. 4.807.926.300	APBD	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Kominfo, BKN,BKD DIY	5	2024
			- SOP tentang Pengembangan Kompetensi pegawai	2021												
		Pengadaan Pegawai	- SK Bupati tentang Pengadaan Pegawai ,	2021	Upgrade Server, komputer, laptop,	2021	Upgrade Aplikasi Pengadaan Pegawai	2020-2024	Pengu muman Penga daan Pegawai dan sosialisasi	2020-2024			Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Kominfo,BK N,BKD DIY	2	2021
			- SOP tentang Pengadaan pegawai	2021												
Pengelolaan Data Pegawai	SOP tentang pengelolaan data pegawai	2020	komputer, laptop,	2022	Upgrade aplikasi SIMPEG	2021	Sosiali sasi pengelolaan pegawai di semua PD	2020-2024			Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Kominfo dan Semua PD	5	2024		
Diklat Teknis dan Fungsional	Revisi SOP tentang penyelenggara an diklat teknis dan fungsional	2021	komputer, laptop	2022			Pengumuman dan Sosiali sasi diklat teknis dan fungsional	2020-2024			Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	PD di Luar Gunungkidul sebagai Penyeleng gara Diklat Teknis dan Fungsional	5	2024		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	Pembinaan Disiplin Pegawai			komputer, laptop	2023	Upgrade Aplikasi Presensi Mobile (MOBSI)	2021	Sosialisasi Mobile Presensi	2021-2024	Rp. 540.427.500	APBD	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Semua PD	5	2024
		Peningkatan Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai			Genset, komputer, laptop	2021	Upgrade Aplikasi Tambahan Penghasilan /TPP	2021	Sosialisasi tunjangan penghasilan	2020-2024		APBD	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Semua PD	5	2024
		Pembinaan Fasilitas Penilaian Prestasi Kerja			komputer, laptop	2023	Upgrade Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja	2021	Sosialisasi penilaian prestasi kerja	2020-2024		APBD	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Semua PD	5	2024
3	Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD	Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan Juknis Pelaksanaan APBD	Peraturan Bupati tentang Penyusunan APBD	2020-2024	LCD, Laptop	2020-2024	Aplikasi e-budgeting	2021	Bimtek perencanaan	2020-2024	Rp. 3.321.950.000	APBD	BKAD	Semua PD	5	2024
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Berkala secara elektronik (E-Audit)	Perbup Penguatan E Audit	2020	Komputer untuk operator, Jaringan Internet	2022	Pengembangan Aplikasi E-Audit terintegrasi dengan SIPKD, E-Planning, SIRUP, APIK, SIM ASET, SIM Persediaan, SISKEUDES	2025	Diklat Pengembangan E-Audit	2025	Rp. 1.000.000.000	APBD	Inspektorat Daerah	Dinas Kominfo Bappeda, BKAD, BKPPD, Bagian PBJ / LPSE Setda, dan Bagian Adminis	2	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Ketatalaksanaan (Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik):	Penyusunan Perbup Tata Naskah Dinas Elektronik	2020	Server, jaringan internet, scanner, komputer/ laptop/ smartphone berbasis Android	2020	Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (contoh: E-Office)	2020	Sosialisasi Perbup TNDE	2019	Rp. 765.000.000	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2021		
									Bimtek Aplikasi TNDE	2020						1	2020	
										Uji coba aplikasi TNDE	2020						1	2021
										Penerapan aplikasi TNDE	2021						2	2021
										Monev implementasi TNDE	setiap tahun mulai 2021							
6	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Perumusan kebijakan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat secara Elektronik):	Penyusunan kebijakan (SE) penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik	2021	Server, jaringan internet, peralatan SKM secara Elektronik	2021	Membangun aplikasi SKM secara Elektronik	2021	Sosialisasi kebijakan dan Bimtek aplikasi SKM secara elektronik	2021	Rp. 199.985.000	APBD	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2021		
									Uji coba aplikasi SKM secara elektronik	2021						2	2021	
										Penerapan aplikasi SKM secara elektronik	2021							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Monitoring dan Evaluasi	setiap tahun mulai 2021					5 2024
									Uji coba aplikasi SKM secara elektronik	2021					2 2021
									Penerapan aplikasi SKM secara elektronik	2021					2 2021
									Monitoring dan Evaluasi						
7	Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika	Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan TIK	Perbup tentang SPBE dan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Satu Data	2020, 2021	Penyempurnaan portal Gunungkidul Smart City	2020-2024			Raperbup petunjuk pelaksanaan Perda;	2020-2024	Rp. 1.500.000.000	APBD	DISKOMINFO		5 2024
									Bimtek e-Office;						
									Bimtek jarkomdat, email, dan optimalisasi TIK untuk PD dan UPT; Bimtek website UMKM; Pengembangan SDM TIK; Forum e-gov DIY; Forum e-gov kabupaten; Forum e-gov Desa; Advertorial TIK, Pelatihan agen smart city						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	Perbup tentang SPBE dan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Satu Data	2020, 2021	Penguatan Kapasitas jaringan dan NOC Bandwidth Utama Bandwidth Back-Up Bandwidth 18 kecamatan Aktivasi FO AS Number Sewa Domain Ipcam Kecamatan dan Outdoor Server OS mini NUC Monitor Display Backbone wireless Pemeliharaan Tower Pemasangan Wireless Tiang T7 dan T9 wallmount Tool Networking Cadangan Jaringan Instalasi Ground	2020-2024	Updating aplikasi IP Cam	2020-2024	Perencanaan Datacenter dan Command Center	2020-2024	Rp 100.000.000.000	APBD	DISKOMINFO		5 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi	Perbup tentang SPBE dan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Satu Data	2020, 2021	Firewall, server	2020-2024	Portal Smart City Mapserver Dashboard Eksekutif Mapserver	2020-2024	masterplan Smart City	2020-2024	Rp. 7.000.000.000	APBD	DISKOMINFO		5	2024
8	Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyelenggaraan kehumasan			Jaringan internet, laptop, kamera	2021	Dashboard Eksekutif	2020-2024	Talkshow Media, jumpa pers	2020-2024	Rp. 2.246.780.000	APBD	DISKOMINFO	PD, Forum Wartawan, Jaringan manajemen media cetak dan elektronik	5	2024
		Penyelenggaraan peliputan, dokumentasi dan publikasi			Jaringan internet, laptop, kamera, drone, radio	2021	Medsos dan website Pemkab	2020-2024	Pertunra (Pertunjukan Rakyat), Talkshow di LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal)	2020-2024	Rp. 1.942.962.500	APBD	DISKOMINFO	Kepala Daerah, Forkopimda dan PD	5	2024
		Penyelenggaraan komunikasi publik dan diseminasi informasi	SOP tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah	2020	Jaringan internet, laptop, kamera	2021	Medsos dan website Pemkab	2020	Bimtek PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Temu Wicara Bupati	2020-2024	Rp. 1.477.962.500	APBD	DISKOMINFO	PD	5	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	Persandian dan Pengamanan Informasi	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi														
		1) Penggunaan / Pemanfaatan Sertifikat Elektronik	Perbup TTE dan Keamanan Informasi, SOP	2020	Internet, Server, Komputer	2020	Aplikasi Sertifikat Elektronik / Tanda Tangan Digital	2020	Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan	2020	Rp. 100.000.000	APBD-APBN	DISKOMINFO	Badan Siber dan Sandi Negara RI, Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Pemda DIY dan Seluruh PD di Kabupaten Gunungkidul	5	2024
							Integrasi aplikasi Kemendagri	2020	Koordinasi, Bimtek	2020		APBD	Bappeda	Semua PD, Kecamatan, Pemerintah Desa, Pengembang Aplikasi, DP3AKBPM	5	2024
		Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah	SOP tentang Pengelolaan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH	2020	Jaringan Internet Desa, Server	2020-2024	Upgrade SIDA Samekta dan SIKAB Gumregah	2020-2024	Pelatihan pemanfaatan Sida dan Sikab, Pelatihan input data dan jurnalisme serta keamanan data.	2020-2024	Rp. 500.000.000	APBD Kab, APBD desa, NGO	Bappeda, Pemerintah Desa	Semua PD, Kecamatan, Pemerintah Desa, NGO, Volunteer, Dinas Kesehatan, DP3AKBPM	5	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2) IT Assesment	Perbup TTE dan Keamanan Informasi, SOP	2020	Internet, Server, Komputer	2020	Aplikasi dan Sistem Elektronik Pelayanan Publik	2020	Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan	2020	Rp.150.000.000	APBD - APBN		Badan Siber dan Sandi Negara RI, Pemda DIY dan Seluruh PD di Kab.Gunungkidul	5	2024
		3) Security Operation Centre (SOC)	, Perbup dan SOP Security Operation Centre	2020	Internet, Server, Komputer, NOC, Command Center, Data Center	2020	Aplikasi Pengamanan Data dan Informasi/Firewall/anti virus/honeynet	2020	Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi	2020		APBD		Badan Siber dan Sandi Negara RI, Kementerian Kominfo, Kemendagri, Pemda DIY dan Seluruh PD di Kab. Gunungkidul	5	2024
		4) Government Computer Insiden Respon Team (Gov-CSIRT)	Perbup, SK Tim dan SOP Gov CSIRT	2020	Internet, Server, Komputer, NOC, Command Center, Data Center	2020	Aplikasi Pengamanan Data dan Informasi/Firewall/anti virus/honeynet	2021	Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek, Sertifikasi dan Uji Kompetensi	2022		APBD		Badan Siber dan Sandi Negara RI, Kementerian Kominfo, Kemendagri, Kementerian/Lembaga Pusat, Pemda DIY dan Seluruh PD di Kab. Gunungkidul	5	2024
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Evaluasi SOP e planning	2020			1. upgrade e-Planning (PD) 2. upgrade-Reses (DPRD) 3. upgrade e-Musrenbang (Kecamatan dan Desa) - Merupakan aplikasi yang terintegrasi	2020-2024	Koordinasi dan Bimtek kepada Perencana PD, Kecamatan, dan unsur perangkat desa	2020-2024	Rp. 524.580.000	APBD	Bappeda	Semua PD, Kecamatan, Pemerintah Desa, Pengembang Aplikasi, DP3AKBPMD	5	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	Pemanfaatan Data dan Inovasi	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	1. SE Bupati tentang Pengadaan Adminduk di Desa	2021	PC, jarkomdat	2020-2024	SIAK Desa	2021	Bimtek petugas	2020-2024	Rp. 2.100.000.000	APBD	DUKCAPIL	DP3AKBPM, Diskominfo, BAPPEDA, Kecamatan	5	2024
			2)Revisi SOP Pelayanan													
		Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	PKS dengan Stakeholders	2020-2024	PC, jarkomdat	2020-2024	aplikasi siak,	2020				Rp. 500.000.000	APBD, DAK	DUKCAPIL	144 desa, 20 toko/swalayan	5
		Pengadaan			Mesin cetak mandiri		aplikasi cetak mandiri	2021	Bimtek petugas	2021	Rp. 2.500.000.000	APBD Kab	DUKCAPIL	Bagian Layanan Pengadaan	2	2021
12	Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan							Sosialisasi peraturan perundang-undangan	2020-2024	Rp. 1.100.000.000	APBD, DAK	DUKCAPIL	Dinsos, Dinkes, PA, PN, Kemenag, Bappeda, Desa	5	2024
13	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan	Revisi Perda	2020					Sosialisasi Revisi Perda	2020-2024	Rp. 1.700.000.000	APBD, DAK	DUKCAPIL	Bagian Hukum, Biro Hukum DIY, Biro Tapem DIY	5	2024

6.2. RENCANA AKSI SMART ENVIRONMENT

Rencana pengembangan kebijakan kabupaten Gunungkidul yang mendukung Smart Environment, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan ketersediaan air minum dengan pembangunan SPAM Regional dan SPAM Pedesaan
2. Perencanaan dan pengawasan pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan
3. Revisi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 87/KPTS/2018 Tentang Penetapan Ruas - Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten-- Penyempurnaan Aplikasi Informasi Jalan Kabupaten Terpadu dan Pembuatan Peta Digital
4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Persampahan (Sistem Informasi Persampahan)
6. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (Fasilitasi Free Wifi bagi masyarakat).

Tabel 14. Rencana Aksi Smart Environment

No	Program Kerja	Kegiatan	Kebijakan	Tahun	Infrastruktur	Tahun	Aplikasi Pendukung	Tahun	Pengujian Literasi	Tahun	Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Selesai Th ke	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Strategis DIY : KPY (Penyehatan Lingkungan Permukiman)	Pengembangan SPAM Regional			SPAM Regional	2021					Rp. 40.015.000.000	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Perusahaan Daerah	DPUPRKP	Pem.Des Banyusoco, Perusahaan Daerah PDAM Gunungkidul	5	2024
					SPAM Sungai Bawah Tanah GK	2022-2023					Rp. 343.030.000.000	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Perusahaan Daerah	DPUPRKP	Perusahaan Daerah PDAM Gunungkidul	5	2024
2	Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pengembangan SPAM Pedesaan			Sistem Penyediaan Air Minum	2021-2024					Rp. 83.600.000.000	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta/ Masyarakat	DPUPRKP	BUMDES, Swasta	5	2024
		PAMSIMAS (DAK)			Sistem Penyediaan Air Minum	2020-2024					Rp. 1.000.000.000	APBD	DPUPRKP	Desa, swasta, Pamaskarta	5	2024
3	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Revisi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 87/KPTS/2018 (Tentang Penetapan Ruas - Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten)	2021	Alat NAASRA, Server, Komputer	2021	Penyempurnaan Aplikasi Informasi Jalan Kabupaten Terpadu dan Pembuat Peta Digital	2021	Sosialisasi, Pelatihan	2021	Rp. 500.000.000	APBN - APBD	DPUPRKP	Dinas Kominfo, Dinas Tata Ruang, BAPPEDA	5	2024
			SK Bupati tentang Kelas Jalan	2022												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Revisi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 87/KPTS/2018 tentang Penetapan Ruas - Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten)	2021	Escava tor, tandem roller, vibro roller, stamper, trailer	2021-2024			Bimtek operator alat berat, sosialisasi pra konstruksi	2021-2024	Rp. 10.000.000.000	APBD, CSR	DPUPRKP	Swasta. Masyarakat	5	2024
			SK Bupati tentang Kelas Jalan	2022												
4	Pengelolaan Persampahan	Penyelenggaraan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan	SOP Pengelolaan Persampahan	2021	TPA, TPS3R, Dump Truck, Amrol, Kendaraan Roda 3	2020-2025	Sistem Informasi Persampahan	2021	Pelatihan dan Pembentukan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri	2023	Rp. 40.500.000.000	APBD/ DAK/ DANAIS	DLH dan Bagian Hukum	DINAS PENDIDIKAN, Kemenkumham DIY, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN dan JPSM	5	2025
			Perda tentang Revisi Tarif Kebersihan/Sampah	2020												
			Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2020												
5	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau			RTH dan Taman dengan fasilitas free wifi	2020-2024					Rp. 1.200.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo dan Pemerintah Kecamatan	5	2024

6.3. RENCANA AKSI SMART LIVING

Rencana pengembangan kebijakan kabupaten Gunungkidul yang mendukung Smart Living, antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur pengendalian pertanahan dengan pemanfaatan Aplikasi Map Server.
2. Revisi Surat Keputusan Bupati tentang Bedah Rumah. Sinkronisasi dengan Sistem Informasi Perumahan
3. Penyusunan Peraturan Bupati dan RAD Pecepatan Penurunan Stunting
4. RAD Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi baru lahir/Neonatal (AKI-AKN)-- Integrasi aplikasi simundu_kartini; WA grup Gawat Darurat (GADAR) GK; website duniaremaja
5. Penyusunan Peraturan Bupati tentang RAD 5 Program Utama untuk mendukung aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS), SITT (Sistem Informasi Tuberculosis Terpadu), SIPK (Sistem Informasi Penyakit Kusta).
6. Revisi keputusan Bupati tentang pembentukan kampung KB (dibutuhkan revisi tiap tahun karena ada penambahan jumlah kampung KB)
7. Pembuatan juknis bantuan sosial yang direncanakan dan SOP standar pelayanan
8. Pembuatan peraturan bupati terkait SLRT dan surat edaran terkait SLRT
9. Pembuatan MOU dengan Bapeljamkes, Dukcapil, dinas kesehatan, Puskesmas, Dinas pendidikan, kecamatan dan desa
10. Penyusunan Standar Operasional Prosedur, standar pelayanan, Perbup tentang Penanganan Penyandang Disabilitas
11. Revisi Standar Operasional Prosedur dan Penambahan SOP trantibum, SOP penanganan barang sitaan dan hasil operasi
12. Penyusunan Standar Operasional Prosedur akses perbaikan dan persediaan obat dan SOP pelaksanaan security data base pasien di RSUD Wonosari

Tabel 15 Rencana Aksi Smart Living

No	Program Kerja	Kegiatan	Kebijakan	Tahun	Infrastruktur	Tahun	Aplikasi Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Selesai Th ke	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Pelaksanaan dan pengawasan Pertanahan dan Penataan Ruang	Pengendalian Pertanahan	SOP pengendalian pertanahan	2020	Kendaraan roda 4	2022	Geoportal	2020	Sosialisasi status tanah	2020-2024	Rp. 209.041.000	APBD	DPTR	Dinas Kominfo, Bappeda	1	2020
		Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi pertanahan dan Tata Ruang	SOP pengolahan informasi pertanahan	2020	Laptop, komputer	2021	Geoportal	2020	Bimtek pengolah data	2021	Rp. 209.041.000	APBD	DPTR	Dinas Kominfo, Bappeda	1	2020
2	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya	Revisi SK Bupati tentang Bedah Rumah	2021					Sosialisasi	2021-2024	Rp. 10.000.000.000	APBD	DPUPRKP	Swasta, masyarakat	5	2024
		Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal	SK Bupati tentang Perumahan Formal	2021	PSU	2020-2024	Aplikasi Sistem Informasi Perumahan	2022	Sosialisasi regulasi ke para Pengembang	2021-2024	Rp. 5.000.000.000	APBD	DPUPRKP	Kontrak tor	5	2024
		Penanganan Kawasan Kumuh	Revisi SK Bupati tentang Kawasan kumuh	2021	PSU	2020-2024			Sosialisasi kepada masyarakat	2021-2024		APBD	DPUPRKP	Kontraktor	5	2024
3	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Pengadaan laptop utk entry data	2021	Sistim Informasi Desa	2020-2023	Pelatihan PendataanPHBS Kader Kesehatan	2021	Rp. 175.200.000	DAU	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo	3	2022
					Cetak Pesan germas (Leaflet, Stiker, banner)		Sistim Informasi kabupaten	2020-2023		2021		DAU				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Pesan media luar ruangan tentang Germas							DAU				
					Media cetak (majalah dan Surat kabar)							DAU				
					Umbul2 Germas							DAU				
4	Perbaikan Gizi Masyarakat	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi & Perbaikan Masalah Gizi	Penyusunan Perbup dan RAD Pecepatan Penurunan Stunting	2020	Deklarasi pencegahan stunting; gerakan menanam dan pengelolaan daun kelor; pemenuhan antropometri kit	2020	Aplikasi e-PPGBM,	sejak 2018 (integrasi SDIDTK mulai 2019)	Satgas Penanggulangan Stunting; Pelatihan Pemberian Makan bayi dan Anak (PMBA); Sosialisasi Pedoman Gizi Seimbang; Kampanye 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); Kampanye ASI Eksklusif; Bimtek Pemberdayaan Masyarakat	2020	Rp. 1.843.149.400	DAK Fisik; DAK Nonfisik; APBN; APBD I; DAU	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DP3AKBPM D, Bappeda Disdikpora	3	2022
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Layanan Medis dan Kegawatdaruratan	Perbup sistem Rujukan	2020	Mobil Ambulance GES	2021			Tim GES: Diklat BTLS, PPGD. Petugas UGD Puskesmas: Diklat PPGD, ATLS, ACLS. Tim	2020 - 2023	Rp. 328.075.000	APBD; DAK	Dinas Kesehatan		3	2022
			Perbup Telemedicine	2021	Penguatan Jaringan Internet di Puskesmas	2021	Aplikasi Telemedicine antara Puskesmas dengan Rumah sakit rujukan	2021	Telemedicine: Workshop telemedicine	2021		APBD; DAK	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo	5	2024
		Pelayanan Kesehatan Perorangan	1. Perbup tentang penetapan jenis layanan Puskesmas (review) 2. Perbup Pelayanan Kesehatan bagi penyandang Disabilitas	2021	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Kesehatan (Desain bangunan aksesible disabilitas)	2019 - 2023	aplikasi yang memberikan titik koordinat penyandang disabilitas yang sedang mengalami kegawatdaruratan medis yang terkoneksi ke Faskes	2022	Pelatihan yankes disabilitas bagi tenaga Puskesmas	2020-2023	Rp. 14.601.655.851	APBD; DAK; Pajak Rokok	Dinas Kesehatan	Dinas KominfoDinas Sosial	5	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	Kesehatan Keluarga	Pelayanan Kesehatan Ibu, Remaja, dan Usia Lanjut	RAD Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi baru lahir/Neonatal (AKI-AKN)	2020	Pengembangan Puskesmas PONEB Pengembangan pelayanan persalinan di Puskesmas; Pengembangan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR); Pengembangan Puskesmas Santun Lansia; Penguatan ANC terpadu; Pengembangan Posyandu Remaja Pengembangan Posyandu Lansia terintegrasi Posbindu	2019-2024	Website Kesga DIY; integrasi aplikasi simundu_kartini; WA grup Gawat Darurat (GADAR) GK; website duniarema ja	sejak 2016	Peningkatan kapasitas petugas ANC terpadu, Pelayanan gawat darurat maternal neonatal; tim Audit Maternal Neonatal; tim grup GADAR GK; Pelatihan Konselor Sebaya; Pelatihan Kader Posyandu Lansia; Pemilihan Duta Remaja Sehat	2020	Rp 4.379.352.500	DAK NonFisik, APBN, APBD I, DAU	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, RSUD, Disdikpora, DP3AKB PMD	5	2024
		Layanan Kesehatan Bayi dan Anak	RAD Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi baru lahir/ Neonatal	2020	Puskesmas Ramah Anak; Puskesmas mampu tata laksana Keke rasan terhadap Perempuan dan Anak (KitPA);	2020	Website Kesga DIY; integrasi SDIDTK dalam e-PPGBM	2020	Peningkatan kapasitas petugas tatalaksana KitPA; peningkatan kapasitas petugas dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);	2020	Rp. 208.510.000	DAK NonFisik; APBN; APBD I; DAU	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, RSUD, Disdikpora, DP3AKB PMD	5	2024
									Peningkatan Kapasitas petugas dalam Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK); Review Maternal Perinatal (RMP)							
7	Pencegahan Penyakit	Pencegahan Penyakit Menular	Perbup tentang RAD 5 Program Utama	2020	1. RS PDP 2. Puskesmas PDP (11) 3. VCT KIT HIV AIDS 4. AMHP untuk HIV AIDS	2020 - 2023	SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)	2020	Pelatihan PDP; Pelatihan Koselor HIV; Praktek Pemulasaran Jenazah	2020 - 2023	Rp 1.185.278.000	GF; DAU; DAK Penugasan: APBN	Dinas Kesehatan	GF; ViCtory; Yayasan Vesta Indonesia	3	2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					1. RS DOTS 2. Puskesmas DOTS 3. AMHP TB 4. Ekstra Fooding bagi petugas	2020 - 2023	SITT (Sitem Informasi Tuberculosis Terpadu)		Pelatihan DOTS; Pelatihan PPI: OJT TB MDR bagi petugas Puskesmas		Rp. 477.040.000	DAU; APBN; GF; DAK Penugasan	Dinas Kesehatan	GF; SSR Aisyiah; PPTI; DPM	3	2022
					APD bagi penderita		SIPK (Sistem Informasi Penyakit Kusta)		Pelatihan Wasor; Pelatihan Petugas Puskesmas	2020 - 2023	Rp. 48.100.000	DAU; APBN	Dinas Kesehatan		3	2022
					1. Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik 2. Alat Fogging				Pelatihan Petugas Fogging		Rp. 754.425.000	DAU	Dinas Kesehatan	Radio Hargo Sosro	3	2022
8	Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera	Pengembangan Kelembagaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera	Revisi keputusan Bupati tentang pembentukan kampung KB (dibutuhkan revisi tiap tahun karena ada penambahan jumlah kampung KB)	2020-2014	pembentukan kampung KB, tiap desa.	2020-2024	Website kampung KB	2020-2024	pembinaan KKBPK(Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga), dan pengaktifa kampung KB	2020-2024	Rp. 23.407.185.000	DAK, APBD	DP3AK BPMD	Desa, Kecamatan, Seluruh PD, LSM, Dunia Usaha	5	2024
9	Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender	Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak							Pelatihan bagi petugas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak	2021-2024	Rp. 2.067.825.000	APBD	DP3AK BPMD	LSM, Dinas Sosial, Polsek/Polres, Fasilitas kesehatan.	5	2024
					Pembuatan ruang bermain ramah anak	2021			sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak	2020-2024		APBD	DP3AK BPMD	Desa, Kecamatan, Seluruh PD, LSM, Dunia Usaha	5	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Peraturan Bupati tentang sekolah ramah anak	2021	penerapan sekolah ramah anak	2021	Integrasi dengan google education	2021	sosialisasi sekolah ramah anak	2020-2024		APBD	DP3AK BPMD	Desa, Kecamatan, Seluruh PD, LSM, Dunia Usaha	5	2024
			Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	2023	Kabupaten Layak Anak	2023			Workshop KLA, Rakor secara frakuentif tentang KLA, pembinaan PATBM Desa, evaluasi Dekela.	2020-2024		APBD	DP3AK BPMD	Desa, Kecamatan, Seluruh PD, LSM, Dunia Usaha	5	2024
10	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS	.pembuatan juknis bantuan sosial yang direncanakan	2020											4	2023
		1. Capacity Building Petugas Pendamping KUBE FM dan USEP KM	2.pembuatan SOP dan standar pelayanan	2021	Server, scanner, komputer/ laptop/ smartphone berbasis Android	2020 s/d 2023	aplikasi Pendataan dan pembentukan komunitas	2020 s/d 2023	sosialisasi, bimtek, evaluasi dan monitoring	2020 s/d 2023	Rp 1.000.000.000	APBN, APBD	Dinsos	Kemensos, Dinsos DIY, Disperindag, DPP, Dinkes, Kecamatan, Desa, Praktisi	4	2023
		2. Pendampingan seleksi BKK/PKH Graduasi	pembuatan database yang pernah mendapat bantuan	2021											4	2023
		3. Pelatihan Keterampilan usaha kelompok KUBE FM dan USEP KM													4	2023
		4. Bimbingan Lanjut kelompok KUBE FM dan USEP KM													4	2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Kearifan sosial/keserasian sosial	juknis kesetiakawanan, kepeahlawanan	2021	server, komputer	2021 s/d 2024	leaflet, slide, film dokumenter kepeahlawanan, pembentukkan komunitas keserasian sosial dan kearifan lokal	2021 s/d 2024	workshop, sosialisasi, penyuluhan	2021 s/d 2024	Rp.1.000.000.000	APBN, APBD	Dinsos	Kemensos, Dinsos DIY, kecamatan, Desa	5	2024
11	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pembuat an peraturan bupati terkait SLRT dan surat edaran terkait SLRT	2020	Server, jaringan internet, scanner, komputer/ laptop/ smartphone berbasis Android	2020 s/d 2023	Sistem layanan rujukan terpadu (SLRT), pembentukkan puskesmas, aksn layanan bapeljam kes terkoneksi internet	2020 s/d 2023	Sosialisasi dan pelatihan	2020 s/d 2023	Rp. 150.000.000	APBN, APBD, CSR	Dinsos	Bappeda, bag. Kesra, Dukcapil, Dinkes, Dinas Pendidikan kecamatan dan desa	4	2023
			2. pembuat an MOU dengan Bapeljamkes, Dukcapil, dinas kesehatan, Puskesmas, Dinas pendidikan, kecamatan dan desa Pembuat an juknis pelayanan online dengan bapeljam kes	2021					Sosialisasi dan pelatihan, evaluasi, monitoring					Dinsos	Bag. Kesra, bag. Organisasi, Dukcapil, dinas kesehatan, Puskesmas, Dinas pendidikan, kecamatan	4
			2021	sosialisasi dan bimtek					Dinsos					Dinsos, bapeljamkes os	4	2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			3. Pembuatan SOP	2021					Sosialisasi				Dinsos	Bag. Kesra bag. Organ sasi, Dukcapil, dinas ke sehatan, Puskes mas, Dinas pendidikan, kecamatan	4	2023
			4. tanda tangan digital	2022					Sosialisasi				Dinsos	Dinas kominfo, bagian hukum	4	2023
			5. Peraturan bupati tentang bansos tdk direncanakan. Pembuatan juknis	2021					Sosialisasi, publik hearing				Dinsos	Bag. Kesra Dukcapil, dinas kesehatan, Puskes mas, Dinas pendidikan, kecamatan dan desa	4	2023
		Pembentukan sekolah siaga bencana, komunitas siaga bencana, desa siaga bencana	pembentukan sekolah siaga bencana dan kampung siaga bencana	2020 s/d 2023	Cetak Pesan sekolah siaga bencana dan desa siaga bencana(Leaflet, Stiker,banner, papan nama)	2020 s/d 2023	pembentukan komunitas	2020 s/d 2023	sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, evaluasi, mitoring	2020 s/d 2023	Rp. 100.000.000	APBD, APBN	Dinsos	Dinsos, BPBD	4	2023
			mapping peta rawan lokasi bencana yang disesuaikan dengan kampung siaga bencana dan SDM tagana	2020 s/d 2023	Server, jaringan internet, scanner, komputer/ laptop/ smartphone berbasis Android	2021	pemantapan jaringan komunitas dalam penanganan bencana, sekretariat bencana	2020	Sosialisasi, monitoring, peningkatan kapasitas	2020 s/d 2023	Rp. 20.000.000	APBD	Dinsos	Dinsos, BPBD, Bappeda	1	2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
		pelayanan jaminan kesehatan khusus terpadu	Penyusunan SOP dan standar pelayanan dalam jamkesus	2020 s/d 2023	laptop, komputer, printer, kursi roda, alat dengar dan lain-lain yang terkait	2020 s/d 2023	pembentukan komunitas	2021	pelayanan	2020 s/d 2023	Rp. 200.000.000	APBD	Dinsos, Dinkes, CSR, Kodim	PD terkait dan mitra	2	2021							
12	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengarusutamaan Disabilitas	Penyusunan SOP, standar pelayanan, Perbup tentang Penanganan Penyandang Disabilitas	2020 s/d 2023	laptop, komputer, printer, kursi roda, alat bantu disabilitas, Gedung Ramah Difable	2020 s/d 2023	aplikasi Pendataan dan pembentukan komunitas	2020 s/d 2023	Sosialisasi, bimtek, Workshop, pelayanan dan monitoring	2020 s/d 2023	Rp. 300.000.000	APBD	Dinsos	PPDI, FKDG	4	2023							
		1. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas													2020 s/d 2023	2020 s/d 2023	4	2023					
		2. Pemberdayaan Keluarga Disabilitas																	APBD	Dinsos	BLK	4	2023
		3. Pelatihan Servis Kursi Roda bagi Penyandang Disabilitas																	APBD	Dinsos	PPDI, FKDG, OHANA	4	2023
4. Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	APBD	Dinsos	DP3AK BPMD dan Dinas Dikpora	4	2023																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		5. Peningkatan Kapasitas Keluarga bagi Keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum		2021 s/d 2024		2021	Aplikasi Management Kasus	2021 s/d 2024		2021 s/d 2024	Rp. 200.000.000	APBD	Dinsos	PD terkait dan mitra	5	2025
		6. Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat										APBD	Dinsos	PD terkait dan mitra	5	2025
		7. Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis	Perbup tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis	2021	Camp Penampungan Gelandangan Pengemis dan Orang Terlantar, Mobil Truk untuk Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis	2022		2021 s/d 2024	Pelatihan wirausaha bagi gelandangan dan pengemis	2021 s/d 2024	Rp. 400.000.000	APBD	Dinsos	PD terkait dan mitra	5	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13	Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi	Penyelenggaraan pelayanan uji kendaraan bermotor			Server, jaringan internet, scanner, PC, pinter, smard card, smardcard R/W, Hendorheld (pembaca smart card), tablet PC untuk blangko checking, modul aplikasi PKB (aplikasi SIP2KB), dashboard monitoring (untuk administrator pengujian)	2020-2021	Aplikasi SIMPKB (Pemanfaatan smart card)	2020	Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan uji kendaraan bermotor	2020-2024	Rp. 522.740.750	APBD	Dinas Perhubungan	1. Dirjen Hubdat (SRUT dan integrasi aplikasi BLUe); 2. Samsat (data kendaraan); 3. Karoseri Kendaraan; 4. BPD DIY (retribusi) 5. APM alat uji (maintenance) 6. Masyarakat (pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji); 7. PD lain (dishub kab/kota) untuk numpang uji dan mutasi	5	2024
14	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL ITCS)	Perda, Perbup, SOP	2020 - 2022	Kamera CCTV, APILL ITCS, Server, Komputer, Jaringan Internet, Layar VMS, Ruang Kendali dan sarana pendukung.	2020 - 2024	Aplikasi APILL	2020	Sosialisasi, Bimtek, Diklat PPNS, Konsinyering, Pengadaan smart card,	2020 - 2024		APBD	Dinas Perhubungan	Diskominfo, Aparat Pegak Hukum (APH), swasta, dan Masyarakat	5	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran	Pengelolaan penerangan jalan umum	SOP	2021	Pengadaan lampu penerangan jalan umum tenaga surya	2020-2024	-	-	Bimtek, Diklat Teknis	2020	Rp 13.457.246.000	APBD, DAK	Dinas Perhubungan	Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, PLN (pembayaran lisrik PJU tenaga listrik), Pihak ketiga (pengadaan LPJU)	5	2024
					LPJU tenaga listrik merk Philips dengan sistem citytouch, server, internet, komputer/laptop/android	2020-2022	www.citytouch.com	2020	sosialisasi bagi operator citytouch	2020-2024					Dinas Perhubungan	Diskominfo TNI, POLRI, Masyarakat
16	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana			Rambu-rambu peringatan Bencana dan Early Warning System	2020-2021	panic button	2023	Pelatihan relawan dan gladi lapangan, Sosialisasi/tutorial via portal Gunungkidul Smart City, literasi digital mitigasi bencana	2020-2024	Rp 2.213.784.000	APBD	BPBD	Desa, masyarakat	5	2024
17	Penegakan Peraturan Daerah	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda	SOP Penegakan Perda	2021	Kendaraan Operasional, Alat Komunikasi, Laptop, Komputer	2020-2024			Bimtek PPNS, Konsinyering, Diklatsar Satpol PP, Monev, Sosialisasi dan Pembinaan		Rp. 750.000.000	APBD	Satpol PP	Alat Penegak Hukum (APH)	5	2024
		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	SOP Pembinaan dan Pengawasan	2021	Kendaraan Operasional, Alat Komunikasi, Laptop, Komputer	2020-2024			Bimtek PPNS, Konsinyering, Diklatsar Satpol PP, Monev, Sosialisasi dan Pembinaan		Rp. 750.000.000	APBD	Satpol PP	Masyarakat, Desa, Kecamatan dan Alat Penegak Hukum (APH)	5	2024
		Penertiban Cukai Illegal	SOP Penindakan dan Pembinaan	2021	Kendaraan Operasional, Alat Komunikasi, Laptop, Komputer, Alat Detektor	2020-2024			Regulasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Bimtek		Rp. 700.000.000	APBD	Satpol PP	Kantor Bea Cukai DIY	5	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18	Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Tramtib mas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Revisi SOP dan Penambahan SOP trantibum, SOP penanganan barang sitaan dan hasil operasi	2021	Kendaraan Operasional, Alat Komunikasi, Laptop, Komputer, peralatan penertiban, filling cabinet, almari, meja kursi, mesin ketik, peralatan operasi reklame	2021-2024			Bimtek Satpol PP, Diklatsar Satpol PP, sosialisasi pekat, premanisme, vandalisme, penyuluhan	2020-2024	Rp 14.750.000.000	APBD	Satpol PP	Pelajar, masyarakat, ASN, THL pelaku usaha, ormas, PGOT, perang kat desa, POLRI, TNI, Disdikpora, Dinsos GK, Dinsos DIY, Pol PP DIY, SRI, DPMP, Dispar, satpol PP Bali, Satpol PP Lombok, Satpol PP Surabaya, Kemendagri, Satpol PP Wonogiri,	5	2024
														Satpol PP Sukoharjo, Satpol PP Klaten, Satpol, PP Solo, Satpol PP Cilacap, Satpol PP Semarang		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pengembangan Kesamaptaan, Pengamanan, Pengawasan, Penjagaan, dan Patroli	SOP ketugasan PTI (Petugas Tindak Internal/Prov os)	2020					Bimtek Satpol PP, Diklat Satpol PP	2020-2024	Rp 2.500.000.000	APBD	Satpol PP	Pelajar masyarakat, ASN, THL, pelaku usaha, ormas, PGOT, perangkat desa, POLRI, TNI, Disdikpora, Dinsos GK, Dinsos DIY, Pol PP DIY, SRI,	5	2024
														DPMPT, Dispar, satpol PP Bali, Satpol PP Lombok, Satpol PP Surabaya, Kemen dagri, Satpol PP Wonogiri, Satpol PP Sukoharjo, Satpol PP Klaten, Sapol PP Solo, Satpol PP Cilacap, Sapol PP Semarang		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	Peningkatan Keamanan dan Keyamanan Lingkungan	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan masyarakat dan SAR							Bimtek Satpol PP, Diklat Satpol PP	2020-2024	Rp. 300.000.000	APBD	Satpol PP	Linmas dan SRI	5	2024
		Pengeraan dan Pengendalian Satuan Perlindungan masyarakat dan SAR							Bimtek Satpol PP, Diklat Satpol PP	2020-2024	Rp. 13.750.000.000	APBD	Satpol PP	SAR, tokoh keagamaan, POLRES, KODIM, BASAR NAS Pol PP DIY, POL AIRUD, Pokdarwis, nelayan	5	2024
20	Info Eksekutif	Pembuatan Aplikasi	SOP akses Info eksekutif	2020	Laptop, komputer	2021	Aplikasi info eksekutif	2022	Pelatihan untuk manajerial dan owner RSUD	2021	Rp. 100.000.000	Dana BLUD	RSUD WONOSARI	Kominfo	2	2021
21	Perbaikan persediaan Obat	Pengembangan Aplikasi yang sudah ada	SOP akses perbaikan dan persediaan obat	2020	Laptop, komputer	2021	Update aplikasi persediaan obat	2021	Pelatihan untuk petugas Apotik	2021	Rp. 50.000.000	Dana BLUD	RSUD WONOSARI	Kominfo	2	2021
22	security Database Pasien	Aplikasi	SOP pelaksanaan security database pasien	2020	Laptop, komputer	2021	Aplikasi security database pasien	2021	Pelatihan untuk Pemegang hak akses	2021	Rp. 100.000.000	Dana BLUD	RSUD Wono sari	Kominfo	2	2021

6.4. RENCANA AKSI SMART SOCIETY

Rencana pengembangan kebijakan kabupaten Gunungkidul yang mendukung Smart Society, antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang peningkatan kualitas perencanaan
2. Melakukan Perjanjian Kontrak Kerja antara Google dengan sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Melakukan Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Dinas Dikpora dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Tandatangani Digital
4. Perjanjian Kontrak Kerja antara google dengan sekolah
5. Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Dinas Dikpora dengan Badan Saiber dan Sandi Negara
6. Penyusunan Peraturan Bupati Pengelolaan Perpustakaan dalam Revitalisasi Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa
7. MOU dengan pegiat literasi untuk dukung kegiatan Mibara
8. Penyusunan Peraturan bupati tentang Perpusling untuk dukungan pihak yg dilayani pada perpustakaan Keliling
9. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Permohonan Bantuan Keuangan Parpol
10. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Ormas untuk Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan/ LSM
11. Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan dalam Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra

TABEL 16 RENCANA AKSI SMART SOCIETY

No	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	Kebijakan	Tahun	Infrastruktur	Tahun	Aplikasi Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja sam	selesai Th ke	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah : Melalui pemetaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) jenjang PAUD, SD, dan SMP menggunakan aplikasi EDS (Evaluasi Diri Sekolah)	Perda Pendidikan	2020			Pengembangan Aplikasi EDS (evaluasi Diri Sekolah)	2021	Pengawas melakukan evaluasi pada data update dari sekolah yang diampu		Rp 3.194.954.000	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan BanSM dan BanPaud-PNF Pusat dan Propinsi	3	2023
		Pengendalian Internal Perangkat Daerah : Melalui mekanisme pemberian pedoman, bimbingan supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan pengelolaan dana BOS Pusat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Sekolah (SIPKS)	Juknis BOS	2020	Laptop untuk operator sekolah dan jaringan internet	2020	pengembangan Aplikasi SIPKS dana BOS	2021	Diklat Pengembangan Aplikasi SIPKS	2025	Rp 713.125.400	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan PDSPK dan Setditjen Dikdasmen Kemdikbud	3	2022
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah :														
		- Kegiatan Workshop Pengelolaan Aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan) jenjang TPA, SPS, KB, TK, SD, dan SMP	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2020	Aplikasi dan jaringan Internet	2020	Pengembangan Aplikasi Profil Pendidikan	2021	Diklat Operator Dapodik sekolah	2025	Rp 4.998.065.900	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Tim Manajemen Dapodik Setditjen Paud-PNF, Setditjen Dikdasmen, dan Dirjen GTK Kemdikbud	3	2023
		- Kegiatan Workshop Pengelolaan Website Sekolah jenjang TPA, SPS, KB, TK, SD, dan SMP	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2019	Website sekolah	2020			Diklat pengelola websekolah	2025		PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Kominfo, dan ICT Center Kabupaten Gunungkidul	3	2024
		- Kegiatan Workshop Pengelolaan Teknologi Informasi jenjang TPA, SPS, KB, TK, SD, dan SMP	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2019	Laptop untuk operator sekolah dan jaringan internet	2021	Pengembangan Verfal PD	2021	diklat operator sekolah	2025		PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Bappeda, Kominfo, dan ICT Center Kabupaten Gunungkidul	3	2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2		- Kegiatan Workshop Sistem Informasi Manajemen Penataan dan Pemetaan Guru (SIMPEG)	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2020	Server	2020	Aplikasi SIMPEG	202	Diklat Operator	2025	Rp 93.600.000	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Dirjen GTK Kemdikbud	2	2022
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Publik : Melalui Unit Layanan Terpadu (ULT)	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2020	Server	2020	Aplikasi ULT	2022	diklat operator ULT	2025	Rp 1.601.654.000	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan PDSPK dan ULT Kemdikbud	2	2021
		Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) : Melalui aplikasi SPMSNP	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2020	Server	2020	Aplikasi SPMSNP	2023	Diklat operator SPM	2025	Rp 86.908.600	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan PDSPK Kemdikbud	2	2023
3	Program Pendidikan Dasar SMP	Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP														
		- Melalui workshop CBT (Computer Based Test)	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2020	Server CBT	2020	Aplikasi CDT	2022	Mengajarkan kepada Guru dan siswa untuk dapat melakukan evaluasi pembelajaran dengan TIK	2025	Rp 2.800.343.440	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan ICT Center Kabupaten Gunungkidul	2	2022
		- Melalui workshop UKG (Uji Kompetensi Guru)	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2020	Server UKG	2020	Aplikasi UKG	2025	Evaluasi terhadap kompetensi guru di Dkpora	2025		PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Dirjen GTK Kemdikbud	3	2023
		- Melalui workshop PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Peraturan Bupati tentang PPDB	2020	Server PPDB	2020	Aplikasi PPDB online	2025	Mendorong masyarakat dan calon siswa baru mampu melakukan pendaftaran secara cepat mudah dan murah	2025		PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Tim Manajemen Dapodik Setditjen Dikdasmen dan PDSPK Kemdikbud	2	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Google for Education - Model Pembelajaran 4.0	Perjanjian Kontrak Kerja antara google dengan sekolah	2019	Chrome book untuk Guru dan Siswa	2020	Google for education	2025	Mengajarkan kepada Siswa dan Guru dalam melakukan pembelajaran 4.0	2025	Rp 607.500.000	Google dan APBD	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan Tim Google Indonesia	3	2023
		Tanda Tangan Digital	Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Dinas Dikpora dengan Badan Saiber dan Sandi Negara	2020	Server	2020	Aplikasi Panter	2025	mendorong kepala SD dan SMP mampu menggunakan TIK sebagai alat bantu dalam menjalankan tugas pokok fungsinya	2015		APBD	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan Tim Balai Sertifikasi Elektronik BSSN	3	2023
5	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan : Pembinaan Minat Baca dan Pengembangan Perpustakaan														
		Revitalisasi Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa	Perda Pengelolaan Perpustakaan	2022	Gedung/ ruang layanan, koleksi buku & layanan berbasis TIK, komputer, penambahan	2020-2024	IBRA versi 6.0, Aplikasi kunang-kunang	2020-2024	Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Pendampingan, Pembinaan, Evaluasi, Peer Learning Meeting, Stakeholder	2020-2024	Rp 150.000.000	APBD, CSR CCFI, CSR Mitrais, APBN PNRI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusdes, Pemdes, Kecamatan, CCFI, Mitrais, Bank, LIPI, pengusaha/pengrajin lokal, YCAB, Komunitas Sedekah Ilmu, Penerbit,	5	2024
					kapasitas server kunang-kunang, wifi/modem				Meeting					lembaga swasta/ pemerintah		
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan		-												
		1. Perpustakaan Digital "epusdagunungkidul" (Pusdig Ekid)	Perbup pemsyaran epusdagunungkidul	2020	Penyediaan aplikasi dan penambahan koleksi per tahun	2021-2024	server dan biaya pemeliharaan ditanggung penyedia	2021-2024	Sosialisasi, Publikasi melalui media cetak, online dan media sosial	2021-2024	Rp 20.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PT Enam Kubuku Resources, Penerbit Buku online, lembaga satuan pendidikan, PD/lembaga pemerintah/ swasta	5	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2. Blind Corner/Sudut Koleksi untuk disabilitas tuna netra (Susi Disnatra)	Perbup pemanfaatan sarana dan koleksi difabel	2020	Penyediaan dan pemeliharaan perangkat komputer bicara, koleksi audio book, koleksi braille	2021-2024	aplikasi komputer bicara dan audio book	2021-2024	Sosialisasi dan Publikasi melalui website	2021-2024	Rp 25.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI)	5	2024
		3. Program Sedekah Buku	Perbup tentang sedekah buku	2020	Penyediaan sarpras tempat buku di area publik, buku yang akan dihibahkan	2021-2024			Sosialisasi dan Publikasi	2021-2024	Rp 25.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Lembaga kecamatan, Desa, pegiat literasi, forum komunitas, Penerbit/individu/ lembaga untuk support bukunya	5	2024
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Layanan Perpustakaan		-												
		1. Layanan (MIBARA) Minggu Baca Rame-rame	MoU dengan pegiat literasi utk dukung kegiatan Mibara	2021	Mobil Perpus Keliling (MPK), koleksi, tenda/tikar/ karpet, kado pintar, Alat permainan edukatif	2021-2024			Sosialisasi, Publikasi melalui media cetak, online dan media sosial, kegiatan lomba2 literasi insidental,	2021-2024	Rp 30.000.000	BDG, BPD, Balai Bahasa DIY	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bank Daerah Gunungkidul untuk support tenda, banner dan kado pintar. Balai Bahasa DIY untuk akses program kegiatan.	5	2024
		2. Layanan Pinjam Antar Buku secara kolektif (Pintar Selektif)	MoU dengan lembaga terkait	2021-2024	Mobil Perpus Keliling (MPK), koleksi buku	2021-2024	permintaan bisa melalui website DPK	2021-2024	Sosialisasi, Publikasi melalui media cetak, online dan media sosial	2021-2024	Rp. 5.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	lembaga-lembaga yang mengakses layanan, Penerbit penyuport buku	5	2024
		3. Layanan Takaling (perpustakaan Keliling)	Perbup ttg Perpus ling untuk dukungan pihak yg dilayani	2021	Mobil Perpus Keliling (MPK), koleksi buku, LCD, laptop, aplikasi/software, jaringan internet	2021-2024			Sosialisasi, Publikasi melalui media cetak, online dan media sosial	2021-2024	Rp 35.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kerja sama dengan Lembaga pendidikan di 17 kecamatan, kerja sama dengan Program KKN Universitas, Komunitas/Forum literasi, dll	5	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4. Pameran buku	MoU dengan Penerbit	2021-2024	Kelengkapan dan peralatan serta display pameran, papan informasi elektronik khusus pameran buku	2021-2024			Sosialisasi dan publikasi	2021-2024	Rp 50.000.000	APBD	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan	Dukungan kerja sama dengan Penerbit Gramedia, Diva Press, Perbankan, UMKM dll	5	2024
		5. Layanan Kunjung Perpus untuk mendukung Perpustakaan ramah anak	MoU dengan lembaga terkait	2021-2024	Mobil antar jemput pengunjung, Kelengkapan pembelaan sarana sarpras yang menarik	2021-2024			Sosialisasi, Publikasi melalui media cetak, online dan media sosial	2021-2024	Rp 400.000.000	APBD	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan	Kerjasama dengan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta	5	2024
6	Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Dinamis														
		1. Penerapan Aplikasi SIKD di 5 (lima) PD	dilakukan secara bertahap	2021	Komputer, aplikasi, server, jaringan internet, SDM	2020-2024	Update fitur dan pemeliharaan server	2020-2024	Sosialisasi, bimtek, pendampingan	2020-2024	Rp 25.000.000	APBD	Dinas Perpus takaan dan Ke-arsipan	Dukungan kerjasama dengan PD dan lembaga terkait	5	2024
7	Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial	Pembinaan dan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)			Laptop	2021			Lomba Film pendek P4GN	2021-2024	Rp 200.260.000	APBD	Bakes bang pol	Polres, Dinkes, BNK, Dinas Dikpora DIY, Pondok Rehabilitasi ELKANA, Radio Swara Dhagsinarga	5	2024
									Pembinaan dan Sosialisasi P4GN	2020-2024	Rp 731.500.000	APBD	Bakes bang pol	Polres, Dinkes, BNK, Dinas Dikpora DIY, Pondok Rehabilitasi ELKANA	5	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial			laptop, PC	2022			Penyuluhan Penanganan Konflik Sosial, Dialog Ulama Umara, Penyusunan Kajian Daerah oleh Forkopimda, Penyuluhan Pengawasan Orang Asing, Studi orientasi penanganan konflik sosial	2020-2024	Rp 4.888.350.000	APBD	Bakes bang pol	Forkopimda, FKDM, TKDPD,	5	2024
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama			Laptop	2021			Pembinaan KUB, Deklarasi KUB	2020-2024	Rp 578.200.000	APBD	Bakes bang pol	Kemenag, FKUB	5	2024
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda			laptop, komputer	2022			Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Out Bond Wasbang	2020-2024	Rp 786.975.000	APBD	Bakes bang pol	TNI, POLRI, KPU, Bawaslu	5	2024
8	Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan/ LSM	Pembinaan Politik Masyarakat			laptop, komputer	2022			Lomba Karya Ilmiah, Penyuluhan dan sosialisasi Kepemiluan, Monitoring perkembangan politik di daerah, Deklarasi Pemilu Damai	2020-2024	Rp 2.886.575.000	APBD	Bakes bang pol	KPU, BAWASLU, TNI, POLRI	5	2024
		Penguatan Kapasitas Organisasi Politik	SOP Permohonan Bantuan Keuangan Parpol	2020	laptop, komputer	2023			Workshop Perencanaan Anggaran Bantuan Keuangan Parpol, Workshop Pengadministrasian Bantuan Keuangan Parpol, Studi Orientasi Parpol	2020-2024	Rp 410.775.000	APBD	Bakes bang pol	Partai Politik yang mempunyai wakil di DPRD Kab Gunungkidul, BKAD, Inspektorat Daerah	5	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM	SOP Pendaftaran Ormas	2020	laptop, komputer	2023			Penguatan Kapasitas Ormas, Silaturahmi Pemda dan Ormas	2020-2024	Rp 738.870.000	APBD	Bakesbangpol	Ormas yang terdaftar dalam register ormas, BKAD, Inspektorat Daerah	5	2024
9	Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan	2020	Laptop, komputer	2021	Up Grading Cakrawala Budaya Dhaksinarga (CBD)	2020-2024	Kajian Sejarah, Lomba cerdas cermat sejarah, Bimtek, sosialisasi dan penulisan sejarah lokal,	2020-2024	Rp 3.850.000.000	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan (BKK Danais)	Dinas Kebudayaan	Guru, Penulis, masyarakat	5	2024
10	Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pengelolaan Permeseuman	Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan	2020	Laptop, komputer, gedung museum, peralatan museum	2020	Up Grading Cakrawala Budaya Dhaksinarga (CBD)	2020-2024	Studi Pengelolaan Museum, Kunjungan museum	2020-2024	Rp115.350.000.000	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan (BKK Danais)	Bidang Pelestarian Warisan dan Budaya Dinas Kebudayaan	Peneliti UGM, masyarakat	5	2024
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan	2020	Laptop, komputer	2020	Up Grading Cakrawala Budaya Dhaksinarga (CBD)	2020-2024	Kajian Obyek Warisan Budaya dan Rekomendasi cagar budaya dan warisan budaya	2020-2024	Rp 22.000.000.000	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan (BKK Danais)	Bidang Pelestarian Warisan dan Budaya Dinas Kebudayaan	Rekanan Pengadaan dan Masyarakat	5	2024
		Pembentukan "Kampung Dolanan Anak (KADO ANAK)" di Rintisan Desa Budaya	Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan	2021	Gedung/ruangan	2021			Sosialisasi dan pelatihan bagi pegiat seni	2020-2024	Rp 500.000.000	APBD, APBDes	Kecamatan, Rintisan Desa Budaya	Dinas Kebudayaan, DP3KBPM, Rintisan Desa Budaya, Masyarakat		2021
11	Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan, Seni dan Tradisi	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan	2020	Laptop, komputer, peralatan bercorak budaya	2020	Up Grading Cakrawala Budaya Dhaksinarga (CBD)	2020-2024	Workshop pengelolaan Rintisan Desa Budaya dan Gelar Potensi Drintisan Desa Budaya	2020-2024	Rp11.500.000.000	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan (BKK Danais)	Bidang Seni Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan	Masyarakat, Desa Rintisan Budaya dan rekanan pengadaan	5	2024
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan	2020	Laptop, komputer, Gedung Taman Budaya dan sarana prasarana nya	2020-2021	Up Grading Cakrawala Budaya Dhaksinarga (CBD)	2020-2024	Gelar seni budaya	2020-2024	Rp108.268.225.000	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan (BKK Danais)	DPUPR KP sbg KPA	Masyarakat	5	2024

6.5. RENCANA AKSI SMART BRANDING

Rencana pengembangan kebijakan kabupaten Gunungkidul yang mendukung Smart Branding, antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Surat Keputusan Bupati pengelolaan obyek dan daya tarik wisata baru untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Penentuan destinasi unggulan yang akan difokuskan penyelesaiannya setiap 2 tahun
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur pengelolaan pameran offline
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur pengelolaan database IKM (online) dalam Program Peningkatan Pengembangan Dan Efisiensi Perdagangan

TABEL 17. RENCANA AKSI SMART BRANDING

No	Program Kerja	Kegiatan	Kebijakan	Tahun	Infrastruktur	Tahun	Aplikasi Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Selesai Th ke		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan dan Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata	SK Bupati pengelolaan obyek dan daya tarik wisata baru	2020							Rp 2.025.230.500	APBD, DAK, Pihak ketiga	Dinas Pariwisata	Desa-Kecamatan, Pokdarwis, BumDes, Dishub, Kominfo, Sat Pol PP, dll			
		1. Penentuan destinasi unggulan dan pengembangan daya tarik wisata	penentuan destinasi unggulan yang akan difokuskan penyelesaiannya setiap 2 tahun	2020								APBD	Dinas Pariwisata	Bappeda, DPTR, DPU, Dispar, Disbud, Setda Kab. GK	2	2020	
			penetapan daya tarik berbasis budaya yang disesuaikan destinasi unggulan	2020									APBD	Dinas Pariwisata	Bappeda, DPTR, DPU, Dispar, Disbud, Setda	2	2020
		2. Pemenuhan sarana prasarana yang layak		2020 - 2023	emasangan cctv di tempat tempat strategis pariwisata	2020							APBD, Pihak ketiga	Dinas Pariwisata	Dispar, Kominfo, DPU, Dishub, DLH	3	2022
					melengkapi sarana prasarana sesuai standart yang ditentukan (MCK, parkir, sampah, drainase, dll)	2020 - 2023						APBD, Pihak ketiga	Dinas Pariwisata	Bappeda, Dispar, DPU, Dishub, Kominfo, DLH,	4	2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3. Pemeliharaan sarana prasarana di destinasi		2020 - 2023	pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana destinasi	2020 - 2023						APBD	Dinas Pariwisata	Dispar, DPU, Dishub, DLH, Kominfo		
		4. e ticketing		2020	penyediaan peralatan e ticketing	2020	penyediaan aplikasi	2020	pelatihan dan praktek penggunaan e ticketing	2020		APBD, APBN, dan Pihak ketiga	Dinas Pariwisata	Dispar, Kominfo, Setda, BKAD	1	2020
					Pengembangan jaringan dengan platform pemasaran, dan pendukung lainnya tra veloka, ticket. com, dll dan sistem pem bayaran mis dana, go pay, dll)	2020 - 2023						APBD, APBD, Pihak ketiga	Dinas Pariwisata	Dispar, Kominfo, BKAD, Setda	1	2020
		5. Pembangunan jaringan informasi terintegrasi (GTX)		2020	pengembangan jaringan internet	2021	pengembangan aplikasi Gunungkidul Tourism Exchange (GTX)	2021	Sosialisasi pemanfaatan GTX kepada semua stake holders	2021	Rp 9.000.000.000	APBD, APBN, dan Pihak ketiga	Dinas Pariwisata	Dispar GK, Kominfo, Disbud, Dishub, Dispar DIY, Setda GK	2	2021
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	Pembinaan Kelembagaan Pariwisata :											Dinas Pariwisata	BPPD, PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa, Kecamatan, dll		
		1. Pembinaan Pokdarwis							pembinaan, pelatihan, studi tiru	2020-2023	Rp 850.000.000	APBD, DAK, Pihak ketiga		BPPD, PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa, Kecamatan, dll	4	2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2. Pembinaan Desa Wisata							Pembinaan, pelatihan, studi tiru	2020-2023		APBD, DAK, Pihak ketiga		BPPD, PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa-Kecamatan, dll	4	2023
		3.pengembangan Geopark							Pembinaan, pelatihan, studi tiru	2020-2024		APBD, DAK, Pihak ketiga		BPPD, PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa-Kecamatan, dll	5	2024
		4. Kampanye Sadar Wisata							Pembinaan, pelatihan, studi tiru	2020-2024		APBD, DAK, Pihak ketiga		BPPD, PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa-Kecamatan, dll	5	2024
		5. Diksar Saka Pariwisata							Pembinaan, pelatihan, studi tiru	2020-2024		APBD, DAK, Pihak ketiga		BPPD, PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa-Kecamatan, dll	5	2024
		Pengembangan Industri Pariwisata :								2020-2024	Rp 1.342.995.000		Dinas Pariwisata		5	2024
		1. Pembinaan Keterampilan dan kualitas SDM pariwisata							Pembinaan, pelatihan, studi tiru	2020-2023		APBD, DAK, Pihak ketiga		BPPD, PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa-Kecamatan, Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, dll	4	2023
		2. Sertifikasi pelaku usaha pariwisata							Pembinaan, pelatihan, studi tiru	2020-2023		APBD, DAK, Pihak ketiga		BPPD, PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa-Kecamatan, Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, dll	4	2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3. Sertifikasi usaha pariwisata							Pembinaan, pelatihan, studi tiru	2020-2023		APBD, DAK, Pihak ketiga		BPPD, PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa-Kecamatan, Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, dll	4	2023
		4. penguatan jaringan pelaku usaha pariwisata							Pembinaan, pelatihan, studi tiru	2020-2023		APBD, DAK, Pihak ketiga		BPPD, PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa-Kecamatan, Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, dll	4	2023
3	Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata					Optimalisasi pemanfaatan web dan media sosial	2020-2023		2020-2023	Rp 2.500.000.000	APBD, Pihak ketiga	Dinas Pariwisata	Diskominfo, Dishub, Pol PP, Polres, Dinkes, PHRI, HPI, BPPD, Desa-Kecamatan, dll	4	2023
		Sub Kegiatan :					Gunungkidul Tourism Exchange (GTX)	2021		2020-2023		APBD, Pihak ketiga	Dinas Pariwisata		4	2023
		1. promosi melalui media elektronik (web, medsos, radio, dll)							Pemilihan destinasi yang menjadi daya tarik utama	2020-2023		APBD	Dinas Pariwisata	Dispar, Kominfo, PHRI, HPI, BBPD GK, dll	4	2023
		2. promosi melalui media cetak (koran, majalah, booklet, leaflet, dll)							Pemilihan media yang paling sesuai untuk melakukan promosi	2020-2023		APBD	Dinas Pariwisata	Dispar, Kominfo, PHRI, HPI, BBPD GK, dll	4	2023
		3. promosi langsung (pameran, fam tour)							Pemilihan lokasi dan jenis pameran yang sesuai	2020-2023		APBD	Dinas Pariwisata	Dispar, Kominfo, PHRI, HPI, BBPD GK, dll	4	2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4. Penyelenggaraan event berkelas internasional											Dinas Pariwisata	Dispar, Kominfo, PHRI, HPI, BBPD GK, dll	
									melaksanakan event skala regional	2020-2023		APBD, Pihak ketiga	Dinas Pariwisata	Dispar, Kominfo, PHRI, HPI, BBPD GK, dll	4 2023
									melaksanakan event skala internasional	2023		APBD, Pihak ketiga	Dinas Pariwisata	Dispar, Kominfo, PHRI, HPI, BBPD GK, dll	4 2023
		5. Finalisasi "branding pariwisata"					penyusunan peraturan tentang penetapan "branding pariwisata"	2020				APBD	Dinas Pariwisata	Dispar, Kominfo, PHRI, HPI, BBPD GK, dll	1 2020
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata											Dinas Pariwisata		
		1. Sosialisasi dan Pembinaan TDUP							Pembinaan, pelatihan studi tiru: dengan memilih peserta yang siap untuk melanjutkan pengajuan TDUP	2020-2023		APBD, APBN	Dinas Pariwisata	Dispar, DPMPT, LSUP, dll	4 2023
									Pemberian insentif promosi bagi usaha pariwisata yang ber TDUP	2020		APBD	Dinas Pariwisata	Dispar, DPPKAD	4 2023
		2. Pelatihan dan pembinaan UEK							pembinaan dan pelatihan fotografi dan pembuatan video pariwisata	2020-2023		APBD, DAK	Dinas Pariwisata	Dispar, Komunitas pecinta fotografi, dll	4 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
									pembinaan dan pelatihan an desain grafis			APBD, DAK	Dinas Pariwisata	Dispar, Komunitas desain grafis, institusi terkait kegiatan dll	4	2023
									pelatihan pengemasan seni pertunjukan yang menjual			APBD, DAK	Dinas Pariwisata	Dispar, Komunitas desain grafis, institusi terkait kegiatan dll	4	2023
									pelatihan kuliner			APBD, DAK	Dinas Pariwisata	Dispar, Komunitas desain grafis, institusi terkait kegiatan dll	4	2023
4	Program Peningkatan Pengembangan dan Efisiensi Perdagangan	Pengembangan Pasar dan Promosi Produk Daerah														
		1. Pameran Produk Unggulan Daerah (offline) Ubi Kayu	SOP pengelolaan pameran offline	2020	Laptop, komputer, meja, kursi	2021			Pameran Produk Unggulan Daerah (offline) Ubi Kayu	2020-2024	Rp 787.600.000	APBD I APBD II	Disperindag	Disperindag DIY, Dinas Kebudayaan GK dan Dinas Pariwisata GK	5	2024
		2. Pengembangan data base IKM (online)	SOP pengelolaan database IKM (online)	2020	Laptop, komputer	2021	Pengembangan data base IKM (online)	2021	Bimtek petugas data	2021		APBD I APBD II	Disperindag	KOMINFO	5	2024

6.6. RENCANA AKSI SMART ECONOMY

Kebijakan daerah yang mendukung Smart Economy, antara lain adalah:

1. Perbup tentang sistem pertanian terpadu Gunungkidul, SK tim pelaksana kegiatan
2. SOP ttg TTE dan SOP pengajuan perubahan SPPT online dalam program kerja Pengembangan pendapatan daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang, dan Tanggungjawab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Revisi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insetif dan Kemudahan Penanaman Modal
5. SOP Pelatihan dengan video dan SOP Kampanye Gemar Makan Ikan dalam program kerja Pengembangan Agribisnis Perikanan
6. SOP pengontrolan ikan di PUD dan SOP Pelatihan dengan video dalam program kerja Pemberdayaan Nelayan
7. SOP pelatihan budidaya mina padi dan SOP pelatihan hidroponik dalam program kerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
8. SOP reklamasi lahan konservasi dalam program kerja Program Pemberdayaan Pengrajin

TABEL 18. RENCANA AKSI SMART ECONOMY

No	Program Kerja	Kegiatan	Kebijakan	Tahun	Infrastruktur	Tahun	Aplikasi Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Selesai Th Ke		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Peningkatan Kualitas Penyuluhan	Peningkatan sistem informasi pertanian melalui SILA ANGGUN (Sistem Informasi Jendela Pertanian)	Perbup tentang sistem pertanian terpadu Gunungkidul, SK tim pelaksana kegiatan	2021	Komputer, Server, aplikasi	2021	Aplikasi SILA ANGGUN (Sistem Informasi Jendela Pertanian)	2021	Bimtek kepada tim pelaksana kegiatan dan petugas lapangan (PPL, petugas data, POPT, medis dan paramedis veteriner)	2021-2024	Rp 700.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan	Kominfo, Balai Proteksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Stasiun Klimatologi, BPTP, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, BB Veteriner, PDH (Persatuan Dokter Hewan Indonesia)	5	2024	
		Peningkatan SDM Pertanian	Perbup tentang pembinaan pertanian sejak dini	2020	Kebun pertanian di 3 SMA/S MK	2021	Tutorial Budidaya Pertanian	2021	Sosialisasi, praktek di kebun sekolah	2021	Rp 45.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pendidikan	5	2024	
2	Pengembangan pendapatan daerah	Pelayanan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah			-	-	-		pembahasan perubahan perbub no 6 th 2017	2020	Rp 25.000.000	APBD	BKAD	bag hukum. lnda	1	2020	
		- Integrasi data PBB, BPHTB, dan Pendaftaran Tanah															
			PKS dgn BPN terkait PBB, PBHTB dan Pendaftaran Tanah	2020	-	-	-	2020	Sosialisasi PKS kepada petugas pajak, PPAT, PPATS, wajib pajak	2020-2021	Rp 50.000.000	APBD	BKAD	Bag Hukum, Bag Pem.Um, DPTR, DPMPPT	2	2021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- Penandatanganan scr elektronik dan pemberian QR Code pd SPPT	SOP ttg TTE	2020	Komputer, printer, mesin foto copy	-	Panther dan e-sign (masuk ke bid Santel)	2020	Sosialisasi QR Code kpd Desa, Kec, petugas pajak dan WP ; Bimtek kepada petugas pajak	2020-2024	Rp 2.000.000.000	APBD	BKAD	Kominfo, Desa, Kec	5 2024
		- Informasi pembayaran dan DHKP real time online					sistem informasi pelayanan pajak daerah (SiPAPAH)	2020	Sosialisasi SiPAPAH kpd Desa, Kec, petugas pajak dan WP; Bimtek kpd petugas pajak	2020	Rp 150.000.000	APBD	BKAD	Desa, Kec	1 2020
		- Pengajuan perubahan SPPT scr online	SOP pengajuan perubahan SPPT online	2021	server, laptop, komputer	2020	Sistem Informasi Pajak Daerah Telusuri Objek Pajak (SiPAPAH TOP)	2021	Sosialisasi SiPAPAH kpd Desa, Kec, dan WP, Bimtek kpd petugas pajak	2021-2024	Rp 600.000.000	APBD	BKAD	Desa, Kec	5 2024
3	Program Pengembangan IKM	Pembinaan dan Pendampingan Industri Sandang Kulit Logam Aneka: 1. Pelatihan Batik, 2. Haki Batik, 3. Pelatihan Kerajinan Kain Perca Batik								2020-2024					5 2024
		1. Pelatihan Batik			Alat proses produksi batik	2021			Pelatihan	2021	Rp 240.000.000	APBD, APBD DIY	Dispe rindag	Disperindag DIY, Balai Batik, kecamatan, desa, owner/ pengusaha batik	5 2024
		2. HKI Batik									Rp 50.000.000	APBD, APBD DIY	Dispe rindag	Disperindag DIY, Kemenkum ham	5 2024
		3. Pelatihan Kerajinan Kain Perca Batik			Alat proses produksi batik	2021			Pelatihan	2021	Rp 200.000.000	APBD, APBD DIY	Dispe rindag		5 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pembinaan & Pendampingan Industri Hasil Hutan & Perkebunan Sub Kegiatan : Kerajinan Limbah Kayu & Limbah Bambu Mendukung Pariwisata							Pembinaan dan Pendampingan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Sub Kegiatan: Kerajinan Limbah Kayu dan Limbah Bambu Mendukung Pariwisata				Disperindag			
		1. Pelatihan Kerajinan limbah kayu & limbah bambu			Alat proses produksi	2021			Pelatihan	2021	Rp 625.000.000	APBD, APBD DIY	Disperindag	Disperindag DIY, Kecamatan, dan Praktisi	5	2024
		2. Pelatihan Pengawetan bambu dan kayu Foodgrade							Pelatihan	2022	Rp 25.000.000	APBD, APBD DIY	Disperindag	Disperindag DIY, Praktisi	3	2022
4	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Pelayanan serta Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan sub kegiatan :	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang, dan Tanggung jawab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Server, anjungan informasi, perangkat help desk, sms gateway, playground, ruang laktasi, taman,	2020-2024	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Online (SIMPEL)	2020	In House Training, Sosialisasi	2020-2024	Rp 3.165.125.000	APBD	DPMPT	DPMPT, BKAD, BPD, Diskominfo	5	2024
					parkir, mushola, selasar, ruang pengaduan, dan lain lain											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui SIMPEL (Sistem Informasi Perizinan Online) dan fasilitasi untuk OSS - Pelayanan Retribusi IMB - <i>Inhouse training</i> - Sosialisasi Perizinan 	Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang, dan Tanggung jawab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Revisi SOP	2020												
5	Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	<p>Penyelenggaraan promosi penanaman modal serta Pengembangan penanaman modal, dengan sub kegiatan :</p> <p>- Temu Bisnis Investor Daerah</p>	<p>Revisi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insetif dan Kemudahan Penanaman Modal</p> <p>Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal</p>	2021	Ruang Konsultasi Investasi, Ruang Multimedia, Server, Mall Pelayanan Publik	2020-2024			Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul	2020 - 2024	Rp 3.000.550.000	APBD	DPMPT	DPMPPT, BPD, Setda, Bappeda, BKAD, Diskominfo, Investor dan Calon Investor (pelaku usaha), akademisi dan praktisi usaha, asosiasi dan komunitas bisnis, perbankan	5	2024
				2021					Publikasi Advertorial							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyusunan Materi Promosi Investasi	Revisi Perbup Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang	2021					Promosi lewat media yang dipilih (Pena yangan slide show dan video melalui Facebook, Twitter, Instagram @dpmptgk	2020 - 2024					
			Pemberian Insetif dan Kemudahan Penanaman Moda						dan youtube serta media elektronik televisi dan radio)						
		-Penyusunan dokumen investasi Kab.Gunungkidul	Revisi Perbup Nomor 30 Tahun 2015 tentang RUPM	2021											
		- Pelaksanaan workshop pengembangan investasi di Kab.Gunungkidul	Penyusunan Perbup <i>Blueprint</i> Investasi Kabupaten Gunungkidul	2021											
		-Publikasi tentang pengembangan investasi													
6	Program Peningkatan Kualitas Pengelolan UMKM	Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM Sub Kegiatan : Pelatihan Digital Marketing			Kolaborasi dengan Akademisi, Praktisi, Pelaku Usaha Sukses, Jaringan internet		Aplikasi pemasaran online		Modul, Artikel		Rp. 5.500.000	APBD	Dinas Koperasi UKM	Ahli IT, praktisi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Kolaborasi dengan Akademisi, Praktisi, Pelaku Usaha Sukses, Jaringan internet	2021	Aplikasi pemasaran online	2021	Modul, Artikel	2021	Rp 10.000.000	APBD	Dinas Koperasi UKM	Ahli IT, praktisi	2	2021
		Sub Kegiatan : - Pendataan UMKM berbasis aplikasi (update data UMKM)			HP, Komputer dan jaringan internet	2020	Aplikasi Pendataan UMKM	2020	form data UMKM, buku panduan, sosialisasi, pelatihan	2020	Rp 141.720.000	APBD	Dinas Koperasi UKM	Penyedia barang/jasa, lembaga instansi terkait	1	2020
					HP, Komputer dan jaringan internet	2022	Aplikasi Pendataan UMKM	2022	form data UMKM, buku panduan, sosialisasi, pelatihan	2022	Rp 175.000.000	APBD	Dinas Koperasi UKM	Penyedia barang/jasa, lembaga instansi terkait	3	2022
					HP, Komputer dan jaringan internet	2024	Aplikasi Pendataan UMKM	2022	form data UMKM, buku panduan, sosialisasi, pelatihan	2024	Rp 200.000.000	APBD	Dinas Koperasi UKM	Penyedia barang/jasa, lembaga instansi terkait	3	2022
		- Pembuatan Sistem Informasi Usaha Mikro (aplikasi)			Komputer, jaringan internet, operator, server	2024	SIUMIK (Sistem Informasi Usaha Mikro)	2022	leaflet, booklet	2024	Rp 150.000.000	APBD	Dinas Koperasi UKM	Penyedia barang/jasa, lembaga instansi terkait, Ahli IT, praktisi	5	2024
7	Program Peningkatan Kapasitas Koperasi	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Sub kegiatan : - Pelatihan Digitalisasi Koperasi			Komputer dan jaringan internet	2022	OSS, Aplikasi koperasi digital	2022	Modul, Artikel	2022	Rp 17.500.000	APBD, DAK	Dinas Koperasi UKM	Ahli IT, praktisi	3	2022
		- Pembuatan Sistem Informasi Koperasi (aplikasi)			Komputer, jaringan internet, server, software	2024	SIKOPER (Sistem Informasi Koperasi Berbasis Ekonomi Rakyat)	2022	leaflet, brosur	2024	Rp 100.000.000	APBD	Dinas Koperasi UKM	Penyedia barang/jasa, lembaga instansi terkait, Ahli IT, praktisi	5	2024
8	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Pembuatan video konten tentang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi kelompok hasil pengolahan dan pemasaran (poklamsar)	SOP Pelatihan dengan video	2021					Pelatihan bagi petugas	2021	Rp 300.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan	DEPKOMINFO	1	2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		pembuatan video konten tentang pelatihan produk non konsumsi;			Wireless	2022			Pelatihan bagi petugas	2021					
		pembuatan video konten kampanye makan ikan PAUD, TK,SD, Posyandu,Lansia dan PKK	SOP Kampanye Gemar Makan Ikan	2020	Sarana prasarana sosialisasi	2021	Aplikasi sederhana Sosialisasi	2021	Sosialisasi, bimtek petugas	2020-2024					
9	Pemberdayaan Nelayan	Fasilitasi benih ikan untuk pengkayaan di Perairan Umum Daratan (PUD)													
		pembuatan aplikasi untuk mengontrol produksi ikan di PUD	SOP pengontrolan ikan di PUD	2020			Aplikasi kontrol ikan	2021	Pelatihan bagi petugas kontrol ikan	2021					
		Pembuatan video konten tentang manajemen usaha perikanan			Wireless	2022			Pelatihan bagi petugas	2021	Rp 400.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan	POKMASWAS	1 2020
		'Pembuatan video konten tentang rencana usaha perikanan	SOP Pelatihan dengan video	2021					Pelatihan bagi petugas	2021					
		Pembuatan video konten tentang penanganan ikan di TPI	SOP penanganan ikan di TPI	2021	Wireless	2022			Pelatihan bagi petugas	2021					
10	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya									Rp 900.000.000	DAK	Dinas Kelautan dan Perikanan	POKDAKAN	1 2020
		Fasilitasi budidaya mina padi							Sosialisasi dan pelatihan	2020-2024					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- Pembuatan video konten tentang budidaya mina padi	SOP pelatihan budidaya mina padi	2020	Sarpras pelatihan	2021			Pelatihan bagi petugas	2020-2024						
		- Fasilitasi budidaya lele kawasan tertinggal dan hidroponik	SOP pelatihan hidroponik	2020	Sarpras pelatihan	2021			Bimtek hidroponik	2020-2024						
		- Pembuatan video konten tentang budidaya lele kawasan tertinggal	SOP pelatihan budidaya lele kawasan tertinggal	2020	Sound system	2021			Pelatihan bagi petugas	2020-2024						
		- Fasilitasi pengembangan lele intensif							Pelatihan bagi petugas	2020-2024						
		- Pembuatan video konten tentang pengembangan lele intensif							Pelatihan bagi petugas	2020-2024						
		- Fasilitasi pembuatan pakan tambahan	SOP pelatihan pembuatan pakan tambahan	2020					Pelatihan bagi petugas	2020-2024						
		- Pembuatan video konten tentang pembuatan pakan tambahan							Pelatihan bagi petugas	2020-2024						
11	Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterampilan Pencari Kerja	SOP Pelatihan tenaga terdidik	2021	Sarana prasarana pelatihan	2020-2024	Aplikasi pelatihan terpadu	2022	Sosialisasi, pelatihan, bimtek	2020-2024	Rp 4.512.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PD, Kecamatan, Desa	5	2024
12	Program Pemberdayaan Pengrajin	Pelatihan mengukir batu			Sarpras pelatihan ukir batu	2021			Pelatihan bagi petugas	2021	Rp 250.000.000	APBD	Kec Ponjong	Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas KLH, Bagian Hukum Setda kab GK		2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Fasilitasi peningkatan Penyediaan Bahan Baku batu ukir.							Sosialisasi bagi pengrajin	2021			Kec Ponjong	Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas KLH, Bagian Hukum Setda kab GK.	2021
		Fasilitasi dan pelatihan bagi penambang untuk mengelola bekas tambang batu menjadi perkebunan (Konservasi)	SOP reklamasi lahan konservasi	2021	Sarpras pelatihan konservasi	2021			Pelatihan bagi petugas	2021			Kec Ponjong	Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas KLH, Bagian Hukum Stdakab GK.	2022

BAB VII

PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Smart City mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kabupaten menggunakan pendekatan citizen centric sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mewujudkan Gunungkidul Smart City, perumusan peta jalan menjadi bagian tidak terpisahkan dari masterplan Smart City. Tahapan demi tahapan dijabarkan di dalam Peta Jalan Smart City Kabupaten Gunungkidul yang mencakup enam dimensi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

7.1. PETA JALAN SMART GOVERNANCE

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam peta jalan smart governance antara lain:

1. Mempermudah pengelolaan data kepegawaian dan dalam presensi kerja
2. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Terwujudnya pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah
6. Penyusunan kebijakan (SE) penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik
7. Keseragaman pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan Teknologi Informasi di seluruh PD
8. Meningkatkan pemanfaatan TIK di masyarakat
9. Mengefektifkan penggunaan aplikasi untuk peningkatan pelayanan
10. Dalam Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dapat Menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik/masyarakat
11. Mewujudkan keselarasan antar waktu dan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
12. Menjadi pedoman bagi desa dan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi desa dan daerah
13. Memanfaatkan Data dan dokumen kependudukan

14. Meningkatkan prosentase kepemilikan KTP Elektronik pada pengelolaan Administrasi Kependudukan

Tahapan dan penjabaran peta jalan smart governance Kabupaten Gunungkidul, selengkapnya disajikan dalam tabel 19. Peta Jalan Smart Governance berikut

Tabel 19.Peta Jalan SMART GOVERNANCE

No	Program Kerja	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai	Pengelolaan data ASN	Mempermudah pengelolaan data kepegawaian	ASN Daerah	Manajemen data kepegawaian ASN Daerah secara by name dan real (Aplikasi SIMPEG-Sistem Informasi Kepegawaian)	Rp. 214.304.500	APBD	BKPPD	Dinas Kominfo	2021 (10 PD) 2024 (34 PD)
2	Pembinaan dan kesejahteraan aparatur	Pembinaan Disiplin Pegawai	Mempermudah dalam presensi kerja	ASN Daerah	ASN Daerah memakai presensi MOBSI (presensi online dengan smartphone), Buku Kerja online	Rp. 540.427.500	APBD	BKPPD	Dinas Kominfo	2020-2024
3	Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD	Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan Juknis Pelaksanaan APBD	Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat	Aplikasi e-budgeting	Rp. 3.321.950.000	APBD	BKAD	Semua PD	2020-2024
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengawasan berbasis E-Audit	Peraturan Bupati tentang pelaksanaan E-Audit	Rp. 1.000.000.000	APBD	Inspektorat Daerah	BPK, BPKP	2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Ketatalaksanaan (Kebijakan Tata Naskah Dinas Elektronik)	Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah	Seluruh perangkat daerah	Terselenggaranya tata naskah dinas secara elektronik	Rp. 765.000.000	APBD	Sekretariat Daerah	Dinas Kominfo	2019 (penyusunan dan sosialisasi regulasi); 2020 (Uji coba aplikasi); 2021 (penerapan)
6	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Perumusan kebijakan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat secara Elektronik):	Penyusunan kebijakan (SE) penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik	ASN Daerah	Server, jaringan internet, peralatan SKM secara Elektronik	Rp. 199.985.000	APBD	Sekretariat Daerah	Dinas Kominfo	2021
7	Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	Keseragaman pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan Teknologi Informasi di seluruh PD	Semua Pembelanjaan TIK di PD	Semua pembelanjaan TIK di PD harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kominfo	Rp 12.162.862.000	APBD	Dinas Kominfo	PD, kecamatan, desa, lembaga pendidikan, Swasta	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Meminimalisir tingkat kerusakan serta gangguan jaringan dan infrastruktur TIK di seluruh PD, 35 PD, 18 kec, 144 desa					
		Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan TIK	Meningkatkan pemanfaatan TIK di masyarakat	PD, UKM, kecamatan, desa, masyarakat	35 PD, 144 desa	Rp. 1.500.000.000	APBD	Dinas Kominfo	Swasta, kecamatan, desa, PD	2020-2024
		Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi	Mengefektifkan penggunaan aplikasi untuk peningkatan pelayanan	PD, UKM, kecamatan, desa, masyarakat	36 PD, 144 desa	Rp. 7.000.000.000	APBD	Dinas Kominfo	Swasta, kecamatan, desa, PD	2020-2024
8	Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyelenggaraan kehumasan	Menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik/masyarakat	Pemerintah Kabupaten	Penyebaran informasi teratur melalui media elektronik maupun non elektronik (koran, medsos, televisi, radio)	Rp. 2.246.780.000	APBD	Dinas Kominfo	PD, Forum Wartawan, Jaringan manajemen media cetak dan elektronik	2020-2024
		Penyelenggaraan peliputan, dokumentasi dan publikasi	Menciptakan citra dan reputasi positif	Pemerintah Kabupaten	Penyebaran informasi yang cepat, tepat dan valid melalui medsos Pemkab	Rp. 1.942.962.500	APBD	Dinas Kominfo	Kepala Daerah, Forkopim dan PD	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyelenggaraan komunikasi publik dan diseminasi informasi	Mewujudkan keterbukaan informasi publik	Pemerintah Kabupaten	Informasi publik dapat diakses dengan mudah, cepat dan murah melalui website Pemkab	Rp. 1.477.962.500	APBD	Dinas Kominfo	PD	2020-2024
9	Persandian dan Pengamanan Informasi	Pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Meningkatkan keamanan informasi dan penyediaan data statistik	PD, UKM, kecamatan, desa, masyarakat	37 PD, 144 desa	Rp. 250.000.000	APBD	Dinas Kominfo	Swasta, kecamatan, desa, PD	2020-2025
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Mewujudkan keselarasan antar waktu dan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kesesuaian program pembangunan daerah	- Indeks kesesuaian program - Keselarasan program kegiatan sejak perencanaan sampai penganggaran	Rp. 524.580.000	APBD	Bappeda	Dinas Kominfo, BKAD	2020-2024
		Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah	Membangun basis data dan informasi pembangunan desa dan daerah yang terintegrasi.	Pemerintah Desa	Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan potensi dan permasalahan daerah	Rp. 230.080.000	APBD	Bappeda	Dinas Komunikasi dan Informatika, DP3AKBPM, Pemerintah Desa, dan Lembaga Swasta Non-Profit (CRI)	2019 - 2020
			Menyediakan akses data dan informasi desa dan daerah		Data Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul					
			Meningkatkan layanan publik		Jumlah Pendamping SID yang terlatih					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Menjadi pedoman bagi desa dan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi desa dan daerah		Jumlah SDM Desa yg terlatih dan bisa operasional SID					
					Jumlah SDM Kecamatan yang paham dan bisa operasional SID					
					Jumlah SDM Perangkat Daerah yg paham dan bisa operasional SIKAB					
11	Pemanfaatan Data dan Inovasi	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Memfaatkan Data dan dokumen kependudukan	ASN Daerah	Jumlah peserta rakor dan sosialisasi pemanfaatan aplikasi siak	Rp. 45.000.000	APBD, DAK	Disdukcapil		2020-2024
		Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Meningkatkan jalinan kerja sama dan inovasi pelayanan	ASN Daerah	aplikasi siak, aplikasi cetak mandiri	Rp. 5.250.000	APBD, DAK	Disdukcapil	19 desa, 2 swalayan	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan	ASN Daerah	aplikasi SIAK	Rp. 18.000.000	APBD, DAK	Disdukcapil	PD terkait : Dinsos, Dinkes, PA, PN, Kemenag, Bappeda	2020-2024
13	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan	Meningkatkan prosentase kepemilikan KTP Elektronik	Wajib KTP (jompo, difabel, pemula)	100 % wajib KTP memiliki KTP elektronik	Rp. 1.700.000.000	APBD, DAK	Disdukcapil	Bagian Hukum, Biro Hukum DIY, Biro Tapem DIY	2024

7.2. PETA JALAN SMART ENVIRONMENT

Tujuan Peta Jalan yang mendukung Smart Environment, antara lain adalah:

1. Pada program pengembangan ruang terbuka hijau dapat mewujudkan lingkungan yang asri dan nyaman
2. Meningkatkan kesehatan di lingkungan permukiman
3. dan pedesaan

Adapun Tahapan dan penjabaran peta jalan Smart Environment Kabupaten Gunungkidul, selengkapnya disajikan dalam tabel 20. Peta Jalan Smart Environment berikut:

Tabel 20. Peta Jalan SMART ENVIRONMENT

No	Program Kerja	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Strategis DIY : KPY (Penyehatan Lingkungan Permukiman)	Pengembangan SPAM Regional	Meningkatkan ketersediaan air minum di wilayah barat	Peningkatan ketersediaan air di masyarakat	Akses masyarakat untuk mendapatkan air minum meningkat	Rp 383.045.000.000	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Perusahaan Daerah	DPUPRKP	Pem.Des Banyusoco, Perusahaan Daerah PDAM Gunungkidul	2020-2024
2	Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pengembangan SPAM Pedesaan	Menggali sumber-sumber baru air minum di pedesaan	Peningkatan ketersediaan air di masyarakat	Semakin banyak masyarakat pedesaan dapat mengakses air	Rp 104.500.000.000	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta/ Masyarakat	DPUPRKP		2020-2024
3	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Pemakaian Teknologi Digital dalam perencanaan dan pengawasan jalan/jembatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Terkainya sistem informasi jalan dan peta integrasi dalam perencanaan dan pengawasan jalan/jembatan			DPUPRKP		
		1) Pembuatan Sistem Informasi Jalan Kabupaten Terpadu				Rp. 300.000.000	APBN - APBD	DPUPRKP	Dinas Kominfo, Dinas Tata Ruang, BAPPEDA	2021
		2) Pembuatan Peta Terintegrasi				Rp. 200.000.000	APBN - APBD	DPUPRKP	Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, BAPPEDA	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pengelolaan Persampahan	Penyelenggaraan peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Termanfaatkannya secara optimal TPA dan meningkatnya pengelolaan sampah oleh masyarakat	Rp 40.500.000.000	APBD/ DAK/ DANAIS	DLH dan Bagian Hukum	Dinas Pendidikan, Kemenkumham DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan dan JPSM	2013-2023
5	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau	Mewujudkan Lingkungan yang asri dan nyaman	Peningkatan kualitas lingkungan	Terbangunnya RTH dan beberapa taman di desa dan kecamatan dilengkapi fasilitas free wifi	Rp. 1.200.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo dan Pemerintah Kecamatan	2020-2024

7.3. PETA JALAN PETA JALAN SMART LIVING

Tujuan Peta Jalan yang mendukung Smart Living, antara lain adalah:

1. Meningkatkan pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang
2. Meningkatkan kualitas hidup di perumahan dan permukiman
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan
5. Mencegah penyakit menular
6. Mencegah dan penanggulangan masalah gizi dan perbaikan masalah gizi
7. Melindungi perempuan dan hak anak
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
9. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
10. Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan barang
11. Memelihara keamanan.

Adapun Tahapan dan penjabaran peta jalan Smart Living Kabupaten Gunungkidul, selengkapnya disajikan dalam tabel 21. Peta Jalan Smart Living berikut

Tabel 21. Peta Jalan SMART LIVING

No	Program Kerja	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja sama	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelaksanaan dan pengawasan Pertanahan dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang meningkat	Peningkatan Persentase pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang terlayani dengan baik	Rp. 209.041.000	APBD	DPTR	Dinas Kominfo, Bappeda	2020-2024
2	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya	Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman	Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat serta penganan kawasan kumuh	Perbaikan dan pembangunan rumah tidak layak huni	Rp. 1.200.000.000	APBD	DPUPRKP	Penyedia Barang Jasa, Masyarakat	2022
		Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal			Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) : Jalan Lingkungan dan sanitasi	Rp. 2.000.000.000	APBD	DPUPRKP	Kontraktor	2022
		Penanganan Kawasan Kumuh			Pembangunan Infrastruktur PSU ; jalan dan sanitasi	Rp. 2.000.000.000	APBD	DPUPRKP	Kontraktor	2024
3	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan perilaku/budaya hidup bersih	Tersampainya gerakan hidup bersih dan sehat	Rp. 175.200.000	DAU	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo	2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Perbaikan Gizi Masyarakat	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi dan Perbaikan Masalah Gizi	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan serta perbaikan gizi	Peningkatan konsumsi gizi di masyarakat	Deklarasi pencegahan stunting; gerakan menanam dan pengelolaan daun kelor; pemenuhan antropometri kit	Rp. 1.843.149.400	DAK Fisik; DAK Nonfisik; APBN; APBD I; DAU	Dinas Kesehatan		2022
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Layanan Medis dan Kegawatdaruratan	Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan di masyarakat	Peningkatan kecepatan pelayanan kegawatdaruratan	Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Rp. 328.075.000	APBD; DAK	Dinas Kesehatan		2022
		Pelayanan Kesehatan Perorangan	Meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat	Peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Kesehatan (Desain bangunan aksesible disabilitas)	Rp 14.601.655.851	APBD; DAK; Pajak Rokok	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo, Dinas Sosial	2024
6	Kesehatan Keluarga	Pelayanan Kesehatan Ibu, Remaja, dan Usia Lanjut	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, remaja dan usia lanjut	Pengembangan Puskesmas PONEB; Pengembangan pelayanan persalinan di Puskesmas;	Semakin meningkatnya kualitas kesehatan bagi ibu, remaja dan usia lanjut	Rp. 4.379.352.500	DAK NonFisik, APBN, APBD I, DAU	Dinas Kesehatan		2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengembangan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR); Pengembangan Puskesmas Santun Lansia; Penguatan ANC terpadu; Pengembangan Posyandu Remaja; Pengembangan Posyandu Lansia terintegrasi Posbindu						
		Layanan Kesehatan Bayi dan Anak		Puskesmas Ramah Anak; Puskesmas mampu tata laksana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA);		Rp 208.510.000	DAK NonFisik; APBN; APBD I; DAU	Dinas Kesehatan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pencegahan Penyakit	Pencegahan Penyakit Menular	Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular	Peningkatan kemampuan dalam menanggulangi penyakit menular	Menurunnya jumlah penderita penyakit menular di masyarakat	Rp. 2.464.843.000	GF; DAU; DAK Penugasan: APBN	Dinas Kesehatan	GF; ViCtory; Yayasan Vesta Indonesia	2022
8	Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera	Pengembangan Kelembagaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera	Mengembangkan kelembagaan dan pembinaan keluarga sejahtera	Peningkatan kesejahteraan keluarga berencana	Pembentukan kampung KB, tiap desa.	Rp 23.407.185.000	DAK, APBD	DP3AKBPMD	Desa, Kecamatan, Seluruh PD, LSM, Dunia Usaha	2020-2024
9	Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender	Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Melindungi perempuan dan hak anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Pembuatan ruang bermain ramah anak, penerapan sekolah ramah anak dan kabupaten layak anak	Rp. 2.067.825.000	APBD	DP3AKBPMD	LSM, Polsek/Polres, Fasilitas kesehatan, desa. Kecamatan, Perangkat Daerah, dunia usaha	2020-2024
10	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS 1. Capacity Building petugas pendamping KUBE FM dan USEP KM	Meningkatkan kesejahteraan bagi fakir miskin, kelompok usaha bersama dan menjaga kearifan sosial	Terfasilitasinya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya	Tersedianya fasilitas masyarakat untuk lepas dari kemiskinan	Rp. 1.000.000.000	APBN, APBD	Dinsos	Kemensos, Dinsos DIY, Disperindag, DPP, Dinkes, Kecamatan, Desa, Praktisi	2020-2023 2020-2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Pendampingan seleksi BKK/PKH Graduasi								2020-2023
		3. Pelatihan ketrampilan usaha kelompok KUBE FM dan USEP KM								2020-2023
		4. Bimbingan Lanjut kelompok KUBE FM dan USEP KM								2020-2023
		Kearifan sosial/keserasian sosial								Rp. 1.000.000.000
11	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	Perlindungan dan jaminan sosial semakin baik	Masyarakat paham dan memanfaatkan akan perlindungan dan jaminan sosial	Rp. 450.000.000	APBN, APBD, CSR	Dinsos	Bappeda, bag. Kesra, Dukcapil, Dinkes, Dinas Pendidikan, kecamatan dan desa	2020-2023
		Pembentukan sekolah siaga bencana, komunitas siaga bencana, desa siaga bencana	Meningkatkan peran pelajar masyarakat dalam siaga bencana	Peningkatan kesadaran akan kebencanaan	Sekolah dan masyarakat menjadi garda terdepan dalam mitigasi bencana	Rp. 120.000.000	APBD, APBN	Dinsos	Dinsos, BPBD	2020-2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>pelayanan jaminan kesehatan khusus terpadu</p>	<p>Meningkatkan layanan jaminan kesehatan khusus secara terpadu</p>	<p>Peningkatan layanan jaminan kesehatan khusus bagi masyarakat</p>	<p>Tersedianya pelayanan jaminan kesehatan khusus terpadu yang berkualitas</p>	<p>Rp. 200.000.000</p>	<p>APBD</p>	<p>Dinsos, Dinkes, CSR, Kodim</p>	<p>PD terkait dan mitra</p>	<p>2020-2021</p>
12	<p>Peningkatan Rehabilitasi Sosial</p>	<p>Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengarusutamaan Disabilitas 1. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas 2. Pemberdayaan Keluarga Disabilitas 3. Pelatihan Servis Kursi Roda bagi Penyandang Disabilitas 4. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar</p>	<p>Meningkatkan rehabilitasi sosial dan pengarusutamaan disabilitas</p>	<p>Peningkatan kualitas hidup bagi penyandang masalah sosial</p>	<p>Tersedianya alat bantu disabilitas, Gedung Ramah Difable, amp Penampungan Gelandangan Pengemis dan Orang Terlantar, Mobil Truk untuk Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis</p>	<p>Rp. 900.000.000</p>	<p>APBD</p>	<p>Dinsos</p>	<p>PPDI, FKDG, BLK, PPDGI, FKDG, OHANA, Perangkat Daerah</p>	<p>2020-2023</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>5. Peningkatan Kapasitas Keluarga bagi Keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum</p> <p>6. Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat</p> <p>7. Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis</p>								
13	Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi	Penyelenggaraan pelayanan uji kendaraan bermotor	Meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan publik dan mengoptimalkan layanan publik berbasis digital	Penyediaan layanan pengujian kendaraan bermotor dengan smart card	Terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor dengan smart card untuk 6000 kendaraan wajib uji dan terpenuhinya target PAD pengujian kendaraan bermotor	Rp. 522.740.750	APBD	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjenhubdat (SRUT dan integrasi aplikasi BLUe); 2. Samsat (data kendaraan); 3. Karoseri kendaraan 4. BPD DIY (retribusi); 5. APM alat uji (main tenance); 	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									6. Masyarakat (pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji); 7. PD lain (dishub kab/kota) untuk numpang uji dan mutasi	
14	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL ITCS)	Meningkatkan kemampuan APILL ITCS dalam pelayanan lalu lintas	Peningkatan ketertiban di lokasi APILL	Menurunnya pelanggaran terhadap APILL	Rp. 400.000.000	APBD	Dinas Perhubungan	Diskominfo, Aparat Pegak Hukum (APH), swasta, dan Masyarakat	2020-2024
15	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perpustakaan	Pengelolaan penerangan jalan umum	Membangun infrastruktur dan memasarkan pariwisata melalui Penyediaan jaringan transportasi penunjang pariwisata	Penyediaan penerangan jalan umum pada ruas jalan menuju lokasi pariwisata	Terpasangnya 79 unit PJU Solar cell, meterisasi PJU 14 unit, dan terpeliharanya lampu penerangan jalan umum di jalan kabupaten, LPJU tenaga listrik merk Philips dengan sistem citytouch, server, internet, komputer/laptop/ android	Rp 13.457.246.000	APBD, DAK	Dinas Perhubungan	Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, PLN (pembayaran lisrik PJU tenaga listrik), Pihak ketiga (pengadaan LPJU), Diskominfo, TNI, POLRI, masyarakat	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	Meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana	Terbentuknya masyarakat yang tangguh terhadap bencana	Tersedianya aplikasi mitigasi bencana untuk bisa diakses masyarakat dan pelajar	Rp. 2.213.784.000	APBD	BPBD	Desa, masyarakat	2020-2024
17	Penegakan Peraturan Daerah	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda	Meningkatkan peran petugas dalam penyidikan dan penyelidikan pelanggaran perda	Peningkatan kualitas penyidikan dan penyelidikan	Penyidikan dan penyelidikan dapat segera ditindaklanjuti	Rp. 750.000.000	APBD	Satpol PP	Alat Penegak Hukum (APH)	2020-2024
		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda	Masyarakat sadar dan melaksanakan perda	Menurunnya kasus pelanggaran perda	Rp. 750.000.000	APBD	Satpol PP	Masyarakat, Desa, Kecamatan dan Alat Penegak Hukum (APH)	2020-2024
		Penertiban Cukai Illegal	Meningkatkan penertiban cukai illegal	Peningkatan kesadaran akan cukai illegal	Menurunnya cukai illegal	Rp. 700.000.000	APBD	Satpol PP	Kantor Bea Cukai DIY	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatkan Pemeliharaan dan Pengendalian Tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan pelayanan petugas kepada masyarakat	Semakin terjaganya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rp 14.750.000.000	APBD	Satpol PP	Pelajar, masyarakat, ASN,THL, pelaku usaha, ormas, PGOT, perangkat desa, POLRI, TNI, Disdikpora, Dinsos GK, Dinsos DIY, Pol PP DIY, SRI, DPMPT, Dispar, satpol PP Bali, Satpol PP Lombok, Satpol PP Surabaya, Kemendagri, Satpol PP Wonogiri, Satpol PP Sukoharjo, Satpol PP Klaten, Satpol, PP Solo, Satpol PP Cilacap, Satpol PP Semarang	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengembangan Kesamaptaan, Pengamanan, Pengawasan, Penjagaan, dan Patroli	Meningkatkan Kesamaptaan, Pengamanan, Pengawasan, Penjagaan, dan Patroli	Peningkatan pelayanan petugas kepada masyarakat	Kemampuan petugas dalam Kesamaptaan, Pengamanan, Pengawasan, Penjagaan, dan Patroli	Rp. 2.500.000.000	APBD	Satpol PP	Pelajar, masyarakat, ASN, THL, pelaku usaha, ormas, PGOT, perangkat desa, POLRI, TNI, Disdikpora, Dinsos GK, Dinsos DIY, Pol PP DIY, SRI, DPMPT, Dispar, satpol PP Bali, Satpol PP Lombok, Satpol PP Surabaya, Kemendagri, Satpol PP Wonogiri, Satpol PP Sukoharjo, Satpol PP Klaten, Satpol, PP Solo, Satpol PP Cilacap, Satpol PP Semarang	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Peningkatan Keamanan dan Keyamanan Lingkungan	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan masyarakat dan SAR	Meningkatkan kemampuan Satuan Pemberdayaan Masyarakat dan SAR	Peningkatan pelayanan Satlinmas dan SAR	Meningkatnya peran satlinmas dan SAR dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 300.000.000	APBD	Satpol PP	Linmas dan SRI	2020-2024
		Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan masyarakat dan SAR	Meningkatkan pelayanan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	Peningkatan pelayanan Satlinmas dan SAR		Rp 13.750.000.000	APBD	Satpol PP	SAR, tokoh keagamaan, POLRES, KODIM, BASARNAS, Pol PP DIY, POLAIRUD, Pokdarwis, nelayan	2020-2024
20	Info Eksekutif	Pembuatan Aplikasi	Meningkatkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat	Peningkatan pelayanan RSUD	Kepuasan pelanggan RSUD meningkat	Rp. 100.000.000	Dana BLUD	RSUD WONO SARI	Kominfo	2020-2021
21	Perbaikan persediaan Obat	Pengembangan Aplikasi yang udah ada	Meningkatkan koordinasi ketersediaan obat	Peningkatan pelayanan RSUD	Kepuasan pelanggan RSUD meningkat	Rp. 50.000.000	Dana BLUD	RSUD WONO SARI	Kominfo	2020-2021
22	security Database Pasien	Aplikasi	Meningkatkan keamanan database pasien	Peningkatan pelayanan RSUD	Kepuasan pelanggan RSUD meningkat	Rp. 100.000.000	Dana BLUD	RSUD WONO SARI	Kominfo	2020-2021

7.4. PETA JALAN SMART SOCIETY

Tujuan Peta Jalan yang mendukung Smart Society, antara lain adalah:

1. Meningkatkan SNP jenjang PAUD, SD, dan SMP
2. Mempermudah penyusunan laporan dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan sekolah
3. Mempermudah pengelolaan data pokok pendidikan sehingga dapat terinventaris menjadi satu - satunya data yang akurat dan relevan
4. Memberikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dilaksanakan di satuan pendidikan
5. Memberikan update informasi di masing - masing satuan pendidikan
6. Memperlancar dan memberikan informasi terkait dengan penataan dan pemetaan guru maupun tenaga kependidikan
7. Meningkatkan proses layanan pendidikan secara cepat, tepat, dan akurat
8. Mempercepat proses pengelolaan hingga penilaian SPM serta meminimalisir kelalaian ataupun kesalahan data secara manual karena sudah terakomodir dalam aplikasi SPMSNP
9. Menyiapkan peserta didik dalam menghadapi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)
10. Memberikan layanan pendidikan dasar dan menengah terkait dengan pembelajaran kelas internasional
11. Tertib Administrasi Perangkat Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola yang baik.
12. Meningkatkan pelayan informasi perpustakaan dan Memudahkan masyarakat mengakses bacaan tanpa harus datang ke Perpustakaan Daerah
13. Gunungkidul sebagai tujuan utama pariwisata dengan kondisi medan dan geografisnya berpotensi menjadi basis penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang baik melalui jalur darat maupun laut
14. Memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka P4GN
15. Perlunya kewaspadaan terhadap keberadaan Ormas yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip NKRI
16. memfasilitasi kegiatan bermain anak, memperkenalkan anak dalam bidang Seni, budaya dan edukasi pendidikan anak.

Adapun Tahapan dan penjabaran peta jalan Smart Society Kabupaten Gunungkidul, selengkapnya disajikan dalam tabel 22. Peta Jalan Smart Society berikut

Tabel 22. Peta Jalan SMART SOCIETY

No	Program Kerja	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah : Melalui pemetaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) jenjang PAUD, SD, dan SMP menggunakan aplikasi EDS (Evaluasi Diri Sekolah)	Meningkatkan SNP jenjang PAUD, SD, dan SMP	Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP	Presentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPd, dan Resntra PD terhadap RPJMD	Rp. 3.194.954.000	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan BanSM dan BanPaud-PNF Pusat dan Propinsi	2020-2024
		Pengendalian Internal Perangkat Daerah : Melalui mekanisme pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan pengelolaan dana BOS Pusat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Sekolah (SIPKS)	Mempermudah penyusunan laporan dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan sekolah	Satuan pendidikan jenjang SD dan SMP	Jumlah sekolah yang dapat menyelesaikan rencana pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS), RAPBS Perubahan, APBS Perubahan, penatausahaan, dan pengelolaan dana BOS	Rp. 713.125.400	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan PDSPK dan Setditjen Dikdas men Kemdik bud	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah :								
		- Kegiatan Workshop Pengelolaan Aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan) jenjang TPA, SPS, KB, TK, SD, dan SMP	Mempermu dah pengelolaan data pokok pendidikan sehingga dapat terinventaris menjadi satu - satunya data yang akurat dan relevan	Satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP memiliki output data pokok pendidikan yang terpercaya	Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop Pengelolaan Dapodik jenjang TPA, SPS, KB, TK, SD, dan SMP	Rp. 4.998.065.900	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Tim Manajemen Dapodik Setditjen Paud-PNF, Setditjen Dikdas men, dan Dirjen GTK Kemdikbud	2020-2024
		- Kegiatan Workshop Pengelolaan Website Sekolah jenjang TPA, SPS, KB, TK, SD, dan SMP	Memberikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dilaksanakan di satuan pendidikan	Kegiatan di satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP dapat terekspose secara menarik	Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan Website Sekolah jenjang TPA, SPS, KB, TK, SD, dan SMP		PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Kominfo, dan ICT Center Kabupaten Gunungkidul	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Kegiatan Workshop Pengelolaan Teknologi Informasi jenjang TPA, SPS, KB, TK, SD, dan SMP	Memberikan <i>update</i> informasi di masing - masing satuan pendidikan	Satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP	Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan Teknologi Informasi jenjang TPA, SPS, KB, TK, SD, dan SMP		PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Bappeda, Kominfo, dan ICT Center Kabupaten Gunungkidul	2020-2024
		- Kegiatan Workshop Sistem Informasi Manajemen Penataan dan Pemetaan Guru (SIMPEG)	Memperlancar dan memberikan informasi terkait dengan penataan dan pemetaan guru maupun tenaga kependidikan	Mengakomodir penataan dan pemetaan guru serta tenaga kependidikan secara merata	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang sudah terpetakan secara relevan	Rp. 93.600.000	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Dirjen GTK Kemdikbud	2020-2024
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Publik : Melalui Unit Layanan Terpadu (ULT)	Meningkatkan proses layanan pendidikan secara cepat, tepat, dan akurat	Seluruh warga masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dunia pendidikan Gunungkidul	Jumlah pelayanan yang terselesaikan melalui Unit Layanan Terpadu	Rp. 1.601.654.000	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan PDSPK dan ULT Kemdikbud	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) : Melalui aplikasi SPMSNP	Mempercepat proses pengelolaan hingga penilaian SPM serta meminimalisir kelalaian ataupun kesalahan data secara manual karena sudah terakomodir dalam aplikasi SPMSNP	Satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP	Jumlah dokumen pendataan dan monev capaian SPM yang terselesaikan	Rp. 86.908.600	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Dikpora Kerjasama dengan PDSPK Kemdikbud	2020-2024
3	Program Pendidikan Dasar SMP	Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP								
		- Melalui worskhop CBT (<i>Computer Based Test</i>)	Menyiapkan peserta didik dalam menghadapi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)	Terlaksananya kegiatan CBT secara transparan	Jumlah peserta yang lulus dalam workshop CBT	Rp. 2.800.343.440	PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	Dinas Dikpora Kerjasama dengan ICT Center Kabupaten Gunungkidul	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		- Melalui workshop UKG (Uji Kompetensi Guru)	Menyiapkan dan meningkatkan kapabilitas kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik	Tenaga pendidik mampu memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan soal ujian	Jumlah peserta yang lulus dalam workshop penyusunan soal mengacu pada indikator UNBK dan UKG		PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Dirjen GTK Kemdikbud	2020-2024
		- Melalui workshop PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Memberikan pelayanan secara transparansi dan efisiensi dalam pendaftaran PPDB secara <i>online</i> dan tanpa berbayar	Terlaksananya kegiatan PPDB berbasis zonasi secara <i>online</i> , sehingga meminimalisir adanya intervensi dari pihak lain	Jumlah sekolah yang melaksanakan PPDB		PAD & DAU	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	Dinas Dikpora Kerjasama dengan Tim Manajemen Dapodik Setditjen Dikdasmen dan PDSPK Kemdikbud	2020-2024
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<i>Google for Education - Model Pembelajaran 4.03</i>	Memberikan layanan pendidikan dasar dan menengah terkait dengan pembelajaran kelas internasional	SD, SMP dan SMA	Tercapainya model pembelajaran kelas Internasional	Rp. 607.500.000	Google dan APBD	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dengan Tim Google Indonesia	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1) Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan (15.02); 2) Pengelolaan Informasi dan Layanan Perpustakaan (15.03)								2020-2024
		a. Onlice Public Access Catalogue (OPAC) / Katalog online	Kemudahan bagi pengguna layanan perpustakaan untuk mengakses katalog sesuai judul/pengarang yang dibutuhkan secara online, sebelum datang ke perpustakaan daerah	Masyarakat pengguna layanan perpustakaan	Penambahan jumlah pengguna layanan perpustakaan	Rp. 105.600.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerja sama dengan PT Media Terutama untuk program aplikasi dan pemeliharaan atau update featurenya	2020-2024
		b. Layanan internet dan hot spot gratis	Kemudahan masyarakat untuk mengakses wifi gratis dan hot spot di Perpustakaan Kabupaten	Pengguna layanan internet dan wifi / hot spot	Penambahan jumlah pengguna layanan internet, wifi, dan hot spot	Rp. 107.800.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerjasama dengan Kominfo, sebelumnya dengan pihak ketiga secara berbayar	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Layanan Game Edukasi	Melatih dan menstimulasi anak untuk mengenal TIK sejak dini melalui permainan edukatif berbasis TIK atau Game Edukasi	emustaka kecil	Anak terdorong belajar mengenal TIK karena permainan yang dikemas dengan unsur edukatif	Rp. 10.000.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerja sama hibah program aplikasi game edukatif dengan BPAD DIY	2020-2024
		d. Perpustakaan Digital "epusdagunungkidul"	Memudahkan masyarakat mengakses bacaan tanpa harus datang ke Perpustakaan Daerah karena aplikasi dalam bentuk digital melalui HP android dan Perangkat komputer, asalkan terhubung dengan internet	Masyarakat Gunungkidul dimanapun dan kapanpun	Bertambahnya jumlah anggota dan jumlah kunjungan pada aplikasi epusdagunungkidul	Rp. 10.750.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerja sama dengan PT Enam Kubuku Resources	2020-2024
		e. SMS gateway Penagihan Buku	Kemudahan dan upaya pencegahan dalam pengontrolan aset buku, untuk meminimalisir potensi buku aset yang hilang karena dipinjam pemustaka	Pemustaka peminjam buku	Menurunnya jumlah dan potensi buku aset yang hilang/tidak kembali karena dipinjam pemustaka	Rp. 14.000.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerjasama dengan PT Media Terutama untuk program aplikasi dan pemeliharaannya	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		f. Aplikasi Kunang-Kunang	Kemudahan dalam pendataan jumlah kunjungan yang mengakses wifi gratis dan hot spot di Perpustakaan Kabupaten dan Perpustakaan Desa	Pengguna layanan internet dan wifi / hot spot	Penambahan jumlah pengguna layanan internet, wifi, dan hot spot	Rp. 10.000.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerjasama dengan Program PerpuSeru CCFI untuk jaringan wifi dan program aplikasinya	2020-2024
		g. Blind Corner	Kemudahan bagi penyandang disabilitas khususnya tuna netra, untuk dapat mengakses internet melalui perangkat komputer bicara, buku bicara dan aplikasinya	Pengguna layanan perpustakaan khususnya penyandang disabilitas tuna netra	Penambahan pengunjung layanan dari unsur masyarakat penyandang disabilitas	Rp. 15.000.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Proses kerjasama akses program hibah buku audio (buku bicara) dan Alqur'an Braille dengan Balai Literasi Braille Indonesia di Bandung	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1) Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan (15.02); 2) Pengelolaan Informasi dan Layanan Perpustakaan (15.03)								2020-2024
		a. Onlice Public Access Catalogue (OPAC) / Katalog online	Kemudahan bagi pengguna layanan perpustakaan untuk mengakses katalog sesuai judul/pengarang yang dibutuhkan secara online, sebelum datang ke perpustakaan daerah	Masyarakat pengguna layanan perpustakaan	Penambahan jumlah pengguna layanan perpustakaan	Rp. 10.000.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerjasama dengan PT Media Teratama untuk program aplikasi dan pemeliharaan atau update feature-nya	2020-2024
		b. Layanan internet dan hot spot gratis	Kemudahan masyarakat untuk mengakses wifi gratis dan hot spot di Perpustakaan Kabupaten	Pengguna layanan internet dan wifi / hot spot	Penambahan jumlah pengguna layanan internet, wifi, dan hot spot	Rp. 10.000.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerjasama dengan Kominfo, sebelumnya dengan pihak ketiga secara berbayar	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Layanan Game Edukasi	Melatih dan menstimulasi anak untuk mengenal TIK sejak dini melalui permainan edukatif berbasis TIK atau Game Edukasi	Pemustaka kecil	Anak terdorong belajar mengenal TIK karena permainan yang dikemas dengan unsur edukatif	Rp. 1.500.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerjasama hibah program aplikasi game edukatif dengan BPAD DIY	2020-2024
		d. Perpustakaan Digital " <i>epusdagunungkidul</i> "	Memudahkan masyarakat mengakses bacaan tanpa harus datang ke Perpustakaan Daerah karena aplikasi dalam bentuk digital melalui HP android dan Perangkat komputer, asalkan terhubung dengan internet	Masyarakat Gunungkidul dimanapun dan kapanpun	Bertambahnya jumlah anggota dan jumlah kunjungan pada aplikasi epusdagunungkidul	Rp. 10.000.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerjasama dengan PT Enam Kubuku Resources	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		e. SMS gateway Penagihan Buku	Kemudahan dan upaya pencegahan dalam pengontrolan aset buku, untuk meminimalisir potensi buku aset yang hilang karena dipinjam pemustaka	Pemustaka peminjam buku	Menurunnya jumlah dan potensi buku aset yang hilang/tidak kembali karena dipinjam pemustaka	Rp. 4.000.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerja sama dengan PT Media Terutama untuk program aplikasi dan pemeliharannya	2020-2024
		f. Aplikasi Kunang-Kunang	Kemudahan dalam pendataan jumlah kunjungan yang mengakses wifi gratis dan hot spot di Perpustakaan Kabupaten dan Perpustakaan Desa	Pengguna layanan internet dan wifi / hot spot	Penambahan jumlah pengguna layanan internet, wifi, dan hot spot	Rp. 10.000.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Kerjasama dengan Program PerpuSeru CCFI untuk jaringan wifi dan program aplikasinya	2020-2024
		g. Blind Corner	Kemudahan bagi penyandang disabilitas khususnya tuna netra, untuk dapat mengakses internet melalui perangkat komputer bicara, buku bicara dan aplikasinya	Pengguna layanan perpustakaan khususnya penyandang disabilitas tuna netra	Penambahan pengunjung layanan dari unsur masyarakat penyandang disabilitas	Rp. 10.000.000	APBD Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gk	Proses kerja sama akses program hibah buku audio (buku bicara) dan Alqur'an Braille dengan Balai Literasi Braille Indonesia di Bandung	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Perangkat Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola yang baik.	PD serta buatan Gunungkidul Sebanyak 47 buah.	Terwujudnya Keberhasil Pengelolaan arsip yang bagus.	Rp. 41.495.000	APBD tingkat II	DPK	~	2020-2024
		Pembinaan dan Pendampingan Kearsipan Perangkat Desa	Tertib Administrasi Perangkat Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola yang baik di Desa	18 Desa	Terwujudnya Keberhasil Pengelolaan arsip yang bagus.	Rp. 19.740.000	APBD tingkat II	DPK	~	2020-2024
		Penerbitan Buletin Kearsipan	Terbitnya Buletin Kearsipan setiap Semester	Buletin	Terbitnya Buletin Kearsipan	Rp. 10.300.000	APBD tingkat II	DPK	~	2020-2024
		Penyesutan Arsip	Mengurangi Jumlah Arsip yang tidak Berfungsi	2 PD	Tersusutnya Jenis Arsip di 2 PD	Rp. 8.360.000	APBD tingkat II	DPK	~	2020-2024
		Sosialisasi Ormas	Tesosialisasinya Arsip Pengelolaan	Ormas yang ada di Gunungkidul	Terlaksananya Sosialisasi	Rp. 2.254.000	APBD tingkat II	DPK	~	2020-2024
		Akuisisi Arsip/Tokoh	Mempertahankan Budaya Tokoh/Arsip	2 Tokoh/ 2 PD	Terlaksananya Akuisisi	Rp. 27.670.000	APBD tingkat II	DPK	~	2020-2024
		Perserfasi Arsip	Terpeliharanya Arsip	Arsip yang rusak	Terpeliharanya Arsip	Rp. 14.000.000	APBD tingkat II	DPK	~	2020-2024
		Pameran Kearsipan	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Arsip	Masyarakat	Terlaksananya Pameran	Rp. 12.250.000	APBD tingkat II	DPK	~	2020-2024
		Sosialisasi Kearsipan di SMP	Meningkatkan Pemahaman tentang Arsip	10 Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi di 10 Sekolah	Rp. 5.700.000	APBD tingkat II	DPK	~	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial	Pembinaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penyuluhan penyalahgunaan narkoba	Gunungkidul sebagai tujuan utama pariwisata dengan kondisi medan dan geografisnya berpotensi menjadi basis penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang baik melalui jalur darat maupun laut	Pelajar/Generasi muda dan Masyarakat	- Jumlah masyarakat yang memahami dampak negatif penyalahgunaan narkoba; - Masyarakat ikut peduli terhadap adanya potensi peredaran gelap narkoba	Rp. 180.365.000	APBD	Badan Kesbangpol	Polres, Dinkes, BNK, Pondok Rehabilitasi ELKANA	2020 - 2023
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Masyarakat Gunungkidul dari aspek socio kultural dapat dikatakan relatif homogen, tetapi dalam hal peribadatan sesuai keyakinannya ada potensi konflik yang setiap saat dapat terpicu menjadi konflik sosial	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda Agama	Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama	Rp. 115.640.000	APBD	Badan Kesbangpol	Kemenag, FKUB	2020 - 2023
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kemajuan teknologi dan perkembangan jaman berkorelasi dengan lunturnya semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air	Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, Perang kat Desa, Lembaga Desa, Generasi Muda	Jumlah masyarakat yang memahami arti penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme	Rp. 157.395.000	APBD	Badan Kesbangpol	TNI, POLRI, KPU, Bawaslu	2020 - 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial. Sub Kegiatan: 1) Pembinaan dan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN); 2) Lomba film pendek P4GN	Memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka P4GN	Pelajar/ Generasi muda dan Masyarakat	1) Jumlah Masyarakat yang memahami dampak negatif penyalahgunaan narkoba; 2) Masyarakat ikut peduli terhadap adanya potensi peredaran gelap narkoba	Rp. 180.365.000	AP BD	Badan Kesbang pol	Polres, Dinkes, BNK, Pondok Rehabilitasi ELKANA	2020-2024
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (KUB). Sub Kegiatan: 1) Deklarasi KUB; 2) Pembinaan KUB;	Meningkatkan pemahaman dan saling pengertian serta mendorong partisipasi dan kerjasama umat beragama dalam memperkuat dasar dasar KUB guna membangun dan memelihara harmoni sosial dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda Agama	Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama	Rp. 115.640.000	AP BD	Badan Kesbang pol	Kemenag, FKUB	2020-2024
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan. Sub Kegiatan: 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	Menumbuhkan semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental berazaskan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan menjaga keutuhan NKRI	Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, Perangkat Desa, Lembaga Desa, Generasi Muda	Jumlah masyarakat yang memahami arti penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme	Rp. 157.395.000	AP BD	Badan Kesbang pol	TNI, POLRI, KPU, Bawaslu	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan/ LSM	Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM	Perlunya kewaspadaan terhadap keberadaan Ormas yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip NKRI	Organisasi Kemasyarakatan dan LSM di Kab. Gunungkidul	Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan	Rp. 147.774.000	APBD	Badan Kesbangpol		2020-2023
		Penyuluhan pendidikan politik	Apatisme masyarakat dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara	Pelajar yang sudah mempunyai hak pilih/ Generasi muda dan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Rp. 198.910.000	APBD	Badan Kesbangpol	KPU, Bawaslu	2020-2023
9	Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	11 Tema sumber sejarah yang direvitalisasi	Memberi pengetahuan tentang sejarah Wayang Beber, Sejarah Upacara Adat/Bersih Desa, Pedalangan Gagrag Ngayogyakarta serial Baratayuda versi Ki Semun Cermojoyo episode 3 dan 4, Lomba Cerdas Cermat Sejarah	Guru dan Masyarakat memahami dan melaksanakan sesuai pembinaan yang telah diikuti	Rp. 625.000.000	BKK DANAIS	Dinas Kebudayaan	Guru, Penulis, masyarakat	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan dan Pengelolaan Permeseuman	Kunjungan Museum sebagai ODTW	Study Kelayakan Pendirian Museum, Cerdas Cermat Permeseuman	Dokumen Pengadaan tanah tersedia dan siswa yang dikutkan lomba menjadi juara	Rp. 443.438.560	BKK DANAIS	Dinas Kebudayaan	Peneliti UGM, masyarakat	2020 - 2024
10	Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pengelolaan Permeseuman	Pembebasan Tanah untuk Museum dan Lomba cerdas cermat museum	Pendirian Museum, Cerdas Cermat Permeseuman	Dokumen Pengadaan tanah dan siswa yang dikutkan lomba menjadi juara	Rp 15.350.000.000	BKK DANAIS	Dinas Kebudayaan	Peneliti UGM, masyarakat	2021
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Cagar Budaya dan Warisan Budaya dilestarikan	Promosi Cagar Budaya, Pemugaran Bangsal Sewokoprojo tahap 2, pengembangan situs Stasiun AURI	Cagar Budaya dan Warisan Budaya menjadi OTW	Rp. 4.400.000.000	BKK DANAIS	Dinas Kebudayaan	Rekanan Pengadaan dan Masyarakat	2021
		Pembentukan "Kampung Dolanan Anak (KADO ANAK)" di Rintisan Desa Budaya	memfasilitasi kegiatan bermain anak, memperkenalkan anak dalam bidang Seni, budaya dan edukasi pendidikan anak,	festival permainan tradisional, penguatan Dewan Kebudayaan tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan, festival permainan tradisional, penguatan Dewan Kebudayaan Tingkat Kecamatan		APBD, APBDes	Kecamatan, Rintisan Desa Budaya	Dinas Kebudayaan, DP3KBPM &D, Rintisan Desa Budaya, Masyarakat	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan, Seni dan Tradisi	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	Gelar potensi dan pembuatan film dokumenter Rintisan Desa Budaya	Gelar potensi dan pembuatan film dokumenter 20 Rintisan Desa Budaya	Rp. 2.300.000.000	BKK DANAIS	Dinas Kebudayaan	Masyarakat , Desa Rintisan Budaya dan rekanan pengan daan	2021
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	Pembangunan Fisik Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	Telaksananya Pembangunan Fisik Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	Rp 70.438.233.000	BKK DANAIS	Dinas Kebudayaan	Masyarakat	2021

7.5. PETA JALAN SMART BRANDING

Tujuan Peta Jalan yang mendukung Smart Branding, antara lain adalah:

1. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata
2. Meningkatkan Pengembangan Dan Efisiensi Perdagangan
3. Meningkatkan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Adapun Tahapan dan penjabaran peta jalan Smart Branding Kabupaten Gunungkidul, selengkapnya disajikan dalam tabel 7.1. Peta Jalan Smart Branding berikut

Tabel 23. Peta Jalan SMART BRANDING

No	Program Kerja	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan dan Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata	Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Jumlah destinasi wisata dengan prasarana dan sarana lengkap	Rp. 2.025.230.500	APBD	Dinas Pariwisata	Desa-Kecamatan, Poldes, Dishub, Pokdarwis dll	2020-2024	
		1. Penyelenggaraan event									
		2. Pembinaan Pegawai dan Orientasi lapangan									
		3. Operasional pos retribusi									
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Destinasi Pariwisata	Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata	Sarana dan prasarana wisata lengkap			Rp. 9.000.000.000	APBD	Dinas Pariwisata		2020-2024
		1. Paket pekerjaan sarana dan prasarana									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	Pembinaan Kelembagaan Pariwisata	Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata	Kelembagaan dan industri pariwisata yang solid dan profesional	Indeks peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata (pokdarwis dikukuhkan, desa wisata ditetapkan, pelaku usaha pariwisata berstandar)	Rp. 850.000.000	APBD	Dinas Pariwisata	PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa-Kecamatan , dll	2020-2024
		1. Pembinaan Pokdarwis								
		2. Pembinaan Desa Wisata								
		3. Sosialisasi Geopark								
		4. Kampanye Sadar Wisata								
		5. Diksar Saka Pariwisata								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengembangan Industri Pariwisata	Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata	Kelembagaan dan industri pariwisata yang solid dan profesional	Indeks peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata (pokdarwis dikukuhkan, desa wisata ditetapkan, pelaku usaha pariwisata berstandar)	Rp. 1.342.995.000	APBD	Dinas Pariwisata	PHRI, HPI, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa, Kecamatan, dll	2020-2024
		1. Forkom pelaku usaha								
		2. Pelaksanaan lomba lomba								
		3. Seminar kepariwisataan								
		4. Standar Usaha Pariwisata								
3	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata	Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Persentase terlaksananya promosi	Rp. 2.500.000.000	APBD	Dinas Pariwisata	PHRI, HPI, BPPD, Desa, Kecamatan, dll	2020-2024
		Sub Kegiatan :								
		1. Travel Dialog								
		2. Fam Tour								
		3. Pameran/Travel fair								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Penyelenggaraan event								
		5. Promosi melalui Media								
		6. Pembuatan materi/ bahan promosi								
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata	Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata	Usaha pariwisata yang berkembang dan legal	Persentase terlaksananya pembinaan SDM Bidang Pariwisata	Rp. 500.000.000	APBD	Dinas Pariwisata	PHRI, HPI, BPPD, Desa-Kecamatan, dll	2020-2024
		1. Sosialisasi dan Pembinaan TDUP								
		2. Pelatihan dan pembinaan UEK								
		3. Forkom Usaha Pariwisata								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Peningkatan Pengembangan Dan Efisiensi Perdagangan	Pengembangan Pasar Dan Promosi Produk Daerah				Rp. 787.600.000		Disperidag		2020-2024
		1. Pameran Produk Unggulan Daerah (offline) Ubi Kayu			Pameran Produk Unggulan Daerah (offline) Ubi Kayu		APBD	Disperidag	Disperindag DIY, Dinas Kebudayaan GK dan Dinas Pariwisata GK	2020-2024
		2. Pengembangan data base IKM (online)		Internet	Pengembangan data base IKM (online)		APBD	Disperidag	Kominfo	2020-2024

7.6. PETA JALAN SMART ECONOMY

Tujuan Peta Jalan yang mendukung Smart Economy, antara lain adalah:

1. Memberi informasi kondisi iklim, cuaca, OPT, data penyakit ternak, sarana prasarana serta harga komoditas pertanian
2. Mengenalkan pertanian pada kaum milenial
3. mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak
4. Mendorong Perkembangan Industri Kecil Menengah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal
6. Meningkatkan peluang investasi berbasis potensi unggulan daerah
7. SOP Pelatihan budidaya

Adapun Tahapan dan penjabaran peta jalan Smart Economy Kabupaten Gunungkidul, selengkapnya disajikan dalam tabel 24. Peta Jalan Smart Economy berikut

Tabel 24. Peta Jalan SMART ECONOMY

No	Program Kerja	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja sama	Timeli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kualitas penyuluhan	Peningkatan sistem informasi pertanian melalui SILA ANGGUN (Sistem Informasi Jendela Pertanian)	Menginformasikan kondisi iklim, cuaca, OPT, data penyakit ternak, sarana prasarana serta harga komoditas pertanian	Masyarakat petani	Terjadinya peningkatan produksi komoditas pertanian (padi, jagung, kedelai, bawang merah cabe) dan peningkatan produksi peternakan	Rp. 700.000.000	APBD	DPP	Kominfo, Balai Proteksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Stasiun Klimatologi, BPTP, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, BB Veteriner, PDHI (Persatuan Dokter Hewan Indonesia)	2020
		Peningkatan kualitas ketenagaan SDM Pertanian	Pengenalan pertanian pada kaum milenial	Peserta didik SMA/SMK	Meningkatnya jumlah taruna tani, 3 SMA/SMK	Rp. 450.000.000	APBD	DPP	Dinas Pendidikan,	2020
2	Pengembangan pendapatan daerah	Pelayanan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah	Memperudahkan dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak	Pegawai dan masyarakat objek pajak	Terlayannya secara cepat dan tepat pelayanan pajak dengan pemanfaatan e pelayanan pajak (SIMPEL/SISMIOP) dan Sistem Informasi Perizinan Online	Rp. 100.000.000	APBD	BKAD	Kominfo, Dukcapil, BPN, DPMPT	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunan data obyek dan subyek pajak daerah	Meningkatkan pendapatan pajak daerah	Pegawai dan masyarakat objek pajak	Terpasangnya alat monitoring pembayaran dan operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak SIPAPA (Sistem Informasi Pelayanan Pajak)	Rp. 50.000.000	APBD	BKAD	BPD, Satpol PP, DPMPT, Dukcapil	2020-2024
3	Pengembangan IKM	Pembinaan dan Pendampingan Industri Sandang Kulit Logam Aneka : 1. Pelatihan Batik , 2. Haki Batik, 3. Pelatihan Kerajinan Kain Perca Batik	Meningkatkan kualitas SDM perajin batik dan pengolah limbah bambu/kayu	Semakin berkualitasnya perajin batik dan pengolah kayu/bambu	Terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas produk batik dan olahan limbah kayu/bambu					2020-2024
		1. Pelatihan Batik				Rp. 240.000.000	APBD, APBD DIY	DISPERINDAG	Disperindag DIY, Balai Batik, kecamatan, desa, owner/ pengusaha batik	2024
		2. HKI Batik				Rp. 50.000.000	APBD, APBD DIY	DISPERINDAG	Disperindag DIY, Kemenkumham	2024
		3. Pelatihan Kerajinan Kain Perca Baik k				Rp. 200.000.000	APBD, APBD DIY	DISPERINDAG		2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan & Pendampingan Industri Hasil Hutan & Perkebunan Sub Kegiatan : Kerajinan Limbah Kayu & Limbah Bambu Mendukung Pariwisata								
		1. Pelatihan Kerajinan limbah kayu & limbah bambu				Rp. 625.000.000	APBD, APBD DIY	DISPER INDAG	Disperindag DIY, Kecamatan, dan Praktisi	2024
		2. Pelatihan Pengawetan bambu dan kayu Foodgrade				Rp. 25.000.000	APBD, APBD DIY	DISPER INDAG	Disperindag DIY, Praktisi	2022
4	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Pelayanan serta Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan sub kegiatan :	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	Kualitas pelayanan perizinan meningkat	Terjadinya peningkatan Jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan dan permohonan perizinan dan non perizinan, jumlah training terlaksana, jumlah sosialisasi terlaksana	Rp. 915.125.000	APBD Kabupaten	DPMPT	DPMPT, BKAD, BPD, Diskominfo	2020-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui SIMPEL (Sistem Informasi Perizinan Online) dan fasilitasi untuk OSS - Pelayanan Retribusi IMB - <i>Inhouse training</i> - Sosialisasi Perizinan 								
5	Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	<p>Penyelenggaraan promosi penanaman modal serta Pengembangan penanaman modal, dengan sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temu Bisnis Investor Daerah 	Meningkatkan peluang investasi berbasis potensi unggulan daerah	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Realisasi investasi nasional dan lokal	Rp. 750.550.000	APBD Kabupaten	DPMPT	DPMPT, BPD, Setda, Bappeda, BKAD, Diskominfo, Investor dan Calon Investor (pelaku usaha), akademisi dan praktisi usaha, asosiasi dan komunitas bisnis, perbankan	2020-2024
					Jumlah pengusaha yang terfasilitasi dalam temu bisnis investor daerah					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Materi Promosi Investasi - Penyusunan dokumen investasi Kab. Gunungkidul - Pelaksanaan workshop pengembangan investasi di Kab. Gunungkidul 			Jumlah materi promosi investasi yang tersedia Jumlah dokumen investasi Kab. Gunungkidul (Profil Investasi Sektor Pertanian) Jumlah workshop pengembangan investasi di Kab. Gunungkidul (40 pengusaha/investor x 1 kali)					
6	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM	Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM Sub Kegiatan : Pelatihan Digital Marketing Sub Kegiatan :	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan perekonomian daerah	Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Meningkatnya kualitas produk dan menguatnya kelembagaan UMKM, 81 UMKM	Rp. 15.500.000	APBD	Dinas Koperasi UKM	Ahli IT, praktisi	
		- Pendataan UMKM berbasis aplikasi (update data UMKM)				Rp. 516.720.000	APBD	Dinas Koperasi UKM	Penyedia barang/jasa, lembaga instansi terkait	2020
		- Pembuatan Sistem Informasi Usaha Mikro (aplikasi)				Rp. 150.000.000	APBD	Dinas Koperasi UKM	Penyedia barang/jasa, lembaga instansi terkait, Ahli IT, praktisi	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Program Peningkatan Kapasitas Koperasi	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Sub kegiatan : - Pelatihan Digitalisasi Koperasi	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan perekonomian daerah	Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Meningkatnya kapasitas koperasi, 191 koperasi	Rp. 17.500.000	APBD, DAK	Dinas Koperasi UKM	Ahli IT, praktisi	2022
		- Pembuatan Sistem Informasi Koperasi (aplikasi)							Penyedia barang/jasa, lembaga instansi terkait, Ahli IT, praktisi	2024
8	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Pembuatan video konten tentang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi kelompok hasil pengolahan dan pemasaran (poklamsar)	Meningkatkan kemampuan SDM kelompok pengolahan dan pemasaran ikan	Kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil olahan ikan yang akan meningkatkan omset	Rp. 300.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan	DEPKOMINFO	2020
		pembuatan video konten tentang pelatihan produk non konsumsi;	Meningkatkan pemasaran produk ikan	Kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pembuatan video konten kampanye makan ikan PAUD, TK,SD, Posyandu,Lansia dan PKK	Meningkatkan gemar makan ikan	Siswa PAUD, TK, SD, anggota Posyandu, lansia dan PKK	Terjadinya peningkatan konsumsi ikan di kalangan pelajar, balita dan lansia					
9	Pemberdayaan Nelayan	- Fasilitasi benih ikan untuk pengkayaan di Perairan Umum Daratan (PUD)	Meningkatkan populasi dan produksi ikan di pUD	Kelompok budidaya ikan dan masyarakat	Peningkatan populasi dan produksi ikan di perairan umum	Rp. 400.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan	POKMASWAS	2020
		pembuatan aplikasi untuk mengontrol produksi ikan di PUD								
		- Pembuatan video konten tentang manajemen usaha perikanan								
		- 'Pembuatan video konten tentang rencana usaha perikanan								
		- Pembuatan video konten tentang penanganan ikan di TPI	Meningkatkan higienitas ikan tangkapan	Nelayan	Peningkatan ikan layak jual dan layak konsumsi					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya - Fasilitasi budidaya mina padi - Pembuatan video konten tentang budidaya mina padi - Fasilitasi budidaya lele kawasan tertinggal dan hidroponik - Pembuatan video konten tentang budidaya lele kawasan tertinggal - Fasilitasi pengembangan lele intensif	Meningkatkan kemampuan kelompok dan petani ikan dalam mengembangkan usaha budidaya ikan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani ikan	Terjadi peningkatan produksi lele dengan harga yang menguntungkan petani ikan	Rp. 900.000.000	DAK	Dinas Kelautan dan Perikanan	POKDAKAN	2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan video konten tentang pengembangan lele intensif - Fasilitasi pembuatan pakan tambahan - Pembuatan video konten tentang pembuatan pakan tambahan 								
11	Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterampilan Pencari Kerja	Meningkatkan SDM tenaga terampil dan non terampil	Semakin banyak angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya	Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan angkatan kerja	Rp. 4.512.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PD, Kecamatan, Desa	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Program Pemberdayaan Pengerajin	Pelatihan mengukir batu	Meningkatkan SDM tenaga pengukir batu dan upaya pelestarian bekas area tambang	Kesejahteraan perajin/pengusaha batu ukir meningkat	Peningkatan produksi olahan batu dan terkonservasinya lahan bekas tambang	Rp. 250.000.000	APBD	Kec Ponjong	Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas KLH, Bagian Hukum Setda kab GK.	2020
		Fasilitasi peningkatan Penyediaan Bahan Baku batu ukir.						Kec Ponjong	Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas KLH, Bagian Hukum Setda kab GK.	2021
		Fasilitasi dan pelatihan bagi penambang untuk mengelola bekas tambang batu menjadi perkebunan (Konservasi)						Kec Ponjong	Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas KLH, Bagian Hukum Setda kab GK.	2022

BAB VIII QUICK WINS

Quick wins atau juga sering disebut *low-hanging fruit* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. *Quick wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Program percepatan (*Quickwins*) adalah suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. *Quick Wins* merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama, baik secara eksternal maupun internal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. *Quick Wins* diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri yang untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan image positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat menurunkan penilaian pesimis tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan 3 (tiga) Program *Quick wins* pada tahun 2019, yaitu Gunungkidul Cerdas, Ayunda Simenik Makan Segi Ceting, dan Pasar Digital Gunungkidul.

8.1. GUNUNGGKIDUL CERDAS

Gunungkidul Cerdas merupakan inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul dalam rangka meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pada aspek *community, learning, security* berbasis Teknologi Informasi.

1. Masalah yang diatasi dengan *Quick wins* Gunungkidul Cerdas adalah sebagai berikut:
 - a. Distribusi sekolah kategori berkualitas baik (guru, siswa, sarana prasarana, dll) masih terkumpul di daerah perkotaan. Perlu peningkatan kualitas diberbagai sekolah yang kualitasnya belum baik dengan membuka akses ke sumber daya sekolah yang sudah berkualitas baik.
 - b. Angka urbanisasi generasi muda Gunungkidul (rata-rata anak lulusan SD/SMP/SMK), saat ini dirasa masih tinggi. Mereka berfikir, Gunungkidul hanyalah tanah gersang yang

pelit memberikan harapan. (<https://gunungkidul.sorot.co/berita-99458-kurangi-urbanisasi-bupati-buka-lapangan-pekerjaan-di-sektor-pariwisata.html>).

- c. Mereka belum terbiasa berfikir kritis dan solutif bagaimana hidup di Gunungkidul.

2. Solusi atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan distribusi kualitas pendidikan yang belum merata, dapat disolusikan dengan implementasi *Google Suite for Education*. Paling tidak, minimal ada 3 pendekatan, yaitu: *Content Sharing*, *Teacher Sharing*, dan *Class sharing*.
 - i. *Content Sharing*: berbagi materi pembelajaran dari sekolah yang baik ke sekolah yang belum baik.
 - ii. *Teacher Sharing*: Guru-guru yang terbaik berbagi kepada guru-guru lain tentang *best practices* mengajar.
 - iii. *Class sharing*: Kelas bersama yang bisa diikuti dari berbagai sekolah secara realtime. materi sama, guru sama, sekolah dan kelas yg berbeda.
- b. Ketiadaan peta pendidikan yang *interaktif-integratif*, dapat diselesaikan dengan memanfaatkan Google Geo Tools (Google Maps, Google Earth, dll). Dimana nantinya, cukup di buat satu peta pendidikan, satu link peta pendidikan yang konten petanya merupakan hasil partisipasi aktif dari masing-masing sekolah (*add business on the Google Maps*). Masing-masing pemilik peta, bisa menambahkan informasi (teks, foto, maupun video) dan juga link komunikasi, sehingga terjadi komunikasi antara pencari informasi dengan sekolah.
- c. Berfikir kritis-logis-solutif perlu diajarkan sedari dini, sebagai upaya untuk bertahan hidup di abad 21 dan ditengah gegap gempitanya revolusi industri 4.0. Pemerintah pusat, melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, menangkap fenomena tersebut dengan mengeluarkan peraturan nomer 35, 36, dan 37 tahun 2018. Yang inti dari ketiga aturan tersebut adalah hadirnya kembali mata pelajaran informatika. Mata pelajaran ini, diharapkan menjadi sebagai salahsatu solusi menyiapkan generasi masa depan yang mempunyai kemampuan berfikir komputasional (*computer thinking*). Kemampuan ini

merupakan kemampuan yang mengajarkan tentang bagaimana mencari solusi dari suatu problem dengan pendekatan komputasional (logis). Bebras Indonesia mempunyai program untuk melatih itu melalui event *Bebras Challenge* dan Google juga memiliki kurikulum *Computer Science First* dalam rangka menumbuhkembangkan habit berfikir kritis-logis.

3. Link

- a. Implementasi *Google Suite for Education* dengan Chromebook
(<https://sites.google.com/refoindonesia.com/g-suite-implementation-yogya/home>)
- b. *Computer science first* (<https://csfirst.withgoogle.com>)
- c. Bebras Indonesia (<http://bebras.or.id>)

4. Kebutuhan dalam proses perumusan

- a. Perlunya pendataan sekolah yang terkategori baik dan layak menjalankan program duplikasi Gunungkidul Cerdas
- b. Perlunya pendataan sekolah yang belum terdaftar secara resmi di Google Maps, sebagai dasar peta pendidikan oleh masing-masing penanggung jawab sekolah
- c. Perlunya kebijakan implementasi mata pelajaran Informatika dari jenjang sekolah dasar, untuk membekali siswa kemampuan berfikir komputasional (*computational thinking*) sebagai bekal hidup di era Revolusi Industri 4.0.

5. Konsep inovasi awal quick wins Gunungkidul Cerdas

- a. Terwujudnya sekolah yang berhasil mengimplementasikan program Gunungkidul Cerdas kerjasama dengan Google Indonesia dalam pemanfaatan *Google Suite for Education*, serta didukung dengan penggunaan aplikasi-aplikasi terkait pendidikan sebagai berikut:
 - a) UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) dengan link akses aplikasi ult.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
 - b) SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dengan link akses aplikasi simpeg.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
 - c) DAPO/profil Pendidikan dengan link akses aplikasi profil.pendidikan.gunungkidulkab.go.id

- d) CBT (Computer best Test) dengan link akses aplikasi cbt.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- e) SIPKS (SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH) dengan link akses aplikasi sipksv2.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- f) UKG (UJI KOMPETENSI GURU)/ analisis kompetensi siswa terhadap kompetensi guru dengan link akses aplikasi ukg.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- g) PPDB ONLINE (PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU) dengan link akses aplikasi ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- h) Standar Pelayanan Minimal dengan link akses aplikasi spm.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- i) Standar Nasional Pendidikan (EDS/Evaluasi Diri Sekolah) dengan link akses aplikasi edsdikdas.pendidikan.gunungkidulkab.go.id dan edspaud-pnf-pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- j) Verval Dapodik --- dengan link akses aplikasi verval.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- k) SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dengan link akses aplikasi sipkd1.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- l) Data Pokok Pendidikan dengan link akses aplikasi Backbone.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- m) Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dengan link akses aplikasi sipbm.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- n) E-Rapor dengan link akses aplikasi rapor.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- o) E-Tugas dengan link akses aplikasi tugas.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- p) E-Parenting dengan link akses aplikasi parenting.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- q) E-Absensi dengan link akses aplikasi Absen.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
- r) Portal Integrasi Mobile presensi Gunungkidul (MOBSI) dengan Data Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) dengan link akses aplikasi MobsiDhgtk.pendidikan.gunungkidulkab.go.id

- b. Terealisirnya program duplikasi dari sekolah yang berhasil mengimplementasikan program Gunungkidul Cerdas ke sekolah-sekolah sasaran
- c. Terdatanya peta pendidikan yang interaktif-integratif di kabupaten Gunungkidul berbasis partisipasi aktif penanggung jawab masing-masing sekolah.
- d. Tersampainya materi kompetensi berfikir komputasional (*Computational Thinking*) ke siswa-siswa di Kabupaten Gunungkidul, sebagai dasar kecapakan hidup di Era Revolusi Industri 4.0 melalui implementasi mata pelajaran Informatika maupun ekstrakurikuler bermuatan Informatika
- e. Tahun 2019 telah diimplementasikan dengan menggunakan sistem *Google Suite for Education*, *Google Geo Tools*, dan *Computational Thinking*.

6. Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan

- a. Peningkatan Prestasi/Kualitas pendidikan
- b. Pengolahan Data: Tersedianya data peta pendidikan yang informatif-valid serta interaktif-integratif berbasis Google Maps. Untuk mendukung dapodik
- c. Pelayanan Publik: Masyarakat terbantu dengan informasi yang terintegrasi sekaligus interaktif serta lengkap mengenai data peta pendidikan di Kabupaten Gunungkidul

7. Implementasi Inovasi sedang berlangsung

- a. Pelatihan 30 guru terpilih dari 3 sekolah piloting
- b. Evaluasi implementasi ke-3
- c. Penentuan guru yang akan mengikuti sertifikasi Sertifikasi Pengajar Google Level 1 (*Google Certified Educator*)
- d.

8. Evaluasi dan rencana pengembangan

Saat ini, sekolah yang sudah siap mengimplementasikan Gunungkidul Cerdas berbasis Google Suite for Education dapat dikatakan sudah cukup banyak. Hal ini dikarenakan, ada beberapa event tentang sosialisasi dan implementasi Google Suite for Education yang dari tahun 2016 pernah dilakukan oleh Google Educator Group (GEG) Yogyakarta. Sekolah-sekolah tersebut yaitu:

Kelompok SD:

- 1) SDN Wonosari
- 2) SDN Karangrejek 2
- 3) SD Muhammadiyah Almujaahidin Wonosari
- 4) SD Muhammadiyah Wonosari
- 5) SDN Kamal
- 6) SDN Mulo I
- 7) SDN Piyaman III
- 8) SDN Singkar
- 9) SDN Wonosari IV
- 10) SDN Wonosari II
- 11) SDN Wareng

Kelompok SMP:

- 1) SMPN 1 Karangmojo
- 2) SMPN 2 Wonosari

Kelompok SMA/SMK:

- 1) SMAN 1 Playen
- 2) SMAN 1 Wonosari
- 3) SMAN 1 Panggang
- 4) SMAN 1 Tanjungsari
- 5) SMAN 1 Semin
- 6) SMAN 2 Wonosari
- 7) SMAN 2 Playen

9. Manfaat yang telah dirasakan saat ini:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga:

- i. Peningkatan kualitas pendidikan dengan distribusi konten pembelajaran, guru dan kelas bermutu.
- ii. Peta Pendidikan Untuk Zonasi Sekolah dan Dapodik berbasis *Google Geo Tools* (Google Maps, Google Earth, Google Tour Builder, dll);
- iii. Menyiapkan generasi yang cakap di abad 21 dan tanggap dengan tantangan revolusi industri 4.0 dengan membekali kemampuan berfikir komputasi (*computational thinking*) sedari dini siswa-siswa yang ada di kabupaten Gunungkidul.

- iv. Koordinasi tanpa jarak. Dengan teknologi *Google Suite for Education* yang sudah diimplementasikan, sangat dimungkinkan rapat-rapat koordinasi atau pemantauan dilakukan secara *online* menggunakan Google Meet/Google HangOut.
- b. Sekolah
 - i. Terbiasa dengan model pembelajaran yang menerapkan kompetensi abad 21 (*critical thinking, collaborative, creative, dan communication*)
 - ii. Terbiasa dengan pembelajaran berbasis *Cloud computing* sebagai salahsatu ciri dari pembelajaran di era revolusi industri 4.0
 - iii. Terbiasa memanfaatkan teknologi dalam rangka share informasi ke publik (Google Maps, Blogspot, Youtube, dll)
 - c. Masyarakat
 - i. Secara tidak langsung, nantinya akan lahir generasi-generasi Gunugkidul masa kini yang tidak phobia dengan teknologi dan mampu berfikir kritis-solutif terhadap permasalahan yang mendera.
 - ii. Terwujudnya masyarakat berbasis informasi (*information society*)
10. Keunikan kreativitas:
- a. Berbasis partisipasi aktif sekolah
 - b. Tidak memerlukan investasi *software*, cukup memanfaatkan *Google Suite for Education* yang mempunyai kemampuan: mudah diakses, kapasitas penyimpanan tak terbatas (*unlimited*)
 - c. Mempersiapkan generasi masa depan yang kritis-logis-solutif bukan hanya memetik apalagi mengkritik hasil akhir.
11. Kemitraan:
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul
 - b. Dinas Kominfo Gunungkidul
 - c. Google
 - d. Bebras Indonesia
 - e. Google Educator Group (GEG) Yogyakarta
 - f. Organisasi Profesi Guru (PGRI/IGI)
 - g. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)
 - h. Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
 - i. Pengawas sekolah (SD/MI,SMP/MTs, SMA/SMK)

12. Strategi untuk Pengembangan:

- a. Duplikasi bertahap dari 3 sekolah yang mengimplementasikan Gunungkidul Cerdas berbasis *Google Suite for Education* ke sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Gunungkidul
- b. Dikembangkan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri, sesama sekolah pengguna *Google Suite for Education (peer school)* yang merupakan salahsatu teknologi yang digunakan di Gunungkidul Cerdas. Pengalaman berkolaborasi dengan dunia luar negeri, tentunya akan membawa dampak tersendiri dalam menyiapkan generasi Gunungkidul yang berwawasan Global namun tetap berkepribadian lokal.

13. Strategi Menjaga Keberlangsungan:

Untuk menjaga keberlangsungan program ini, kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Disdikpora Kabupaten Gunungkidul, perlu membuat kebijakan/regulasi terkait keharusan mengimplementasikan Gunungkidul Cerdas di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya.
- b. Perlu dijalinnya kerjasama antar berbagai kelembagaan untuk memperlancar suksesi program Gunungkidul Cerdas. Misal: Kerjasama dengan Bebras Indonesia untuk mengadakan *Bebras Challenge* semacam Kuis Kihajar yang dilaksanakan secara lokal. Berkolaborasi dengan *Google Educator Group (GEG)* Yogyakarta yang merupakan kumpulan guru-guru yang dalam keseharian mengajarnya menerapkan teknologi dalam pembelajaran.
- c. Infrastruktur internet perlu di tingkatkan. Kebutuhan bandwidth internet sebagai darah darjalannya program Gunungkidul Cerdas. Dinas Kominfo mengambil peran strategis dalam hal ini. Dibuatkan event kompetisi setiap tahun yang mengukur suksesi implementasi Gunungkidul Cerdas.

14. Sumber daya yang Diperlukan:

- a. SDM (Guru, IT Admin)
- b. Koneksi Internet

c. ChromeBook

Gunungkidul Cerdas yang salah satunya berbasis *sistem Google Suite for Education*, membutuhkan campur tangan admin. Oleh karena itu diperlukan manajemen admin yang baik. Sehingga sistem dapat berjalan dengan aman dan terkendali. Perlu manajemen distribusi dan penggunaan ChromeBook sebagai salahsatu *device* yang digunakan untuk mengakses Gunungkidul Cerdas.

8.2 AYUNDA SIMENIK MAKAN SEGO CETING

Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting adalah akronim dari Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah Stunting, merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dengan keterlibatan banyak pihak baik Kantor Urusan Agama, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan Satgas 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).

1. Masalah yang diatasi dengan Quick wins Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting
 - a. Tingginya kasus pernikahan anak yang 90% diantaranya disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan, akibat pegaulan bebas, dan keterbatasan ekonomi masyarakat.
 - b. Indonesia saat ini tengah bermasalah dengan stunting. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2013 menunjukkan prevalensi stunting mencapai 37,2%. Prevalensi balita stunting di salah satu pukesmas, yaitu UPT Puskesmas Gedangsari II pada tahun 2016 adalah 31,41%; tahun 2017 37,16% ; dan setelah dilakukan upaya inovasi pada tahun 2018 sejumlah 21,31%.
2. Solusi atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Upaya menekan angka pernikahan usia anak masih berkelanjutan dengan menggalang kerjasama lintas sektor dalam pembelajaran PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), kursus pra nikah (di sekolah), kursus catin (calon Pengantin), penanganan masalah sosial masyarakat. Membuka klinik konsultasi remaja di Puskesmas, posyandu remaja.
 - b. (Kegiatan kursus pranikah di sekolah)

- c. Kerjasama lintas sektor dengan penandatanganan nota kesepakatan (MOU) untuk menekan angka perkawinan usia anak.
- d. *Outbond* dan *peer conseloor* PKPR
- e. Konsultasi kesehatan remaja melalui media sosial dengan petugas kesehatan Puskesmas
- f. Membuat ajang Gedangsari Award, merupakan penghargaan bagi desa yang berhasil menekan angka perkawinan pada usia anak sampai 0 (nol). Sekaligus menjadi media evaluasi capaian program dan menjadi dasar perbaikan kebijakan selanjutnya.
- g. Kampanye melalui lagu AYUNDA SI MENIK
- h. Membuat gerakan “Sego Ceting” (Semangat gotong Royong Cegah Stunting)
- i. Infaq telur
- j. Pembentukan satgas 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)
- k. Visual tanaman pekarangan dengan budidaya pohon kelor

3. Dukungan dan Inovasi:

- a. Dukungan dari lintas sektor, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat menjadikan inovasi ini kuat, ada payung hukumnya bisa berkelanjutan dan sudah direplikasi di beberapa wilayah.
- b. Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” menjadi inovasi yang esensinya adalah: Upaya yang dilakukan bersama untuk menekan angka pernikahan usia anak, dengan tujuan menekan resiko AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah). Kasus BBLR menjadi salah satu penyebab tingginya stunting selain kondisi Ibu hamil anemia, status gizi buruk, sanitasi lingkungan tidak sehat, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang masih rendah sehingga dengan semangat jiwa gotong royong seluruh komponen berupaya menurunkan angka stunting.
- c. Kabupaten Gunungkidul mulai tahun 2018 melakukan integrasi dalam proses pendataan. Integrasi dimulai dari instrument pendataan yang dikolaborasi tidak hanya indikator dalam PISPK tapi indikator PHBS, Kadarzi, Rumah Sehat dan Penyakit tidak menular. Selanjutnya hasil pendataan dimasukkan dalam Sistem Informasi Desa. Hasil

pendataan selanjutnya dilakukan analisis melalui Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB). Dengan data yang tersedia dan data tersebut berada di Desa, maka diharapkan semua pemangku kepentingan bisa melakukan intervensi secara terpadu terhadap permasalahan kesehatan. Desa dapat secara langsung melakukan perencanaan hasil pendataan tersebut sehingga anggaran desa memberikan kontribusi terhadap permasalahan kesehatan di desa tersebut.

4. Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan
 - a. Inovasi “Sego Ceting” (Semangat Gotong Royong Cegah Stunting): upaya bersama dengan jiwa gotong royong dan melibatkan semua usia dari bayi sampai lansia.
 - b. Bersama Dinas P3AKBPMD membentuk dusun binaan di Hargosari, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul: sebagai model upaya peningkatan derajat kesehatan, ekonomi dan kemandirian yang dilakukan oleh lintas sektor dan lintas program.
 - c. Anak sekolah dan remaja: : Menekan angka pernikahan usia anak dengan inovasi “Ayunda Si Menik” (Ayo Tunda Usia Menikah) dengan kegiatan: outbond PKPR, tablet tambah darah utk remaja putri, kursus caten, klinik konsultasi remaja, posyandu remaja, satgas 1000 HPK.
 - d. Balita dan anak pra sekolah: PSG (Pemantauan Status Gizi), SDIDTK(Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang).
 - e. Ibu hamil: pengawalan 1000 HPK sejak konsepsi sampai anak 2 tahun, Asi eksklusif, kelas Ibu Hamil, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Bumil KEK (Kekurangan Energi Kronis), Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak).
5. Implementasi Inovasi yang sedang berlangsung
 - a. Kegiatan kursus pranikah di sekolah
 - b. Calon pengantin di KUA
 - c. Rapat, pembentukan satgas
 - d. Visual tanaman pekarangan
6. Manfaat yang diperoleh:
 - a. Dinas Kesehatan
 - i. Penurunan presentase stunting bayi di Kabupaten Gunungkidul

- ii. Penurunan kasus pernikahan anak dan persalinan usia anak
 - iii. Cakupan imunisasi catin
 - iv. Menurunnya BBLR
 - v. Menurunnya AKI dan AKB
 - vi. Menurunnya kasus stunting
 - b. Sekolah
 - i. Mengurangi tingkat kehamilan pelajar dan kasus putus sekolah siswa karena menikah atau hamil
 - ii. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan remaja di kalangan siswa
 - iii. Siswa sehat bebas anemia
 - c. Masyarakat
 - i. Menurunnya kasus stunting yang terjadi di Gunungkidul
 - ii. Menurunnya kasus pernikahan anak di Gunungkidul
 - iii. Terwujudnya masyarakat sadar bahaya stunting
 - iv. Peningkatan derajat kesehatan, ekonomi, dan kemandirian masyarakat
7. Kreativitas:
- a. Konsultasi melalui media social yang menysasar pada pelajar pengguna hp
 - b. Lagu Ayunda Si Menik
 - c. Gedangsari Award
 - d. Infaq telur
 - e. Satgas 1000 HPK
8. Kemitraan:
- a. Dinas Pertanian Gunungkidul
 - b. Dinas Pemberdayaan Ppakbpmd
 - c. PLKB
 - d. KUA
 - e. Polsek
 - f. Koramil
 - g. Desa
 - h. MUI
 - i. LSM Rifka Annisa
 - j. ASTRA
 - k. STIKES Respati

Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting memungkinkan direplikasi di daerah lain secara nasional maupun internasional karena permasalahan yang dihadapi merupakan isu global dan

Tidak memerlukan dana yang besar. Selaras dengan tujuan dari SDGs. Inovasi program Ayunda Si Menik Makan Segi Ceting telah direplikasi di 8 kecamatan, diantaranya Patuk, Wonosari, Gedangsari, Nglipar, Panggang, Rongkop, Saptosari dan Playen.

Untuk menjaga keberlangsungan program ini, kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dukungan dari lintas sektor, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat menjadikan inovasi ini kuat, ada payung hukumnya bisa berkelanjutan dan sudah direplikasi di beberapa wilayah.
- b. Inovasi bisa berjalan jika semua bekerja dengan hati dan jiwa yang besar sehingga bisa memutus rantai masalah yang kompleks dan generasi mendatang cemerlang.

Diperlukan manajemen pemantauan dan pelaporan mengenai perilaku dan pergaulan siswa oleh sekolah dan masyarakat sebagai bentuk preventif kehamilan diluar nikah dan pergaulan bebas. Perlu manajemen pengumpulan dan penyaluran infak telur pada saat posyandu untuk memastikan akuntabilitas dan penyaluran telur yang tepat sasaran dan tepat guna

9. Sumber daya yang diperlukan

- a. Tenaga kesehatan Posyandu
- b. Tenaga kesehatan di Puskesmas
- c. Tenaga pendidik di sekolah
- d. Masyarakat
- e. Perangkat desa dan kecamatan
- f. KUA, Kemenag
- g. Anggota Polsek, Polres
- h. Anggota Koramil
- i. PKK Kecamatan, PKK Kabupaten
- j. PLKB

8.3. PASAR DIGITAL

Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata berupa kegiatan Pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata dengan membangun ekosistem Destinasi Digital, yaitu destinasi yang terbentuk dan menjadi benar-benar destinasi wisata, setelah dipromosikan melalui media social. Hal

tersebut terbentuk dengan disediakannya spot-spot menarik dan Cameragenic yang selanjutnya pengunjung dapat menjadikan konten untuk diposting di media social, seperti Instagram atau Facebook. Dengan adanya interaksi digital (views, likes, comments, repost, dan share) akan menarik netizen untuk mengunjungi destinasi wisata.

Di Gunungkidul terdapat 3 destinasi digital berkonsep pasar digital yang saat ini dikembangkan, yakni Pasar Taman Bumi di dalam kawasan Geosite Lembah Ngingrong Mulo, Pasar Telaga Jonge di Kecamatan Semanu, dan Pasar Ekologis Argowijil di Desa Gari, Kecamatan Wonosari. Sementara itu replika mandiri pasar digital ini juga marak di kembangkan pada destinasi wisata desa yang ada sehingga kegiatan ini mampu menginspirasi pengusaha wisata lokal untuk juga membangun pasar digital.

Pasar ini menonjolkan kearifan lokal yang ada di Gunungkidul agar para pengunjung bisa bernostalgia pada masa lalunya. Setting dan konsep tampilan pasar meskipun transaksinya mempergunakan pola barter uang konvensional dengan mata uang tradisional namun justru inilah yang menjadi daya tarik pengunjung. Jajanan pasar juga di kemas sedemikian rupa dan merupakan produk lokal setempat, berupa makanan khas dan souvenir yang di hasilkan oleh masyarakat setempat.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi warga sekitar, selain itu juga mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga tentang pariwisata yang menjadi tema dan prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul pada Misi ke 3 yaitu pemantapan pengelolaan pariwisata yang profesional, Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah dari sector pariwisata Pasar Digital merupakan program inovasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

1. Telaga Jonge

Pasar ini memadukan konsep digital dan tradisional, diyakini bakal menyedot wisatawan milenial. Telaga Jonge awalnya merupakan telaga biasa, namun memiliki keunikan tidak pernah mengalami kekeringan meski kemarau panjang di Kabupaten Gunungkidul. Seiring perkembangan wisata di sekitar yakni Goa Kalisuci, dan Luweng Jomblang, masyarakat

di sekitar mulai mengembangkan Telaga Jonge. Suasana yang asri yang ada di sekitar telaga karena pepohonan masih terjaga. Sebelah kanan telaga berdiri gubug-gubug di dalamnya terdapat penjual makanan dan minuman khas warga sekitar mulai dari jenang, hingga soto bathok. Tak ada pengenaan tarif untuk mengunjungi Telaga Jonge alias gratis. Namun uniknya, untuk berbelanja di pasar tradisional itu, uang rupiah tidak akan terpakai, karena harus menukarkan dengan uang jonge yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang. Satunya bernilai Rp 2.000, pedagang di sana hanya menerima uang jonge. Pada saat awal berjualan masih sepi karena memang telaga Jonge belum banyak dikenal oleh wisatawan meski berada tak jauh dari destinasi wisata yang cukup dikenal mulai Kali Suci dan Luweng Jomblang. Dengan berdirinya pasar digital ini bisa meningkatkan perekonomian warga masyarakat yang berjualan di sekitar telaga. Konsep pasar digital merupakan pasar tradisional yang dipadukan dengan digital untuk sarana promosinya. Salah satunya menghadirkan spot swafoto yang banyak digandrungi wisatawan milenial. Terdapat enam spot selfie (swafoto) yang ada di sini, mulai dari panggung hingga ayunan di telaga. Promosi digital ini menampung anak muda yang pengen eksis dengan latar fotografi yang menarik. Saat ini ada kurang lebih 20 pedagang yang ditampung. Mereka menyediakan berbagai makanan tradisional yang mulai jarang ditemui seperti gudeg jantung pisang dan makanan lainnya.

2. Obyek Wisata Geosite Lembah Ngingrong

Pasar Digital Ngingrong yang berada di kawasan Goa Ngingrong, Desa Mulo, Wonosari, Gunungkidul DIY. Pasar Ngingrong diresmikan pada 8 September 2018 lalu oleh Peresmian ini merupakan kerjasama Dinpar Gunungkidul, Dispar DIY dan Kementrian Pariwisata melalui Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Jogja. Pasar Ngingrong berada di Geopark Gunung Sewu yang dinyatakan sebagai geosite kawasan UNESCO Global. Pemandangan Obwis Geosite Lembah Ngingrong sangat instagramable dengan pemandangan lembah karst dan jurang makin epic dengan hamparan pohon hijau perbukitan. Akses jalan masuk telah tertata rapi dengan

melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berasal dari masyarakat setempat untuk menjaga memelihara kawasan wisaa. Pasar Ngingrong juga menawarkan sensasi kuliner. Tak itu saja, di tempat ini juga ada jemparingan atau belajar memamah gaya Mataram yang bisa diikuti oleh semua wisatawan yang hadir. Pengelola menawarkan adventure experience tanpa henti disini pengunjung juga akan diajak caving atau susur gua. Untuk menikmati keindahan Goa Ngingrong terdapat 2 pintu masuk. Satu di sisi timur dan satu di barat yang mana sangat disarankan untuk masuk lewat sisi timur karena disana akan ditemukan air terjun di dalam goa. Disini juga terdapat sungai bawah tanah yang konon bermuara di laut selatan. Program destinasi wisata digital merupakan imbauan dari Kementrian Pariwisata. Tujuannya untuk meningkatkan promosi melalui media sosial. Sehingga konsep kuliner dan spot foto seperti yang tersaji di Pasar Ngingrong menjadi senjata utama. Pasar Ngingrong merupakan destinasi digital pertama di DIY yang mengkolaborasikan jemparingan. Dipilihnya Jemparingan menjadi salah satu atraksi, bukan tanpa sebab. Ini lantaran Ngingrong akan dikembangkan menjadi destinasi yang mengutamakan adventure experience.

3. Pasar Ekologis Argowijil di Desa Gari, Kecamatan Wonosari

Destinasi Digital Pasar Ekologi Argowijil adalah salah satu destinasi yang terus dikembangkan dan menyajikan beragam potensi makanan khas desa yang berada di Desa Gari, Kecamatan Wonosari. Sebagai wujud dari pemberdayaan potensi yang ada di Desa, salah satunya adalah kuliner. Beraneka ragam makanan yang hanya bisa ditemukan di pasar Argowijil, diantaranya adalah : Getuk gembili, Botok urang, Getuk telo, Urap daun gedaglek, Jamu tradisional, wedang uwoh, dan teh ginastel dan beragam makanan dan minuman yang lainnya. Yang mana bahan baku dari pembuatan makanan dan minuman tersebut didapatkan dari hasil bumi masyarakat setempat. Wisata kuliner yang ada di pasar pampang melibatkan kelompok wanita tani (KWT), PKK, dan warga masyarakat.

BAB IX PENUTUP

Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul merupakan sebuah panduan dan payung hukum untuk mewujudkan smart city di Kabupaten Gunungkidul. Masterplan ini memiliki latar belakang pada potensi unggulan di bidang pariwisata, beberapa permasalahan kedaerahan seperti ekonomi, kemiskinan, pelayanan kesehatan serta pencapaian visi misi kepala daerah yang perlu dipercepat dengan inovasi menggunakan teknologi informasi.

Kerangka berpikir Masterplan Smart City Gunungkidul berdasarkan pada kolaborasi 6 dimensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

1. Smart Governance
2. Smart Branding
3. Smart Economy
4. Smart Society
5. Smart Living
6. Smart Environment

Seluruh program kerja dalam Masterplan Smart City berbasis pada Analisa Kesiapan Daerah dan Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) daerah, sehingga ditemukan strategi yang tepat dengan kerangka program berupa

1. Rencana Aksi (*Readiness* dan *Enabler* Smart City)
2. Inovasi Smart City per Dimensi dengan terhubung pada Program Kegiatan di RPJMD atau Renstra PD, untuk memastikan indikator, target, anggaran dan pelaksana.
3. Tahapan Waktu Pengembangan Smart City berupa:
 - a. Jangka Pendek (2019 -2020)
 - b. Jangka Menengah (2019 – 2023)
 - c. Jangka Panjang (2019 – 2028)

Peraturan Bupati tentang Master Plan Smart City Kabupaten Gunungkidul ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel yang harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul, serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul termasuk semua instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercakup di dalamnya. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa Peraturan Bupati tentang Master Plan Smart City Kabupaten Gunungkidul ini selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah serta masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH